KOMUNIKASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Konsentrasi *Public Relation* Program Studi Ilmu Komunikasi

Oleh:

LUSIANA LARAS KRISTANTI

6662142646

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG

2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lusiana Laras Kristanti
NIM	: 6662142646
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 29 Juli 1996
Program Studi	: Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KOMUNIKASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERANG** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya di cabut.

Serang, Oktober 2018

METERAI TEMPEL

BEA26ADF528966568

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lusiana Laras Kristanti

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Lusiana Laras Kristanti

NIM : 6662142646

Judul Skripsi : **Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang**

Serang, 2018

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Disajikan

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Nurprapti Wahyu W., M.Si	**Ail Muldi, M.I.Kom**
NIP. 197002092009122001	**NIP.198303062015041001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtaysa

Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lusiana Laras Kristanti
NIM : 6662142646
Judul Skripsi : **Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang**

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Kota Serang, Tanggal 25 Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 25 Oktober 2018

Ketua Penguji :

Dr. Rd. Nia Kania K., M.Si
NIP. 197907082002122002

.....

Anggota :

Iman Mukhroman, M.Si
NIP. 197502022002121002

.....

Anggota :

Ail Muldi, M.I.Kom
NIP. 198303062015041001

.....

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sjafari., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi

Dr. Rahmi Winangsih., M.Si
NIP. 196810192005012001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Antonius Sugiyo & Ibu Valentina Tri W.)

yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa, serta segala pengorbanan yang tiada henti.

Adikku tercinta Christina Bella Deswanti

yang telah memberikan dukungan, doa, serta semangat yang tiada henti.

Albertus Rama Pradipta

yang selalu mendengarkan keluh-kesah penulis mengenai segala permasalahan dalam penyusunan skripsi, dan tak henti memberi dukungan dan semangat

Sahabat Organisasi GMNI DPK UNTIRTA

Yang telah memberikan dukungan moral dan setia menemani selama masa perkuliahan

Sahabat Komunitas Single But Not Alone (SBNA)

yang telah memberikan dukungan dan setia menjadi tempat dikala kepenatan dalam pengerjaan skripsi melanda

Sahabat Otak Setengah

yang telah memberikan dukungan serta menjadi teman seperjuangan yang setia berbagi cerita, pengalaman dan menjadi tempat berkeluh-kesah.

Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika Ilmu Komunikasi

yang telah memberikan dukungan, nasihat, serta ilmu-ilmu dan segala pengalaman yang begitu berharga

Sahabat Ilmu Komunikasi angkatan 2014

yang telah memberikan motivasi dan inspirasi, serta menjadi teman seperjuangan selama empat tahun menimba ilmu

"Patience is bitter, but its fruit is sweet."

(Aristotle)

"Hard work always pays off, it's just a matter of time."

(Merry Riana)

Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang

(Soekarno)

ABSTRAK

Lusiana Laras Kristanti. NIM. 6662142646. Skripsi. Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang. Pembimbing I: Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si. dan Pembimbing II: Ail Muldi, M.I.Kom.

Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan segelintir peristiwa bencana alam yang melanda berbagai wilayahnya. Kondisi geografis, menyebabkan Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana alam yang tinggi. Berdasarkan data tren kejadian bencana 10 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Pusat Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia. 29 dari 100% kejadian bencana tiap tahunnya merupakan banjir. Deru banjir sejatinya memang tidak bisa dihindari ataupun dicegah kedatangannya. Oleh sebab itu, manusia hanya dapat bertindak untuk mengurangi risiko akibat banjir dengan melakukan kegiatan preventif. Komunikasi mendukung tercapainya pengurangan risiko bencana banjir melalui berbagai program kerja BPBD Kabupaten Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktor, analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancarasemi-terstruktur terhadap 7 informan yang mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang tergambarkan dalam empat dimensi komunikasi pengurangan risiko, yaitu penemuan fakta, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Penemuan fakta komunikasi dilakukan melalui proses survei, perencanaan komunikasi dilakukan dengan mengusulkan program kerja yang kemudian dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran disertai penyusunan pesan komunikasi secara informatif, edukatif, dan persuasif serta strategi komunikasi partisipatif, pelaksanaan komunikasi dilakukan dengan komunikasi tatap muka dan dengan media pendukung berupa media cetak brosur dan pamflet, media luar ruang brosur dan banner, serta media online website BPBD Kabupaten Serang. Evaluasi dilakukan dalam rapat internal panitia pelaksana kegiatan, rapat bulanan, dan peninjauan kembali daerah-daerah tempat pelaksanaan program kerja. BPBD Kabupaten Serang sebagai aktor utama penyelenggara kegiatan pengurangan risiko bencana banjir, menjalankan komunikasi bersama aktor komunikasi lainnya yaitu, pengurus media massa, korporasi industri, serta masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi Risiko, Komunikasi Bencana, Banjir, Pengurangan Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Serang.

ABSTRACT

Lusiana Laras Kristanti. NIM. 6662142646. Thesis. Communication of Flood Risk Reduction in Serang District. First Advisor: Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si. and Second Advisor: AIL MULDI, M.I.kom.

Indonesia has recently been shocked by a natural disaster that have hit various regions of Indonesia. Geographical condition cause this country have a high potential for natural disaster. Based on the latest 10 years disaster occurrence data that released by the National Disaster Management Agency's Data Center, floods are the most common disaster in Indonesia. 29 of 100% occurrences of disasters each year are floods. Flood cannot be inevitableor prevented. Therefore, humans only can act to reduce the risk due to flood by carrying out preventive activities. Communication supports the achievement of a reduction in the risk of flood through various communication programs to reduce the risk of flood in Serang district. This study aims to find out actors, situation analysis, planning, implementation, and communication evaluation of risk reduction for flood in Serang district. The results showed that the process of communication disaster risk reduction in Serang district, showed in four dimention of risk reduction communication. There are, fact finding, planning, implementation, and evaluation. Fact finding communication conducting a survey, while the communication planning is carried out by proposing a work program, and then the work program contained in thebudged implementation document, in this document there are compilation of communication messages, that arranged in an informative,educative and persuasive manner and a participatory communication strategy. The implementation of communication is done with face-to-face communication and supporting media,there is the print media in the form of brochure and pamphlet, out door media, in the form of brochures and banners, and the online media, website of BPBd Serang district. Evaluation is carried out in an internal meeting of organizing committee, monthly meetings, and a review of the areas where the work program is implemented.

***Keywords**: Risk Communication, Disaster Communnication, Flood, Flood Risk Reduction, BPBD Serang District.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya sehingga skripsi dengan judul Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak lepas dari bimbingan dan tuntunan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Soleh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terimakasih juga kepada Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Kandung Sapto N., S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Rahmi Winangsih, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi serta pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si., selaku pembimbing pertama, yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingannya dalam penulisan skripsi.

5. Bapak Ail Muldi, M.I.Kom., selaku pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, petunjuk dan bimbingannya dalam penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan bekal ilmu dan pelayanan selama ini.
7. Bapak Nana Sukmana Kusuma, SE, MM., selaku Kapala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang serta narasumber peneliti, yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan infomasi terkait skripsi.
8. Bapak Drs. Wawan Darmawan, M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Pengurangan Resiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang serta seluruh pejabat dan staff BPBD Kabupaten Serang, yang telah mendampingi dalam observasi serta membantu memberikan data yang peneliti butuhkan dalam melakukan penelitian skripsi.
9. Kedua orang tua, Bapak Antonius Sugiyo dan Ibu Valentina Tri Wijayanti yang sudah memberikan dukungan moral dan materiil, serta selalu memberikan motivasi sampai saat ini. Serta adikku tercinta Christina Bella Deswanti yang selalu memberika dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Albertus Rama Pradipta yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh-kesah atas segala permasalahan yang melanda dalam penyusunan skripsi,

juga selalu memberi dukungan dan senantiasa menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

11. Sahabat Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPK UNTIRTA terkhusus angkatan 2014 (Suci, Arman, Gandha, Gandhi, Yudha, Belong, Ahong, Tulehu) yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh-kesah sekaligus bersenang-senang selama masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat Single But Not Alone (Rama, Aris, Lugina, Mutia, Aris, Agis, Kumis, Keong, Toby, Mita, Sulung) yang telah memberikan dukungan dan setia menjadi tempat dikala kepenatan dalam pengerjaan skripsi melanda.
13. Sahabat-sahabat Otak Setengah (Aimee, Ninis, Fathur, Iqbal, Furqon) yang telah memberikan dukungan serta menjadi teman seperjuangan yang setia berbagi cerita, pengalaman dan menjadi tempat berkeluh-kesah.
14. Sahabat-sahabat Ilmu Komunikasi B 2014, Alfi, Rika, Nilam, Vive, Nisfi dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menghiasi hari-hari penulis sejak awal masa perkuliahan.
15. Sahabat-sahabat Chili (Cindy, Priscil, Bella, Lindana) yang selalu setia meluangkan waktu untuk sekedar bercengkrama ditengah kesibukan masing-masing.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2014 yang telah berjuang bersama-sama dari awal masa perkuliahan.

Peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan baik dalam penyusunan penelitian skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti mohon maaf atas segala

kekurangan dan kesalahan yang ada. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Serang, 30 Oktober 2018

Penyusun

Lusiana Laras Kristanti

6662142646

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

MOTTO v

LEMBAR PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Identifikasi Masalah 6

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Manfaat Penulisan 8

1.5.1 Manfaat Teoritis 8

1.5.2 Manfaat Praktis 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi dan Komponen Komunikasi 9

2.2 Komunikasi Bencana 14

2.3 Komunikasi Risiko dan Komunikasi Krisis 20

2.3.1 Komunikasi Risiko 21

2.3.2 Komunikasi Krisis 24

2.4 Banjir dan Penanggulangannya 27

2.5 Model Perencanaan Komunikasi Cutlip dan Center 32

2.6 Model Komunikasi Risiko William Leiss 35

2.7 Analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) 47

2.8 Kerangka Berpikir 48

2.9 Penelitian Terdahulu 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian 55

3.2 Pendekatan Penelitian 57

3.3 Jenis Penelitian 58

3.4 Metode Penelitian 58

3.5 Teknik Pengumpulan Data 59

3.6 Subjek Penelitian 60

3.7 Teknik Analisis Data 62

3.8 Uji Keabsahan Data 63

3.9 Jadwal Penelitian 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 66

4.2 Profil BPBD Kabupaten Serang 67

4.3 Kegiatan-kegiatan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir BPBD Kabupaten Serang 73

4.3.1 Sosialisasi Dan Simulasi 74

4.3.2 Pembentukan Relawan Bencana 75

4.3.3 Penyebaran Informasi Melalui Media Massa 78

4.3.4 Koordinasi Dengan Instanti 78

4.4 Deskripsi Informan Penelitian 83

4.5 Hasil Penelitian 87

4.5.1 Penemuan Fakta Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 87

4.5.2 Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 92

4.5.3 Pelaksanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 100

4.5.4 Evaluasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 105

4.5.5 Aktor Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 106

4.6 Pembahasan 116

4.6.1 Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir

Melalui Program Sosialisasi dan Pembentukan Relawan Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Cikeusal 117

4.6.2 Penemuan Fakta Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 131

4.6.3 Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 137

4.6.4 Pelaksanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 144

4.6.5 Evaluasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 153

4.6.6 Aktor Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang 155

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 164

5.2 Saran 166

5.2.1 Saran Akademis 167

5.2.2 Saran Praktis 167

DAFTAR PUSTAKA 169

LAMPIRAN 173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Empat Langkah Perencanaan Komunikasi Cutlip dan Center ... 34

Gambar 2.2. Model Proses Komunikasi Risiko 40

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir 50

Gambar 4.1 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Serang 67

Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Serang 71

Gambar 4.3. Brosur Kegiatan Desa Tangguh Bencana 104

Gambar 4.4. Aktor Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir 116

Gambar 4.5. Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana empat Desa di Kecamatan Cikeusal 131

Gambar 4.6. Analisis Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi 136

Gambar 4.7. Proses Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir 143

Gambar 4.8. Proses Pelaksanaan program kerja BPBD Kabupaten Serang..... 151

Gambar 4.9. Proses penemuan fakta hingga pelaksanaan program kerja BPBD Kabupaten Serang..... 152

Gambar 4.10. Proses Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir Berbasis Relawan..... 157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 53

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 65

Tabel 4.1. Informasi Informan Penelitian 85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara 174

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian 201

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 202

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup Peneliti 204

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia, beberapa bulan belakangan ini terus dihebohkan dengan segelintir peristiwa bencana alam yang melanda berbagai wilayahnya. Gejolak bencana alam yang masif menjadi perbincangan di berbagai daerah di negeri ini seakan mengingatkan kembali bahwa disadari atau tidak, masyarakat Indonesia memang hidup ditengah deretan potensi bencana. Gemuruh aktif gunung api, pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik (Supartini et al. 2017 : 10), yang letaknya tak menentu persis dibawah permukaan negeri, curah hujan tinggi yang menimbulkan deru banjir, gemuruh angin, hingga risiko longsor dan pergerakan tanah serta berbagai gejala alam lain yang suka tidak suka menjadi ancaman yata bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Kondisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana alam yang tinggi. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa tak ada lagi ruang untuk tetap abai terhadap ancaman alam. Berdasarkan data tren kejadian bencana 10 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Pusat Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia,

bencana banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia. 29 dari 100% kejadian bencana tiap tahunnya merupakan bencana banjir.

Berdasarkan data kejadian bencana yang dimuat dalam laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, terdapat peningkatan terjadinya bencana banjir yang fluktuatif dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Tahun 2009 meningkat sebanyak 488 kali. Tahun 2010 meningkat tajam sebanyak 1059 bencana banjir. Tahun 2011 hingga 2016 terjadi peningkatan yang stabil berturut-turut setiap tahunnya. Sebanyak 573, 584, 725, 596, 525, 824 kejadian yang terjadi hingga tahun 2016. Terakhir pada tahun 2017 sebanyak 979 kali kejadian bencana banjir di Indonesia.

Berdasarkan data yang dimuat dalam bnpb.go.id diatas, dapat disimpulkan bahwa deru banjir telah menjadi bencana rutin setiap tahunnya. Setiap tahun hampir sebagian besar wilayah di Indonesia selalu dilanda bencana banjir, mulai dari Pulau Sumatra (Nangro Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Jambi, Riau, dan Lampung), Pulau Jawa (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi (Sulawesi Utara), hingga Papua.

Banten menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang juga memiliki potensi rawan bencana banjir (Masterplan BPBD Kabupaten Serang, 2017). Ancaman banjir masih menghantui sejumlah wilayah di Banten, salah satunya Kabupaten Serang. Hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BNPB mengenai jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Serang,

bencana banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi kedua setelah kekeringan. Bencana daerah yang sering terjadi di Kabupaten Serang di dominasi oleh bencana kekeringan yang pernah terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Serang. Diurutan kedua, bencana banjir. Disusul dengan putting beliung dan tanah longsor. 12 dari 27 kejadian bencana di Kabupaten Serang pada tahun 2017 adalah bencana banjir (bnpb.go.id).

Salah satu banjir terbesar yang melanda Kabupaten Serang terjadi pada bulan Januari 2012. Banjir yang merendam kawasan Serang Timur dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi, tanah yang hampir gundul disepanjang wilayah sungai, dan erosi hebat saat hujan.. Banjir yang tak kunjung surut hingga satu hari, juga merendam ruas jalan tol Jakarta-Merak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai badan penyelenggara penanggulangan bencana mengkoordinasikan semua instansi dan relawan terkait untuk segera mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir serta mengevakuasi kendaraan yang terjebak banjir di sepanjang ruas jalan tol Ciujung (Kompas, 2012).

Dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir mulai dari rusaknya fasilitas pemukiman, fasilitas umum bahkan memakan korban jiwa. Berdasarkan data arsip PUSDALOPS Provinsi Banten yang dimuat dalam Laporan Bencana Banjir 2017, terdapat beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa banjir yang terjadi pada periode Desember 2016 sampai dengan Maret 2017. Bencana banjir yang terjadi pada periode

tersebut berdampak pada 29 Kecamatan dan 88 Desa dengan 22.389 kepala keluarga dengan jumlah 79.091 jiwa sebagai korban, 3 orang diantaranya sebagai korban yang meninggal, dan kerusakan yang tercatat adalah Rp. 49.836.510.000,00. Selain itu, data BNPB pusat menunjukkan peningkatan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir di Indonesia selama tahun 2016 hingga 2017. Terdapat 180 korban meninggal dunia pada tahun 2017, 20% lebih banyak dari tahun sebelumnya (bnpb.go.id).

Kenyataannya, gejala alam memang tidak bisa diprediksi, namun potensi peningkatan dan kompleksitas bencana di masa depan wajib untuk diwaspadai. Mengabaikan peringatan alam dan cenderung diam tanpa berkomitmen mengurangi risiko bencana merupakan sikap yang fatalistic yang tidak dapat ditolerir. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko bencana menjadi keharusan yang mutlak direnungkan oleh segenap elemen masyarakat. Kerugian yang semakin meningkat setiap tahunnya membutuhkan upaya penanggulangan sebagai salah satu upaya preventif terhadap bencana banjir. Penanggulangan bencana dalam tahap pra bencana atau sebelum terjadinya bencana dimaksudkan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kerugian dalam bencana (Rudianto, 2015).

Pemerintah menyatakan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut

ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) di tingkat Daerah.

BPBD Kabupaten Serang adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. BPBD bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. BPBD Kabupaten Serang ini lah yang mengkoordinasi semua perangkat daerah, lembaga atau pihak lainnya dalam menanggulangi pra, pada saat, dan pasca bencana. Lembaga atau pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana dan memberikan bantuan ini meliputi Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Kepolisian, Palang Merah Indonesia (PMI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan Umum (PU), dan Badan SAR Nasional (BASARNAS).

Komunikasi penguranga risiko bencana dapat efektif apabila pemerintah menerapkan manajemen penanggulangan bencana yang partisipatif dengan mengerahkan berbagai struktur masyarakat dan lembaga penyiaran yang ada. Melalui kerjasama dan koordinasi tersebut kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana akan efektif dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal yang tersedia sehingga masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek

penanggulangan bencana tetapi mereka juga sebagai subjek yang bertanggungjawab atas keamanan masyarakat dari berbagai macam bencana.

Kegiatan pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mengurangi risiko akibat bencana alam yang terjadi. Bencana alam merupakan bencana yang tidak bisa dihindari maupun dicegah oleh manusia. Oleh sebab itu, manusia bertindak untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir dengan melakukan kegiatan-kegiatan preventif. Komunikasi menjadi salah satu bidang yang mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana. Komunikasi mendukung tercapainya pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang melalui berbagai kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan sebuah masalah mengenai penelitian tentang: “Bagaimana komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang?”

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diidentifikasikan beberapa pertanyaan penelitian yang tersusun dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penemuan fakta dalam persiapan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang?
2. Bagaimana perencanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang?
3. Bagaimana pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang?
4. Bagaimana evaluasi pelaksanaan komunikasi risiko bencana banjir di Kabupaten Serang?
5. Bagaimana keterlibatan aktor komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menulis penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang, meliputi

1. Untuk mengetahui penemuan fakta dalam persiapan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui perencanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.
4. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan komunikasi risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.

5. Bagaimana keterlibatan aktor komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berharap penelitian ini dapat menambah wawasan serta lebih memberi pemahaman mengenai aplikasi dari ilmu komunikasi. Penelitian yang membahas mengenai komunikasi pengurangan risiko bencana banjir ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dalam mengembangkan konsep komunikasi risiko juga teori komunikasi pada umumnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapar menjadi bahan evaluasi diri bagi instansi terkait khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai pertimbangan saran bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan Komunikasi Bencana.

Penelitian ini diiharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi dan Komponen Komunikasi

Komunikasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas seorang manusia, tentu masing-masing orang mempunyai cara sendiri, tujuan apa yang akan didapatkan dalam komunikasinya. Jika ditinjau dari pola komunikasinya, ada sistem komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antarpersonal, komunkasi kelompok, komunkasi organisasi, dan komunikasi massa.

Tinjauan mengenai komunikasi, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan hal yang selalu melekat pada manusia, terlebih lagi di dalam kehidupan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Interaksi yang terjalin antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat disebut sebagai komunikasi. Segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat terlepas dari unsur komunikasi. Komunikasi merupakan sarana dalam proses penyampaian pesan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) untuk memberitahukan atau merubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung, secara lisan maupun secara tidak langsung dengan media sebagai sarananya (Effendy, 1997:9).

Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya, dan berbagai peluang untuk memberikan umpan balik segera (Bitter dalam Wiryanto, 2004:32). Secara sederhana dapat diartikan bahwa proses komunikasi akan terjadi apabila pengirim menyampaikan informasi berupa verbal ataupun non verbal kepada penerima dengan menggunkan medium suara manusia ataupun dengan medium tulisan.

Suatu komunikasi yang baik dapat terjadi jika dalam prosesnya menggunakan teknik berkomunikasi yang baik pula. Teknik berkomunikasi adalah cara atau "seni" penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemekian rupa, sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Pesan yang telah dirancang atau direncankan sebelumnya memungkinkan komunikan akan lebih memahami bahkan menimbulkan rasa empati di dalam dirinya.

Definisi komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian pesan yang sederhana. Komunikasi adalah suatu proses dinamik transaksional yang mempengaruhi perilaku sumber dan penerimanya dengan sengaja menyandi (*to code*) perilaku mereka untuk menghasilkan pesan yang mereka salurkan lewat suatu saluran (*channel*) guna merangsang atau memperoleh sikap atau perilaku tertentu (Mulyana & Rakhmat, 2010:14). Hal tersebut dapat diartikan bahwa suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator akan berhasil jika penerima pesan dapat menyerap perilaku dan terpengaruh oleh isi pesan yang disampaikan.

Secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana di dalamnya terjadi pertukaran pesan yang merujuk kepada suatu tujuan atau demi mendapatkan respon. Pertukaran pesan terjadi karena adanya suatu saluran komunikasi sebagai penghantar pesan agar pesan dapat sampai kepada komunikan.

Praktek dalam berkomunikasi tidak terlepas dari beberapa komponen atau unsur di dalamnya. Komponen komunikasi (Sihabudin & Winangsih, 2012 : 37) diantaranya sumber atau yang disebut komunikator, pesan, media, penerima atau yang disebut sebagai khalayak atau komunikan.

a. Komunikator

Komunikator merupakan pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Seorang komunikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, memiliki kredibilitas tinggi, artinya memiliki keahlian atau kemampuan dan tingkat kesesuaian tinggi dengan topik yang dibicarakan. Kedua, memiliki tingkat kepercayaan, dalam arti seorang komunikator dipercaya oleh khalayak, karena didukung oleh unsur kredibilitas, disamping perilaku jujur. Serta kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator.

Komunikator juga harus memiliki kesamaan tinggi dengan komunikan, baik dari aspek bahasa, tempat tinggal, kelas sosial, dan

sebagainya. Keempat, komunikator harus memiliki penampilan menarik, khususnya dari segi fisik. Apabila sumber di nilai menarik oleh penerima maka proses komunikasi akan lebih cepat berhasil karena adanya proses identifikasi dalam diri pihak penerima. Kedua syarat diatas, oleh Cangara (2014:108) dikelompokkan menjadi satu poin yaitu daya tarik. (*attractiveness*). Daya tarik komunikator terlihat dalam hal kesamaan (*similarity*), dikenal baik (*familiarity*), disukai (*liking*), dan fisiknya (*physic)*. Persyaratan terkahir, memiliki kekuatan dan kekuasaan, yang diantaranya adalah karisma, wibawa otoritas, kompetensi atau keahlian, dan pemenuhan.

b. Pesan *(Message)*

Pesan merupakan sekumpulan simbol komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Simbol atau lambang dapat bersifat verbal atau nonverbal. Komunikasi verbal yaitu penyampaian pesan dalam bentuk lisan atau tulisan, sedangan nonverbal merupakan penyampaian pesan melalui bahasa tubuh seperti gerak-gerik, isyarat, raut wajah, dan lainnya.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam mengemas pesan, diantaranya yaitu isi pesan, materi dan pesan tersebut. Selanjutnya struktur pesan, yaitu bagaimana pesan tesebut disusun untuk memperoleh efek maksimal. Terakhir, format pesan, yaitu bagaimana pesan disusun dalam gabungan pesan verbal dan nonverbal sehingga efeknya lebih baik. Format pesan lebih menekankan kepada gaya penyajian pesan.

Dalam teknik pengelolaan pesan, menurut Cassandra, ada dua model penyusunan, yaitu penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif, lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Selanjutnya penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak (Cangara, 2014 : 129).

c. Media

Media atau saluran adalah alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikannya. Kriteria media massa harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, aktualitas yang berarti kebaruan. Isi media berupa informasi terbaru dan diperlukan *audience*. Jarak dari peristiwa dengan penyampaian pesan masih baru dan hangat. Selanjutnya, universalitas atau menyeluruh. Pesan disampaikan tidak terbatas pada hal khusus, tetapi menyangkut kepada banyak persoalan. Ketiga, publisitas atau umum. Informasi disebarkan untuk umum dan semua golongan dan kelompok. Keempat, periodisitas atau teratur. Informasi disampaikan teratur waktunya. Terakhir, kontinuitas atau tidak hanya sekali. Media menyampaikan isi pernyataan berkesinambungan.

d. Komunikan

Komunikan merupakan sasaran pesan komunikasi. Komunikan merupakan penerima pesan komunikasi. Komunikan merupakan unsur komunikasi yang sangat penting karena keberhasilan komunikasi banyak ditentukan oleh komunikan. Suatu komunikasi dikatakan berhasil apabila komunikator berhasil melakukan perubahan pada diri komunikan sesuai dengan tujuan komunikator menyampaikan pesan tersebut.

2.2 Komunikasi Bencana

Peranan aktivitas komunikasi yang efektif dan terintegrasi dalam penanggulangan bencana diperlukan sebagai salah satu kunci suksesnya alur mitigasi bencana. Bencana terkait erat dengan kondisi serba cepat dan darurat. Oleh sebab itu, untuk membentuk sinyal-sinyal komunikasi yang integratif semasa pra dan pasca bencana perlu intervensi dan strategi khusus yang tak lagi layak untuk diabaikan.

Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi risiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana (Haddow and Haddow, 2008 : 1)

Penanggulangan bencana baik dalam tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana, semua proses dalam semua tahapan itu sangat membutuhkan data dan informasi bencana. Tindakan tanggap darurat juga merupakan kegiatan yang membutuhkan kajian cepat begitu bencana terjadi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai lokasi dan dampak bencana untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi tanggap darurat. Pada masa paska bencana ada program kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang hanya bisa dilakukan setelah ada data dan informasi mengenai dampak bencana.

Komunikasi memegang peranan penting hampir di seluruh aktivitas manusia demikian pula dalam penanggulangan bencana, sehingga pengelolaan komunikasi yang efektif harus menjadi perhatian institusi pemerhati bencana terutama institusi pemerintah terkait. Oleh karena itu instansi terkait harus memahami dan menjalankan strategi komunikasi bencana yang efektif tidak hanya pada saat tanggap darurat saat bencana terjadi namun juga harus menjadi pertimbangan dan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tiap tahapan penanggulangan bencana (Mutianingrum, 2017)

Persoalan pun hadir ketika kondisi darurat bencana, komunikasi yang efektif dalam kaitannya dengan isi pesan dan sasaran informasi belum dapat diupayakan maksimal. Akibatnya fatal, pemahaman bersama tak dapat dicapai. Risiko bencana pun menjadi makin sulit untuk diminimalkan dampaknya.

Dalam konteks isu tersebut, dapat disederhanakan bahwa kunci utama permasalahan ada pada pola komunikasi bencana yang belum efektif dan terintegrasi. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 memang telah menggariskan alur kerja secara substansial lembaga pemerintah dalam menjalankan manajemen penanggulangan bencana. Proses komunikasi penanggulangan bencana akan lebih baik jika berbentuk jaringan komunikasi integratif yang bersifat kesetaraan. Melibatkan lembaga swasta dan masyarakat di kawasan bencana. Berbagai elemen memiliki tantangan untuk mengintegrasikan beragam informasi yang berserak pada saat pra bencana.

Komunikasi bencana memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota masyarakat akan bahaya dan risiko bencana, selain itu komunikasi bencana pun memiliki peranan untuk mentransmisikan segala nilai-nilai sosial kultural masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan dan rehabilitasi bencana. Proses komunikasi yang berlangsung tak lagi berupa komunikasi pasif dan statis, tapi lebih jamak berupa bentuk komunikasi transaksional dua arah. Lebih dinamis dan efektif dalam mendistribusikan informasi pada konteks darurat bencana. Melalui formula transaksional ini, masyarakat dan beragam pemangku kepentingan terkait dijelaskan secara serempak sebagai pengirim dan penerima pesan, melakukan transaksi pesan dan menciptakan ulang makna secara terus-menerus (Sellnow & Matthew, 2013). Simpulannya, komunikasi dalam perbincangan penanggulangan bencana berada dalam posisi yang esensial. Komunikasi difungsikan sebagai sebentuk pertukaran gagasan verbal, interaksi yang saling memberikan pemahaman, pengurangan

ketidakpastian, penyampaian pesan dan transfer pemahaman, serta proses untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lain. (Sellnow & Matthew, 2013).

Komunikasi dalam kehidupan sosial juga penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri serta kelangsungan hidup manusia dan melalui komunikasi sosial, manusia dapat bekerjasama dengan berbagai anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam komunikasi bencana diperlukan keahlian dan kemampuan komunikasi yang tak sekedar menyampaikan pesan bencana secara meluas saja tetapi diperlukan juga kemampunan membentuk semangat untuk berbagi dengan penuh empati. Oleh karena itu penting diketahui beberapa karakteristik efektifitas komunikasi antarpersonal seperti yang dikatakan A. DeVito (1997: 259), yaitu *openness, emphaty, supportivennes, positivennes, equality.*

Komunikasi penanggulangan bencana penting dilakukan untuk mengurangi jumlah korban jiwa juga harta benda. Komunikasi bencana sebelum terjadinya bencana atau pra-bencana berbentuk komunikasi mitigasi bencana. Edukasi kebencanaan merupakan salah satu bentuk komunikasi mitigasi bencana. Edukasi kebencanaan melingkupi banyak hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Adanya edukasi ini tidak menutup kemungkinan bahwa dampak dari suatu bencana akan hilang, namun kegiatan ini setidaknya dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi.

Menurut Haddow dan Haddow (2008: 2) terdapat 5 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu, *costumer focus,*

memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat. Selanjutnya l*eadership commitment*, pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi. Setelah itu, s*ituational awareness*, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci. Landasan terakhir yaitu *media partnership*. Media seperti televisi, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerjasama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang terlatih untuk berkerjasama dengan media untukmendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada publik.

Penanggulangan bencana, harus didukung dengan berbagai pendekatan baik *soft power* maupun hard power untuk mengurangi risiko dari bencana. Pendekatan *soft power* adalah dengan mempersiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana. Sementara *hard power* adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik sepeti membangun sarana komunikasi, membangun tanggul, mendirikan dinding beton, mengeruk sungai dan lain-lain.

Dalam Undang-undang, *soft power* dan *hard power* disebut mitigasi bencana. Pada dua pendekatan inilah, komunikasi bencana amat dibutuhkan.

Dalam UU No 23 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu langkah yang penting dilakukan untuk pengurangan risiko bencana adalah melalui mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu bentuk kegiatan mitigasi bencana menurut pasal 47 ayat 2 (c) adalah melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (Rudianto, 2015).

Peran serta dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan elemen masyarakat lainnya dapat membantu mensosialisasikan informasi mengenai kebencanaan sehingga pengetahuan masyarakat mengenai bencana akan meningkat. Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional (Pasal 10 UU No. 24/2007). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan badan pemerintahan nonprofit yang bertugas dalam penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa BNPB memiliki tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; serta menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan badan penyelenggara penanggulangan bencana tingkat daerah, berperan mengkoordinasikan setiap instantsi terkait dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana alam daerah setempat. BPBD adalah instansi leading sector yang berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana. BPBD mengkoordinasikan para pelaku-pelaku penanggulangan yang terdiri dari instansi terkait dan relawan.

BPBD sebagai lembaga penyelenggara tidak bergerak sendiri. Selain partisipasi masyarakat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang, peran aktor komunikasi lainnya juga sangat penting. Seperti yang tertera pada logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Segitiga berwarna biru yang tertera dalam logo BNPB memiliki makna Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang saling bekerjasama untuk mensukseskan penanggulangan bencana alam. Begitu pula yang dikatakan oleh Leiss (1994), komunikasi risiko penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai actor komunikasi terkait. Empat elemen yang saling berkaitan yaitu Pemerintah, Industri, Masyarakat umum dan Kelompok khusus serta media massa. Semua elemen terkait saling berperan sehingga penanggulangan bencana lebih efektif.

2.3 Komunikasi Risiko dan Komunikasi Krisis

Secara umum komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan, terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan

balik. Komunikasi juga menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat sehingga dalam kegiatan komunikasi terjadi pokok perhatian yang sama terhadap topik yang dibicarakan. Berkaitan dengan bencana, komunikasi dapat berfungsi sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat.

Peranan aktivitas komunikasi yang efektif, terintegrasi, dan kohesif dalam penanggulangan bencana diperlukan sebagai salah satu kunci suksesnya alur mitigasi bencana. Bencana terkait erat dengan kondisi serba cepat dan darurat. Oleh sebab itu, untuk membentuk sinyal-sinyal komunikasi yang integratif semasa pra dan pasca bencana perlu intervensi dan strategi khusus yang tak lagi layak untuk diabaikan. Komunikasi bencana dapat dilakukan dalam tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana, komunikasi bencana erat kaitannya dengan komunikasi risiko dan komunikasi krisis. Komunikasi risiko tidak sekedar bertujuan untuk melancarkan mitigasi bencana, komunikasi risiko lebih spesifik pada pengurangan risiko yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam.

2.3.1. Komunikasi Risiko

Komunikasi risiko merupakan bagian dari komunikasi lingkungan. Fokus dari komunikasi lingkungan adalah cara manusia mengomunikasikan tentang alam karena memberikan efek kepada banyak orang tentang krisis lingkungan dan hubungan manusia dan alam. Adapun yang menjadi dasar asumsi adalah cara berkomunikasi manusia mempunyai efek besar terhadap persepsi mengenai dunia atau tempat

tinggal, lalu persepsi tersebut akan membentuk bagai mana manusia mendefinisikan hubungan manusia dengan alam dan bagai mana manusia bertindak terhadap alam (Asteria, 2016).

Komunikasi risiko didefinisikan sebagai setiap pertukaran informasi yang berguna tentang kesehatan dan lingkungan di antara pihak yang berkepentingan. Definisi lain menyatakan komunikasi risiko sebagai pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan tentang keadaan, besaran, pentingnya, atau pengendalian risiko. Tentu banyak pihak yang berkepentingan dalam komunikasi risiko ini, misalnya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga penelitian, organisasi profesi, media, dan tentu saja komunitas. Tugas berat dari komunikasi risiko adalah bagaimana menyampaikan pengetahuan tentang bencana kepada masyarakat umum. Karena masyarakat yang berisiko bencana alam adalah masyarakat awam, maka informasi ini harus dikemas dengan baik agar mudah dimengerti. Fokus komunikasi kemudian adalah bagaimana menyamakan persepsi tentang risiko yang dipersepsi oleh masyarakat dengan risiko yang benar secara teknis.

Dalam pandangan sehari-hari, risiko bermakna sebagai estimasi kasar tentang sebuah kemungkinan buruk atau negatif yang terjadi pada suatu orang, komunitas atau masyarakat. Tentunya, sebelum mendiseminasikan beragam informasi tentang risiko kepada masyarakat rawan bencana, pemerintah dalam hal ini BNPB dan berbagai pemangku kepentingan lain memiliki tanggung jawab untuk menganalisis jenis dan kekuatan dampak

risiko yang mengancam. Karena informasi risiko merupakan informasi teknis yang memiliki jenis yang berbeda tergantung konteks di mana risiko tersebut dibincangkan.

Dalam pandangan sehari-hari, risiko bermakna sebagai estimasi kasar tentang sebuah kemungkinan buruk atau negatif yang terjadi pada suatu orang/komunitas atau masyarakat. *United States Environmental Protection Agency* (EPA) dalam Cox (2013) mengariskan definisi dari risiko sebagai peluang yang mengandung efek berbahaya kepada kesehatan manusia atau nyawa manusia yang bersumber pada terpaan terhadap tingkah laku lingkungan sekitar. Berbagai pemikiran dan penegasan tentang definisi risiko tersebut membawa pada satu simpulan bahwa tujuan utama dari urgensi komunikasi risiko, pertama meningkatkan peluang kesadaran dan pemahaman tentang persoalan spesifik yang mengancam di sekitar masyarakat rawan bencana selama proses analisis risiko, kedua meningkatkan konsistensi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan terhadap manajemen risiko dan implementasi langsungnya, selanjutnya meningkatkan nilai efektif dan efisiensi terhadap proses analisis risiko.

Sebelum komunikasi risiko terjadi, ragam risiko bencana yang berserak di lapangan harus dikompilasi, dan dianalisis terlebih dahulu oleh bermacam ahli kebencanaan. Hal inilah yang menjawab pertanyaan dasar mengapa bencana sebagai kasus kompleks tak bisa ditangani oleh segelintir pemangku tanggung jawab saja. Perlu ada kerjasama yang

kompleks antara pemerintah, *scientist*, komunitas, masyarakat rawan bencana, hingga media.

Partisipasi publik dalam analisis risiko justru malah meningkatkan kemungkinan pengambilan keputusan publik tentang mitigasi bencana yang lebih masuk akal. Berdasar pada pemahaman tersebut, saat ini pendekatan tentang distribusi informasi bencana dalam konsep komunikasi risiko cenderung menggunakan partisipasi publik yang aktif. Praktik partisipasi publik dalam komunikasi risiko ini telah diterapkan oleh banyak lembaga yang mengambil peran dalam mitigasi bencana.

Komunikasi risiko yang ideal akan menempatkan risiko dalam konteks, membuat perbandingan dengan risiko lainnya, dan mendorong terpantiknya dialog aktif antara pengirim dan penerima pesan tentang informasi risiko bencana. Bencana pun kemudian menghadirkan krisis. Dalam peradaban manapun, krisis memaksa perubahan masif pada tataran sosial, politik, ekonomi, dan tentu saja tampak muka lingkungan. Tak dapat disangkal, krisis pun memicu kerugian potensial, melantarkan kekacauan yang berdampak luas dan sistematik. Pencegahan krisis memang nampak tidak mungkin untuk dilakukan, sebab kekuatan alam dibalik krisis berwujud bencana yang mengandaskan suatu wilayah seringkali tak dapat dibendung.

2.3.2. Komunikasi Krisis

Usai menilik risiko, bencana pun kemudian menghadirkan krisis. Dalam peradaban manapun, krisis memaksa perubahan masif pada

tataran sosial, politik, ekonomi, dan tentu saja tampak muka lingkungan. Tak dapat disangkal, krisis pun memicu kerugian potensial, melantarkan kekacauan yang berdampak luas dan sistematik. Pencegahan krisis memang nampak tidak mungkin untuk dilakukan, sebab kekuatan alam dibalik krisis berwujud bencana yang mengandaskan suatu wilayah seringkali tak dapat dibendung. Bersifat tiba-tiba, tanpa pemberitahuan sama sekali. Namun, dengan upaya mengatur krisis yang baik, praktik untuk mengurangi dampak krisis setidaknya menjadi harapan terakhir yang dapat dilakukan. Segala runtutan ilmu pengetahuan masa kini punya andil masif dalam mengelola dampak krisis. Medis, sosiologi, psikologi, teknis, logistik, sosial politik, hukum kriminal, begitupun juga ilmu komunikasi. Sellnow and Matthew (2013) berujar bahwa komunikasi memiliki peranan vital untuk menegosiasikan segala batasan yang melintang dalam upaya mengefektifkan manajemen krisis dan respons. Singkatnya, komunikasi krisis dalam manajemen krisis membawa sebentuk peranan untuk mengonstruksikan pesan dan makna, pada segala lintasan interaksi dan koordinasi manusia yang berada dalam lingkup darurat bencana.

Health dalam Sellnow and Matthew (2013) mengatakan bahwa krisis adalah risiko yang dimanifestasikan. Dari perspektif tersebut, Heath berpandangan bahwa risiko itu muncul ke permukaan sebelum krisis melanda. Krisis merupakan konsekuensi dari risiko yang berkembang tanpa adanya usaha yang memadai untuk melakukan manajemen risiko.

Simpulannya adalah, ketika risiko yang membayang di sekitar lokasi rawan bencana terus dipendam, dierami tanpa adanya antisipasi yang memadai, bahkan terlanjur untuk bercampur dengan ragam risiko lain yang menyeruak di sekitar wilayah rawan bencana, maka di situlah kemudian krisis muncul dan menggelegak dalam pusaran kegaduhan tak terkira. Misalnya ketika risiko banjir urung diperhatikan, ketika sudah terjadi banjir, bencana banjir bisa jadi menambah krisis lain berupa tanah longsor dan angin puting beliung. Singkatnya, jika risiko dan ancaman yang sudah diprediksi membayang di wilayah rawan bencana kemudian dapat diantisipasi, maka krisis pun dapat dicegah.

Turner (1976) mengajukan pandangan bahwa krisis adalah "*intelligence failure*" atau "*failure in foresight*". Risiko acapkali gagal untuk dimengerti dan dikomunikasikan. Sinyal-sinyal tanda bahaya dari risiko yang mengancam tak dapat ditafsirkan secara akurat, atau mungkin sinyal-sinyal tersebut berada dalam ketidakaturan sehingga menyulitkan para pemangku kebijakan dalam manajemen bencana untuk menghubungkan titik-titik kerawanan risiko, hingga akhirnya bencana pun datang dan krisis melanda tanpa adanya persiapan mitigasi yang matang.

Seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi, pemahaman tentang bagaimana mengomunikasikan krisis pun semakin beragam. Salah satu yang paling nampak terlihat adalah bentuk komunikasi krisis yang lebih dinamis dan berwujud hubungan timbal balik. Dalam formulasi seperti

ini, krisis dikomunikasikan secara simultan antara pengirim dan penerima pesan. Pesan yang diseminasikan bersifat dinamis, berkelanjutan, tak memiliki ujung pangkal. Dalam prosesnya, krisis yang dikomunikasikan pun berbaur dengan pengalaman kesakitan dan traumatis terhadap bencana. Simbol-simbol yang muncul ketika krisis melanda seperti tanda bahaya dan sirene darurat pada beberapa orang cenderung akan menimbulkan efek traumatis yang justru akan mengurangi efektifitas dari informasi tentang krisis itu sendiri.

Pada akhirnya, komunikasi dalam konteks krisis dapat dipahami sebagai aktivitas berkelanjutan dari penciptaan makna diantara kelompok, komunitas, masyarakat, individu, atau bahkan pemangku kepentingan dalam isu pengelolaan krisis selama bencana terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan, meredam, membatasi krisis, dan merespons ancaman dan kerusakan. Sellnow and Matthew (2013) menegaskan fakta bahwa proses komunikasi dalam konteks krisis memberikan kemudahan bagi individu, masyarakat, kelompok, komunitas, dan pemangku kepentingan lain untuk menghasilkan kerangka kerja yang akan membantu untuk memahami dan melakukan tindakan nyata meskipun dalam kondisi yang sangat tidak menentu, yang mengancam hak hidup ketika krisis melanda.

2.4 Banjir dan Penanggulangannya

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologisa

Bencana merupakan peristiwa abnormal atau luar biasa dan diluar kebiasaan yang jarang terjadi, sehingga ketika bencana terjadi, masyarakat terdampak akan dipaksa untuk melakukan berbagai hal yang belum/tidak biasa dilakukan. Bencana tidak bisa ditebak atau diprediksi; meski dari analisa jaringan pemantauan bencana diketahui akan terjadi kejadian bencana namun tidak secara terperinci dan berbagai perubahan dapat terjadi.

Bencana dapat diartikan sebagai fenomena yang kompleks dimana kegiatan dan aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana sangat banyak dan beragam. Kompleksitas tersebut tidak hanya ada pada masa tanggap darurat tapi juga pada tahapan lain dalam manajemen penanggulangan bencana, banyak aktor akan mengambil bagian dengan berbagai peran dan fungsi. Tampak bahwa bencana apapun namanya akan memberikan dampak yang merugikan baik bagi manusia, maupun lingkungan. Persoalannya adalah, jika bencana itu tidak dapat dihindari ataupun diprediksi kedatangannya.

Sebagai proses alam, banjir adalah hal yang biasa terjadi dan merupakan bagian dari siklus hidrologi. Banjir merupakan suatu keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir terjadi karena debit air sungai yang sangat tinggi hingga melampaui daya tampung

saluran sungai lalu meluap ke daerah sekitarnya. Hal ini dapat kita lihat dari adanya dataran banjir pada sistem aliran sungai. Saat banjir, terjadi transportasi muatan sedimen dari daerah hulu sungai ke hilir dalam jumlah yang luar biasa. Muatan sedimen itu berasal dari erosi yang terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan. Melalui mekanisme banjir ini, muatan sedimen itu disebarkan sehingga membentuk dataran.

Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut.

Begitupula yang terjadi di Kabupaten Serang. Beberapa daerah di wilayah Kabupaten Serang merupakan daerah rawan bencana, khususnya banjir. Bencana banjir terbesar yang pernah melanda Kabupaten Serang terjadi pada tahun 2012. Bencana Banjir yang merendam sebagian besar wilayah Serang Timur. Pemukiman warga di sepanjang bantaran daerah aliran sungai Ciujung terendam banjir, bahkan hingga merendam ruas jalan tol Jakarta-Merak (Data BPBD Kabupaten Serang, 2012).

Curah hujan yang ekstrem, menyebabkan banjir dibeberapa kabupaten di Provinsi Banten. Selain itu, semakin padatnya pemukiman penduduk yang menyebabkan penyempitan aliran sungai, musim pasang air laut, kebersihan yang kurang, drainase yang tidak terawat, dan kurangnya tahan resapan juga menjadi beberapa penyebab banjir tersebut (Kompas, 2012).

Penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan beberapa hal, salah satunya penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan (Saud, 2007). Daerah aliran sungai yang seharusnya tidak dipenuhi dengan banyaknya bangunan dan sampah. Hal lain yang dapat diupayakan dalam penanggulangan banjir adalah tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah yang sering menimbulkan banjir serta mengupayakan pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai. Belakangan ini sedang gencar adanya sterilisasi daerah pinggir sungai dan relokasi pemukiman disekitar bantaran sungai oleh Pemerintah Daerah setempat.

Berikutnya hal yang juga perlu dilakukan adalah tidak membuang sampah ke dalam sungai. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan memang merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana banjir. Tidak dapat dipungkiri, selain disebabkan oleh alam, banjir juga terjadi karena disebabkan oleh ulah manusia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan banjir, Pemerintah mengadakan program pengerukan sungai, juga program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas di bagian sungai rawan banjir. Terakhir, upaya yang disarankan untuk dilakukan yaitu pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.

Penanggulangan bencana mempunyai beberapa tahapan, yaitu prabencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana. Semua proses dalam semua tahapan itu sangat membutuhkan data dan informasi bencana. Pada tahap pra-bencana,

misalnya, pembuatan peta rawan bencana tentu salah satu sumbernya adalah data series bencana yang terjadi di daerah terkait. Tindakan tanggap darurat juga merupakan kegiatan yang membutuhkan kajian cepat begitu bencana terjadi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai lokasi dan dampak bencana untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi tanggap darurat. Pada masa paska bencana ada program kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang hanya bisa dilakukan setelah ada data dan informasi mengenai dampak bencana (Mutianingrum, 2017).

Salah satu penelitian di Hilo, Hawaii menunjukan salah satu kegagalan penanganan bencana alam yang diakibatkan oleh *miss communication* dalam penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sehingga memakan banyak korban jiwa. Penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para korban selamat dari bencana tsunami di Hilo pada tahun 1946 dan 1960, menemukan bahwa pada bencana tersebut telah terjadi kesalahan prosedur dan koordinasi pemerintah, sehingga terjadi keterlambatan publikasi informasi ancaman bencana dari Pemerintah melalui beberapa instansi dan kepolisian setempat, Hawaii dan Hilo. Penelitian tersebut juga menemukan telah terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan media massa. Salah satunya adalah pada bencana tsunami tahun 1960, beberapa saat setelah gelombang pertama yang tak begitu besar, media massa menyampaikan berita kepada publik melalui radio di Hawaii bahwa tidak akan ada gelombang besar susulan atau gelombang tsunami dalam satu jam ke depan. Akibatnya, bencana tsunami tersebut memakan banyak korban jiwa.

Penelitian diatas membuktikan bahwa dalam penanganan bencana diperlukan prosedur yang sesuai. Selain itu komunikasi dalam penanganan bencana alam juga diperlukan untuk memperlancar penyampaian pesan oleh pihak yang bertugas melakukan penanggulangan bencana alam kepada para korban, masyarakat umum dan juga kepada sesama instansi yang terlibat dalam penanggulangan tersebut.

2.5 Model Perencanaan Komunikasi Cutlip dan Center

Model yang dibuat oleh Cutlip dan Center ini adalah model proses public relations yang terdapat langkah-langkah yaitu penemuan fakta (*fact finding*), kemudian perencanaan (*planning*), selanjutnya komunikasi (*communication*), dan terakhir evaluasi (*evaluation*). Penemuan fakta (*fact finding*) langkah ini harus dilakukan dengan riset untuk mengetahui bagaimana pendapat (opini) publik terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh organisasi, lembaga atau perusahaan. Langkah berikutnya yaitu mebuat perencanaan dan strategi yang kemudian mengkomunikasikan kepada publik internal dan eksternal. Publik internal adalah pemegang kunci kebijakan (dewan direktur atau komisaris), supervisor, dan para karyawan. Sedangkan publik eksternal adalah masyarakat umum. (Cangara, 2017: 72-73). Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Mendefinisikan masalah atau peluang (analisis situasi). Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan pemantauan pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Pada langkah ini

merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya. Pertanyaan pada tahap ini adalah “apa yang sedang terjadi saat ini?”.

b. Membuat rencana dan penyusunan program (strategi) mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama dalam kebijakan dan program organisasi. Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang publik program, tindakan, serta strategi, takti dan tujuan komunikasi. Untuk itu, penemuan dari langkah pertama harus dijadikan faktor kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua ini merupakan proses untuk menjawab pertanyaan: “bagaimana situasi yang telah kita pelajari maka apa yang harus kita ubah, perbuat dan katakan?”

c. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (penerapan) mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada tahap ini terdapat pembahasan komponen-komponen komunikasi. Pertanyaan yang harus diajukan pada tahap ini adalah: “siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, kapan, dimana dan bagaimana caranya?”.

d. Evaluasi program mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program. Program dapat dilanjutkan atau

dihentikan setelah menjawab pertanyaan: “bagaimana kita telah melakukannya?” Penyesuain dan perbaikan terhadap tindakan atau komunikasi yang telah dilaksanakan dapat dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima (Cutlip, Center, dan Broom, 2005 : 268).

Tingkat dan langkah evaluasi menurut Cutlip, Center & Broom terbagi atas *preparation evaluation* (evaluasi persiapan atau pendahuluan), *implementation evaluation* (evaluasi pelaksanaan atau penerapan), dan *impact evaluation* (Evaluasi dampak).

Dalam perencanaan, haruslah ada penetapan tujuan dibuat berdasarkan riset yang telah dilakukan baik yang bersifat formal maupun informal dngan mengadakan serangkaian diskusi atau konsultasi secara mendalam dengan berbagai pihak guna mengungkapkan kebutuhan komunikasi.

Gambar 2.1 Empat Langkah Perencanaan Komunikasi Cutlip dan Center

Sumber : Cangara, 2017

2.6 Model Komunikasi Risiko William Leiss

Komunikasi risiko adalah pertukaran informasi dan pandangan mengenai risiko dan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara pengkaji risiko, manajer risiko, konsumen dan berbabagai pihak lain yang berkepentingan. Komunikasi risiko juga diartikan sebagai proses membangun hubungan dengan khalayak, berbagi informasi tentang risiko, dan bekerja menuju konsensus untuk menemukan cara terbaik dalam menangani risiko.

Komunikasi risiko seperti bentuk-bentuk komunikasi lain, diwakili oleh model komunikasi tradisional. Artinya, ada sumber komunikasi yang menghasilkan pesan melewati saluran ke penerima. Komunikasi risiko tersebut menginsyaratkan transfer informasi secara sengaja, sehingga tujuan komunikasi risiko harus ditentukan. Tujuan pokok komunikasi risiko adalah memberikan informasi yang relevan dan akurat dalam istilah yang jelas dan mudah dipahami kepada audiens tertentu.

Beberapa tahun terakhir komunikasi risiko lingkungan mendapat perhatian karena berkaitan dengan peristiwa atau kecenderungan, baik alami atau buatan manusia yang berpotensi membahayakan kesehatan, ekosistem, aset fisik dan ekonomi dalam skala luas (Abkowitz, 2002). Banyak pemangku kepentingan komunikasi risiko, baik yang memberi atau menerima informasi risiko, dihadapkan dengan tantangan bagaimana cara terbaik mengkomunikasikan risiko lingkungan secara efektif dan efisien.

Riset Park dan Sohn (2013) menjelaskan bahwa untuk menciptakan komunikasi risiko yang efektif harus ada kolaborasi dan komunikasi terbuka

antara pemerintah, masyarakat, para ahli, dan industri terkait. Komunikasi risiko dalam pengurangan risiko bencana di pedesaan diposisikan sebagai dialog dan pertukaran pengetahuan untuk mempermudah pemahaman risiko dan pengambilan keputusan. Rekomendasinya perlu membangun kekuatan yang ada di masyarakat, dengan organisasi lokal, penggunaan media setempat, memberdayakan organisasi lokal dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Komunikasi risiko harus dapat menjelaskan konsep ketidakpastian sebuah risiko serta membangun kredibilitas sumber informasi (Renn 2008). Komunikasi harus terbuka, interaktif dan transparan. Karakteristik risiko yang diperoleh dari penilaian risiko, cara mengendalikan risiko, dan kebijakan yang akan diimplementasikan, harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait, sehingga semua pihak memperoleh informasi yang cukup mengenai bahaya, cara pencegahan serta tindakan yang harus dilakukan.

Komunikasi dengan berbagai pihak baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia industri, dan masyarakat sangat penting sehingga tidak ada prasangka bahwa masyarakat akan selalu dirugikan atau diberi beban oleh peraturan atau kebijakan. Komunikasi risiko harus bersifat mendidik dan melindungi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran pentingnya penanggulangan bencana alam dan kemungkinan bahaya yang akan terjadi akibat bencana banjir. Tujuan utama komunikasi risiko adalah memberi pengertian kepada masyarakat dan hal ini merupakan titik awal rantai penanggulangan bencana banjir. Komunikasi yang efektif menentukan

seberapa besar informasi yang diterima oleh masyarakat dan dapat meredakan konflik atau perbedaan pendapat di antara pihak yang terlibat dengan baik.

Komunikasi risiko pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian proses meminimalkan risiko, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu analisis risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko itu sendiri. Analisis risiko merupakan suatu proses penentuan faktor-faktor dan tingkat risiko berdasarkan data - data ilmiah. Sedangkan, manajemen risiko adalah proses penyusunan dan penerapan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk melindungi masyarakat dari risiko, dalam hal ini risiko terhadap kesehatan. Kemudian, komunikasi risiko dijelaskan sebagai pertukaran informasi dan opini secara timbal balik dalam pelaksanaan manajemen risiko.

Komunikasi risiko merupakan komunikasi dua arah, interaktif dan proses jangka panjang, secara bersama masyarakat dan komunikator melalui dialog. Untuk itu komunikator harus mengembangkan kemampuan mendengar (*listening skills*), ia harus mampu memahami minat masyarakat dan merespon opini, emosi dan reaksi mereka. Komunikator risiko harus ikut serta dalam kegiatan mengarahkan, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi Mereka harus berperan menjembatani para ahli dan masyarakat. Komunikator ini berperan juga untuk memperkuat (bukan penghambat) antara manajemen dan masyarakat. Komunkasi risiko merupakan bagian integral dan berlanjut dalam praktek analisis risiko dan idealnya semua *stakeholders* harus terlibat sejak awal sehingga mereka memahami setiap tahap dari risk assessment. Ini

akan membantu memastikan, bahwa kondisi logis, signifikansi dan keterbatasan *risk assessment* secara jelas diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk juga informasi yang berasal dari *stakeholders* yang bersifat krusial.

Tujuan komunikasi risiko salah satunya untuk memberikan informasi yang bermakna, relevan dan akurat dalam istilah yang jelas dan mudah dipahami kepada *audiens* tertentu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai persoalan spesifik yang harus dipertimbangkan oleh semua peserta selama proses analisis risiko. Selain itu juga dalam rangk meningkatkan konsistensi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan manajemen risiko dan implementasinya, memberikan landasan yang aman untuk memahami keputusan manajemen risiko yang diusulkan atau diimplementasikan, meningkatkan keseluruhan keefektifan dan efisiensi proses analisis risiko. Terakhir, turut memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyampaian program informasi dan pendidikan yang efektif jika kedua hal tersebut terpilih sebagai pilihan manajemen risiko.

Komunikasi risiko termasuk salah satu cara untuk melindungi dan mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat. Komunikasi risiko merupakan kebutuhan bersama para pembuat kebijakan. Komunikasi terkait informasi risiko ini menjadi elemen penting dalam tata kelola risiko yang menyangkut berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya komunikasi risiko akan terjadi pertukaran penilaian, perkiraan, dan pendapat tentang bahaya dan risiko di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat (Renn, 2008).

Besarnya risiko akibat bencana banjir mendorong perlunya tata kelola risiko yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Tata kelola risiko tersebut memperlihatkan peran para aktor, aturan, konvensi, proses dan mekanisme dengan pengumpulan, analisis dan menyampaian informasi risiko, serta bagaimana keputusan diambil. Dengan demikian tata kelola risiko memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda (Renn, 2008). Komunikasi risiko tidak hanya berkaitan dengan isi pesan risiko, tetapi juga produksi dan penerimaan pesan risiko, disebarkan melalui program *public relations* dan kampanye masyarakat.

Konsep penting dalam komunikasi risiko yaitu membuat pesan risiko menjadi lebih sederhana, terstruktur dan dapat dikelola. Proses dalam merekonseptualisasi pesan risiko merupakan hasil adaptasi dari teori transimisi pesan sebagai model pendekatan komunikasi persuasif. Pertukaran informasi dan kebijakan terkait risiko harus dimaksudkan untuk dapat menterjemahkan hal tersebut dengan bahasa yang teknis. Kaitannya dengan hal ini, peran aktor komunikasi risiko sangat dibutuhkan Leiss dalam Crowley dan Mitchell, 1994). Berikut adalah gambaran aliran proses komunikasi risiko di antara para aktor komunikasi risiko.

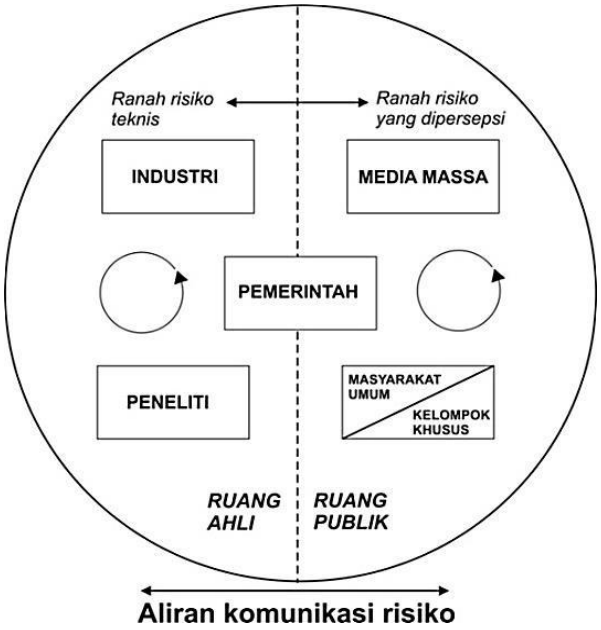

Gambar 2.2 Model proses komunikasi risiko (Leiss, 1994)

Sumber: *Communication theory today, 1994*

Komunikasi risiko mencakup sebagian besar bentuk komunikasi dan aliran informasi dalam proses penilaian risiko dan manajemen risiko di antara para ahli, pihak berwenang, kelompok kepentingan khusus, dan masyarakat umum. Di dalam komunikasi risiko semua aktor komunikasi terlibat dalam proses penilaian risiko. Aktor-aktor komunikasi yang terlibat dalam komuniksi risiko antara lain lembaga pemerintah, industri, lembaga penelitian, organisasi profesi, media, dan komunitas (Leiss dalam Crowley dan Mitchell, 1994). Keterkaitan komunikasi antar aktor dari berbagai pemangku kepentingan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Pemerintah dan non pemerintah yang termasuk dalam aktor komunikasi, memiliki peran masing-masing dalam komunikasi risiko baik dalam mitigasi bencana, saat bencana maupun saat pemulihan. Beberapa elemen yang terlibat dapat diidentifikasikan sebagai Pemerintah, Industri, Masyarakat umum dan

Kelompok khusus, dan Media massa. Di sini kualitas komunikasi berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan sehingga masing-masing pemangku kepentingan harus berusaha memahami, membandingkan, dan mengintegrasikan informasi dari pemangku kepentingan lainnya untuk membantu pekerjaannya.

Aktor komunikasi risiko sangat penting peranannya pada saat proses analisis kebutuhan dan proses managemen risiko untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan serta menghindari terjadinya konflik. Bergantung dari level keterlibatannya, peran aktor komunikasi risiko dalam proses analisis dan managemen risiko adalah menyediakan data dan fakta dari lapangan untuk membantu analisis, menyediakan informasi yang didasarkan pada pengalaman terdahulu, mentaksir nilai kerugian akibat risiko dan efek sampingnya, serta partisipasi dalam menformulakan keluaran yang akan disampaikan pada khalayak (Renn, 2008).

Namun, dalam komunikasi risiko banyak dijumpai permasalahan. Permasalahan terjadi pada semua unsur komunikasi risiko dimulai dari sumber, pesan, saluran dan penerima pesan. Masalah pada sumber terjadi pada saat ketidaksepakatan di antara para ahli (dalam menyusun pesan/informasi), tidak adanya pemahaman dan informasi yang tidak fokus, keakuratan informasi, kenetralan, kredibilitas para ahli, ketepatan, kejujuran serta kelengkapan pesan yang disampaikan. Masalah pada pesan yaitu ada tidaknya data ilmiah yang mendukung dalam pengambilan sebuah keputusan/penyusunan pesan, banyaknya kemungkinan risiko yang terjadi

serta tingkat kompleksitas risiko itu sendiri (Leiss dalam Crowley dan Mitchell, 1994). Hal yang harus dipahami bahwa dalam masa krisis masyarakat cenderung sulit untuk mendengarkan, memahami dan mengingat informasi atau pesan yang disampaikan. Tugas komunikator mengatasi hambatan tersebut, membuat pesan yang akurat dan dapat disampaikan pada masyarakat yang sedang mengalami stress tinggi akibat krisis serta melakukan komunikasi yang efektif dan efisien.

Masalah pada saluran sering terjadi akibat ketidakmampuan media massa dalam mengungkapkan kejadian secara objektif. Informasi yang bias, sensasional serta melebih-lebihkan suatu kejadian merupakan fenomena yang sering terjadi pada pemberitaan di media massa. Terakhir adalah permasalahan pada penerima, hal ini dikarenakan perbedaan persepsi setiap individu yang menerima pesan tersebut (Leiss dalam Crowley dan Mitchell, 1994).

Kriteria dalam menciptakan komunikasi risiko yang efektif adalah keterbukaan dalam melihat dan memandang perbedaan pemikiran para ahli dibandingkan hanya melihat opini masyarakat serta tindakan untuk mencari sumber komunikasi. Kunci utama komunikasi risiko adalah keterbukaan, empati, berbagi kekuasaan, tidak ragu untuk berkata jujur, selalu berusaha memberikan yang terbaik, tetap peduli dengan orang yang tidak memperdulikan kita. Hal serupa juga dikemukakan (Reynolds & Sandra, 2008) bahwa selama masa krisis, komunikasi yang terbuka dan penuh empati paling efektif untuk menumbuhkan kepercayaan publik ketika pemerintah

melakukan usaha- usaha yang positif untuk mencegah keadaan yang dapat membahayakan masyarakat. Kepercayaan dan kredibilitas yang diikuti dengan empati dan kepedulian, kompetensi dan keahlian, kejujuran dan keterbukaan serta dedikasi dan komitmen merupakan unsur utama dalam rangka menciptakan komunikasi persuasif.

Terdapat beberapa prinsip komunikasi risiko. Pertama, merumuskan pesan komunikasi risiko. Khalayak harus dianalisis untuk mengetahui motivasi dan pandangan mereka. Selain untuk mengetahui siapa yang menjadi khalayak, perlu mengenalinya sebagai kelompok dan secara ideal sebagai perorangan untuk memahami kekhawatirannya serta kondisi mereka dan untuk mempertahankan tetap terbukanya saluran komunikasi. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan merupakan bagian penting dalam komunikasi risiko.

Selanjutnya melibatkan pakar ilmiah. Pakar ilmiah dalam kapasitasnya sebagai pengkaji risiko harus mampu menjelaskan konsep dan proses pengkajian risiko. Mereka harus dapat menerangkan hasil-hasil pengkajian serta data-data ilmiahnya, asumsi dan pertimbangan objektif yang menjadi dasar penjelasan itu sehingga manajer risiko serta pihak berkepentingan lainnya dapat memahami dengan jelas risiko tersebut. Sebaliknya, manajer risiko harus mampu menjelaskan bagaimana cara keputusan manajemen risiko itu diambil.

Menciptakan keahlian dalam berkomunikasi. Komunikasi risiko memerlukan keahlian dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami

pada semua pihak yang berkepentingan. Kemungkinan besar para manajer risiko dan pakar teknis tidak mempunyai waktu atau ketrampilan untuk melaksanakan komunikasi risiko yang kompleks seperti memberikan respons terhadap kebutuhan berbagai khalayak (masyarakat, industri, media dan lain-lain) dan menyiapkan pesan-pesan yang efektif. Oleh karena itu, orang yang ahli dalam melakukan komunikasi risiko (komunikator) harus dilibatkan sedini mungkin. Keahlian ini harus dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman.

Menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya merupakan prinsip yang tidak kalah penting. Informasi dari sumber yang dipercaya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu risiko dibandingkan dengan sumber yang kurang dapat dipercaya. Persepsi kredibilitas oleh khalayak sasaran dapat bervariasi sesuai karakteristik bahaya, budaya, status sosial dan ekonomi mereka, serta faktor-faktor lainnya. Kredibilitas akansemakit kuat apabila pesan yang diterima masyarakat dari berbagai sumber konsisten. Faktor-faktor yang menentukan kredibilitas sumber informasi meliputi kompetensi atau keahlian, kelayakan untuk dipercaya, dan kejujuran Kepercayaan dan kredibilitas harus terus dijaga karena kedua hal ini berpotensi terkikis atau hilang melalui metode komunikasi yang tidak efektif atau tidak tepat. Dalam sejumlah penelitian, tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa ketidakpercayaan dan kredibilitas yang rendah terjadi akibat informasi yang berlebihan, menyimpang, dan terkesan untuk kepentingan pribadi. Komunikasi yang efektif harus dapat

mengenali persoalan dan isu yang mutakhir, bersifat terbuka terutama kaitannya dalam isi, pendekatan dan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi tersebut. Ketepatan waktu dalam penyampaian suatu informasi merupakan hal yang paling penting karena banyak kontroversi lebih terfokus pada pertanyaan memberitahukannya lebih awal. Informasi yang lupa disampaikan, informasi yang menyimpang, dan informasi demi kepentingan sendiri berpotensi merusak kredibilitas jangka panjang.

Tanggung jawab bersama juga merupkaan prinsip komunikasi risiko. Pemerintah memiliki tanggung jawab pokok dalam pelaksanaan komunikasi risiko dan bertugas mengatur di tingkat nasional, regional maupun lokal. Masyarakat berharap pemerintah dapat memainkan peran utama dalam pelaksanaan manajemen berbagai risiko bencana. Untuk memahami kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam manajemen risiko diimplementasi dengan tepat, pemerintah mengetahui pandangan masyarakat mengenai berbagai pilihan yang dipertimbangkan untuk mengelola risiko tersebut.

Berikutnya, membedakan antara "*science judgement* dan "*value judgement”*. Fakta dan nilai-nilai dalam mempertimbangkan pilihan manajemen risiko harus dapat dipisahkan. Pada tingkat praktis sangat bermanfaat bila fakta yang diketahui pada saat itu dilaporkan, di samping melaporkan ketidakpastian yang ada dalam setiap keputusan menyangkut manajemen risiko. *Value judgement* diartikan sebagai konsep tingkat risiko yang dapat diterima. Konsekuensinya, komunikator risiko harus mampu

menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima pada masyarakat. Misalnya banyak orang mengartikan istilah "makanan yang aman" sebagai makanan dengan risiko nol padahal kenyataannya belum tentu tidak berisiko. Membuat sesuatu hal menjadi lebih jelas merupakan fungsi komunikasi risiko yang penting

Tidak kalah penting, menjamin keterbukaan. Proses analisis risiko dan hasil akhirnya, akan diterima oleh masyarakat jika prosesnya transparan. Meskipun masalah legitimasi untuk menjaga kerahasiaan (misalnya informasi atau data yang merupakan milik pribadi) perlu dihormati, transparansi dalam analisis risiko harus terbuka dan dapat diteliti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi dua-arah yang efektif antara manajer risiko, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan bagian yang esensial dalam manajemen risiko serta merupakan kunci untuk mencapai keterbukaan

Terakhir, menjadikan risiko ke dalam perspektif. Salah satu cara untuk menjadikan risiko ke dalam perspektif dengan mengkajinya dalam konteks manfaat, yang berkaitan dengan teknologi atau proses yang menimbulkan risiko tersebut. Metode lainnya dengan membandingkan risiko yang dipersoalkan dengan risiko lain yang serupa tetapi lebih dikenal. Kendati demikian, metode terakhir tersebut dapat menimbulkan permasalahan jika terlihat pembandingan risiko itu sengaja dipilih untuk membuat risiko yang dipersoalkan menjadi lebih dapat diterima oleh masyarakat. Secara umum, pembandingan risiko hanya dapat digunakan jika kedua (atau semua) estimasi

risiko sama-sama aman; kedua (atau semua) estimasi risiko relevan dengan khalayak yang spesifik; derajat ketidakpastian pada seluruh estimasi risiko serupa; kekhawatiran khalayak diakui dan diperhatikan; substansi, produk atau aktivitasnya dapat dibandingkan secara langsung, termasuk konsep pajanan yang sengaja dan tidak sengaja (Leiss, 1994).

Douglas dalam Lupton (1999) menyatakan bahwa budaya mempengaruhi individu serta komunitas untuk mengkalkulasi sebuah risiko dan tanggapan terhadap risiko tersebut. Komunitas dalam masyarakat akan membentuk penilaian tertentu terhadap risiko sesuai dengan persepsi mereka Selain budaya, menurut Douglas persepsi risiko dipengaruhi juga oleh kontruksi sosial yang terbentuk di masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis komunikasi risiko penanggulangan bencana banjir pada level pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten dengan subyek penelitian para pemangku kepentingan dengan aktor komunikasi dari pemerintah, industri, peneliti, media massa, dan masyarakat umum.

2.7 Analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi)

Teknik yang biasa digunakan dan sangat berguna untuk menganalisa lingkungan eksternal adalah analisis PEST. PEST membagi lingkungan dalamempat area dan membahas hampir segala hal yang dapat mempengaruhi organisasi dan program. Empat area tersebut adalah Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi (Gregory, 2004).

Dasar analisis PEST mencakup empat faktor. Faktor pertama politik, faktor-faktor yang pada dasarnya adalah bagaimana campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Secara khusus, faktor politik termasuk kebijakan pajak, hukum perburuhan, hukum lingkungan, pembatasan perdagangan, dan stabilitas politik. faktor-faktor politik juga dapat mencakup barang-barang dan jasa yang akan diberikan atau yang telah diberi oleh pemerintah.

Selanjutnya, faktor ekonomi. Faktor yang termasuk dalam aspek ini seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat inflasi, tingkat ekonomi masyarakat. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana keberlangsungan program. Faktor selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor yang termasuk aspek budaya dan kesadaran kesehatan, laju pertumbuhan penduduk, distribusi usia, karier dan penekanan pasa keselamatan. Kecenderungan yang tinggi dalam faktor-faktor sosial mempengaruhi permintaan produk perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Terakhir, faktor teknologi. Faktor-faktor yang termasuk aspek teknologi seperti penelitian dan pengembangan, teknologi yang digunakan.

2.8 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2009:60) mendefinisikan kerangka berpikir sebagai sintesa tentang hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variable yang diteliti.

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi pengurangan risiko banjir di Kabupaten Serang. BPBD sebagai badan yang diamanatkan undang-undang menjalankan kegiatan penanggulangan bencana alam tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir. Salah satu bagian terpenting dari kegiatan penanggulangan bencana banjir adalah kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir.

BPBD Kabupaten Serang berperan mengkoordinir setiap instansi atau kelompok yang terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko banjir di Kabupaten Serang. Seperti gambar segitiga berwarna biru yang terdapat dalam logonya, BPBD berperan mengkoordinir ketiga bagian tersebut yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam menanggulangi bencana secara bersama-sama.

Berdasarkan model perencanaan komunikasi yang dikemukakan oleh Cutlip dan Center, proses komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan dalam empat tahap yaitu penemuan fakta, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam proses komunikasi, terdapat pesan, media komunikator dan juga komunikan yang terlibat didalamnya. Peneliti bermaksud melihat komponen-komponen komunikasi yang terdapat dalam setiap tahapan proses komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Selain itu, dalam komunikasi risiko yang efektif melibatkan lima unsur dalam pelaksanaannya. Kelima unsur tersebut diantaranya, Pemerintah, Industri, Media massa, Akademisi, dan Masyarakat. Proses penyelenggaraan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang memerlukan kelima elemen tersebut supaya terselenggaranya komunikasi yang efektif. BPBD memiliki peran menyampaikan pesan komunikasi kepada kelima elemen tersebut serta mengkoordinir semua dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko.

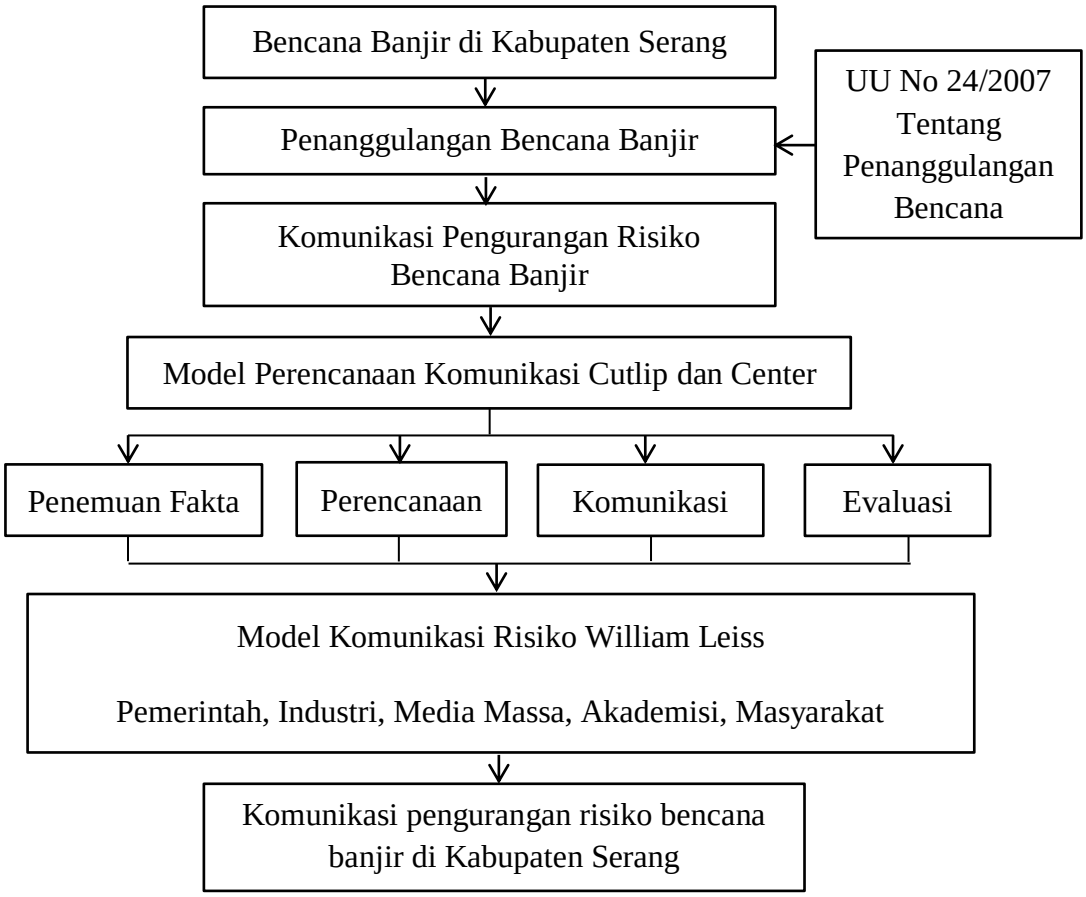

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam menambah pengetahuan mengenai fokus penelitian serta teori yang dipakai dalam penelitian sebelumnya. Dari penelitian terdahulu, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang memiliki fokus penelitian yang sama dengan penelitian ini. Peneliti membandingkan hasil penelitian satu dengan yang lainnya sebagai perbandingan dan bahan referensi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erwind Saputra (2018), mahasiswa Program studi ilmu komunikasi Universitas Riau, dengan judul "Manajemen komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar". Penelitian ini membahas mengenai manajemen komunikasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjr di Kabupaten Kampar.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari peelitian ini adalah perencanaan komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, disusun di dalam Renja dan Renstra BPBD Kabupaten Kampar. Pengorganisasian komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, disusun secara formal. Yang dibagi menjadi tiga bidang yakni bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK), bidang Kedaruratan dan Logistik (KL), dan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (RR). Pelaksanaan komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, dilaksanakan oleh bidang khusus yang disebut dengan Pusdalops-pb yang di dalamnya memiliki unit khusus yakni TRC (Team Reaksi Cepat). Setiap informasi kebencanaan yang diterima oleh

BPBD Kabupaten Kampar akan diserahkan kepada bidang pusdalops-pb yang nantinya akan dikaji cepat dan dibuat pelaporannya Evaluasi komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, dilakukan setiap harinya jika terjadi bencana, jika tidak terjadinya bencana BPBD Kabupaten Kampar melakukan kegiatan evaluasi pada rapat bulanan, rapat tahunan, dan rapat dadakan yaitu rapat yang dilakukan pada saat terjadi bencana.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kegiatan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga sama dengan metode penelitian yang akan peneliti teliti yaitu penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti ambil adalah penelitian yang peneliti ambil terfokus pada komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, juga terdapat pada perbedaan teori yang digunakan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Puji Lestari (2015), dari Universitas Penbangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dengan judul “manajemen komunikasi bencana Gunung Sinabung 2010 saat tanggap darurat”. Fokus penelitian Lestari adalah bencana gunung sinabung pada tahapan saat tanggap darurat.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut adalah mengenai pembahasan mengenai tahapan dari persiapan hingga evaluasi dalam penanggulangan bencana alam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu topik penelitian Lestari

mengenai saat tanggap darurat bencana gunung sinabung, sedangkan penelitian yang akan peneliti ambil berfokus pada tindakan preventif mengenai pengurangan risiko bencana banjir.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Item	**Erwind Saputra 2018**	**Puji Lestari 2015**
Judul Penelitian	Manajemen komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar	Manajemen komunikasi bencana Gunung Sinabung 2010 saat tanggap darurat.
Metodologi Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif, interpretatif, evaluative
Teori yang digunakan	Model Manajemen POAC	Model Manajemen POAC
Hasil Penelitian	Perencanaan komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, disusun di dalam Renja dan Renstra BPBD Kabupaten Kampar. Pengorganisasian komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, disusun secara formal. Yang dibagi menjadi tiga bidang yakni bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK), bidang Kedaruratan dan Logistik (KL), dan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (RR) Pelaksanaan komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, dilaksanakan oleh bidang khusus yang disebut dengan Pusdalops-pb. Evaluasi komunikasi BPBD	Manajemen komunikasi penanggulangan bencana harus melibatkan semua pihak dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga harus menyadarkan dan mendidik warga akan bahaya bencana melalui komunikasi dan sosialisasi mitigasi bencana. Pemerintah juga bekerjasama dengan warga dalam menentukan kebutuhan yang diperlukan warga dengan melihat kapasitas warga.

	terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, dilakukan setiap harinya jika terjadi bencana, juga melalui rapat bulanan, rapat tahunan, dan rapat dadakan yaitu rapat yang dilakukan pada saat terjadi bencana.	
Persamaan Penelitian	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai jenis subjek penelitian, juga metode yang digunakan. Serta membahas mengenai kegiatan penanggulangan bencana banjir.	Pesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai pembahasan mengenai tahapan dari persiapan hingga evaluasi dalam penanggulangan bencana.
Perbedaan Penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah perbedaan teori yang digunakan, juga perbedaan pada fokus penelitian yang diambil. Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kegiatan pengurangan risiko bancana banjir dalam penanggulangan bencana banjir.	Perbedaan yang melekat pada penelitian ini adalah peredaan teori yang digunakan, perbedaann objek bencana yang diteliti.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini yaitu post positivistik karena dalam penelitian komunikasi ini peneliti ingin memahami mengenai komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Menurut Winner & Dominck (2000:102) menyebut pendekatan dengan paradigma, yaitu seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia. Dengan kata lain, paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan asumsi ontologi, epistemologi, dan metodologi (Kriyantono, 2012: 69). Paradigma penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam memandang realitas yang diteliti. Leksono (2015: 26) mendefinisikan bahwa paradigma adalah satu set asumsi, konsep, nilai-nilai dan praktek dan cara pandang realitas dalam disiplin ilmu. Paradigma merupakan cara pandang atau pola pikir komunitas ilmu pengetahuan atas peristiwa atau realitas atau ilmu pengetahuan yang dikaji, diteliti, dipelajari, dipahami dan untuk dicarikan pemecahan persoalannya.

Ada beberapa alasan, mengapa peneliti perlu memilih paradigma sebelum melakukan penelitian, yaitu:

1. Paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian.
2. Paradigma penelitian menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penjelasan yang digunakan.
3. Pemilihan paradigma memiliki implikasi terhadap pemilihan metode, teknik penentuan subyek penelitian/sampling, teknik pengumpulan data, teknik uji keabsahan data dan analisis data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma positivistic atau sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tertentu (Sugiyono, 2012).

Paradigma post positivistik berbicara bukan hanya yang terlihat, terasa dan teraba saja tetapi mencoba memahami makna dibalik yang ada. Realitas sosial menurut paradigm ini adalah suatu gejala yang utuh yang terikat dengan konteks, bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna. Oleh karena itu, mengetahui keberadaannya tidak dalam bentuk ukuran akan tetapi dalam bentuk eksplorasi untuk dapat mendeskripsikannya secara utuh.

Untuk itu, peneliti menggunakan paradigmma ini karena peneliti ingin mendapat pengembangan, pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa serta mengetahui bagaimana komunikasi pengurangan risiko

bencana banjir di Kabupaten Serang. Dengan paradigma post positivistik, peneliti juga mendapatkan informasi secara lebih mendalam sehingga peneliti dapat mendeskripsikan obyek yang diteliti dengan jelas.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moelong, 2004: 6). Menurut paparan Bungin (2005) format penelitian deskriptif kualitatif memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena, sifatnya mendalam dan menusuk sasaran penelitian. Dalam hal ini fenomena unik yang menjadi kajian utama peneliti adalah komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.

Penelitian kualitatif ini juga dimaknai dengan serangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola pikir induktif ini adalah cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang lengkap dari permasalahan yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. Dengan pendekatan ini penulis dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian makna di balik fenomena yang muncul dalam penelitian. Dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hanya memaparkan sebuah fenomena dan tidak mencari atau menjelaskan

hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode penelitian ini muncul karena adanya situasi yang memandang suatu realitas/fenomena, metode penelitian ini sering disebut metode naturalistic karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga bersifat evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data aktual secara rinci, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual, kerangka teori, ukuran keberhasilan penelitian, dan rekomendasi.

Rakhmat (2005) menyebutkan bahwa penelitian evaliatif ditujukan untuk beberapa hal. Pertama, mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. Berikutnya mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi praktek-praktek yang berlaku. Selanjutnya membuat perbandingan atau evaluasi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang berdasarkan beberapa bencana banjir yang telah terjadi.

3.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode studi kasus. Metode ini menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmuah yang

dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih disebut kasus.

Penelitian ini fokus pada kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang. Kegiatan yang menjadi fokus penelitian adalah kegiatan yang termuat dalam program kerja pengurangan risiko bencana banjir BPBD Kabupaten Serang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012 : 224).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui, pertama wawancara yang bersifat mendalam (*indepth interview*), yaitu Wawancara dilakukan secara personal baik secara *face to face* maupun menggunakan media lainnya seperti telepon genggam antara pewawancara dan informan yang diwawancara. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan secara tidak terstruktur di mana daftar pedoman dan pertanyaan yang sudah disusun bukan syarat utama karena wawancara akan berkembang dengan sendirinya tergantung pada informan. Dalam wawancara mendalam, peneliti ingin mengembangkan kedekatan dengan informan untuk menggali

gambaran yang aktual mengenai penerimaan pesan informan. Wawancara mendalam digunakan peneliti sebagai sumber acuan mengumpulkan data primer.

Kedua observasi, alasan peneliti melakukan observasi adalah ingin menyajikan gambaran realistik penelitian di lapangan. Dimana peneliti mendatangi informan dan melakukan pengamatan saat kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan ataupun pengamatan saat melakukan wawancara mendalam.

Kegita studi dokumen, di mana sumber pustaka dalam penelitian ini berupa buku, artikel, karya ilmiah, skripsi, serta penelusuran internet yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Juga Buku Draft Masterplan BPBD Kabupaten Serang. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan sebagainya yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Selain itu peneliti mengambil teknik pengambilan dokumentasi dalam berbagai catatan lapangan, dokumentasi visual penanggulangan bencana yang dilakukan, dokumentasi foto di lapangan (untuk menguatkan wawancara mendalam dan observasi), serta data tambahan lainnya.

3.6. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, tetapi oleh Spadley dinamakan *"Social Situation"* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui "apa yang terjadi" didalamnya (Sugiyono, 2012).

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa elemen yang terlinat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, sebagai Badan Penyelenggara penanggulangan bencana, menjadi narasumber utama yang akan memberikan informasi mengenai informan lainnya yang juga terlibat dalam penelitian ini. Elemen yang akan menjadi subjek penelitian diantaranya elemen pemerintahan yang direpresentasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Selanjutnya elemen non-pemerintah yang direpresentasikan oleh Masyarakat, dan Relawan sebagai bagian dari komunikan.

Metode pengumpulan data yang efektif dalam penelitian ini adalah menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling.* Teknik pemilihan dengan *purposive sampling* dipilih sebab tidak semua elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi informan karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Dengan kata lain memungkinkan peneliti untuk mejelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009 : 219).

Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling* yakni dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono (2009: 53-54) pengambilan informan ini memilki karakteristik khusus misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Peneliti memiliki kriteria dalam memilih informan dalam penelitian ini, dimana kriteria informan adalah pertama memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik mengenai komunikasi penanggulangan bencana alam di Kabupaten Serang. Kedua, pernah terlibat dalam komunikasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang. Dalam penelitian ini jumlah audiens tidak menjadi hal pokok. Nasution (1988) menjelaskan bahwa penentuan informan dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf *redundancy*, yakni data telah jenuh dimana jika ditambah informan baru tidak akan memberikan informasi yang baru pula (Sugiyono, 2009 : 220).

3.7. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Sehingga memudahkan peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih jelas, melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, ketika melakukan wawancara peneliti melakukan reduksi data agar menajamkan analisis mengenai hasil penerimaan tentang

komunikasi penanggulangan bencana banjir sehingga nantinya hasil yang didapatkan lebih spesifik. Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*,dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data berupa transkip wawancara disertai penjelasan dari peneliti. Selain itu, peneliti juga akan menyajikan hasil interpretasi peneliti atas hasil wawancara mendalam. Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini kesimpulan akan berisi tentang penelitian secara menyeluruh mengenai bagaimana komunikasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang serta dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2012 : 247, 249, 252).

3.8. Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2012), menjelaskan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dalam penelitian ini, *credibility* merupakan kegiatan untuk menggali kepercayaan terhadap data penelitian yang sudah didapatkan.

Adapun cara yang akan dilakukan peneliti, pertama melakukan perpanjangan pengamatan dengan melakukan kembali wawancara dengan informan dengan tujuan mengecek dan memperoleh data yang lebih luas, mendalam, dan pasti kebenarannya. Kedua, meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai sumber, seperti buku dan hasil penelitian terkait temuan yang sedang diteliti dalam penelitian ini mengenai komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang. Dengan membaca kembali berbagai sumber ilmiah ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga peneliti dapat memeriksa data yang ditemukan itu benar atau bisa dipercaya. Ketiga, menggunakan bahan referensi yang mendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti, berupa rekaman audio dan foto-foto dokumentasi saat berinteraksi dengan narasumber. Keempat, melakukan membercheck kepada pemberi data atau informan apakah hasil data yang sudah disimpulkan oleh peneliti merupakan data yang benar berasal dari para informan.

Setelah itu peneliti akan melakukan pengujian *transferability*, dalam memenuhi standar *transferability* di sini peneliti membuat laporan hasil transkip wawancara serta penarikan kesimpulan secara jelas, terperinci, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca dapat memutuskan apakah penelitian mengenai komunikasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang ini dapat diaplikasikan di tempat lain. Kemudian, uji *dependability* untuk mengecek kesuluruhan proses penelitian dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses yang telah dilakukan peneliti. Dalam hal ini

dilakukan oleh pembimbing penelitan karena merupakan auditor yang independen. Dan langkah yang terakhir adalah pengujian confirmability, yaitu di mana seluruh proses penelitian dan hasil telah disepakati banyak orang (Sugiyono, 2012 : 270-277)

3.9. Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1.	Pengajuan Judul									
2.	ACC Judul									
3.	BAB I									
4.	BAB II									
5.	BAB III									
6.	Sidang Outline									
7.	Bab IV									
8.	BAB V									
9.	Sidang Skripsi									

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, terletak diujung barat bagian utara pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak ± (kurang lebih) 70 km dari kota Jakarta, ibu kota Negara Indonesia (Dokumen BPBD Kabupaten Serang, 2015).

Luas wilayah Kabupaten Serang secara administratif tercatat 1.417,50 Km^2 yang terbagi atas 29 wilayah Kecamatan dan 326 Desa. Kabupeten Serang terdiri dari daratan, perbukitan, pegunungan, dan perairan. Bagian utara merupakan dataran yang tersebar luas sampai ke pantai dan dibagian selatan sampai ke barat Kabupaten Serang merupakan perbukitan dan pegunungan, antara lain sekitar Gunung Karang, Gunung Kencana, dan Gunung Gede. Selain itu terdapat pula sungai-sungai yang besar yang melintasi wilayah Kabupaten Serang, yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Ciberang, Cibanten, Cipasuruan, Cipanas dan Sungai Anyar (Dokumen BPBD Kabupaten Serang, 2015).

BPBD Kabupaten Serang telah memetakan beberapa daerah yang dinilai berpotensi rawan banjir. Tercatat pada tahun 2017, terdapat 103 desa dari 19 kecamatan di Kabupaten Serang yang merupakan daerah rawan banjir

(Dokumen BPBD Kabupaten Serang). Beberapa daerah tersebut digambarkan dalam peta rawan bencana banjir tahun 2017.

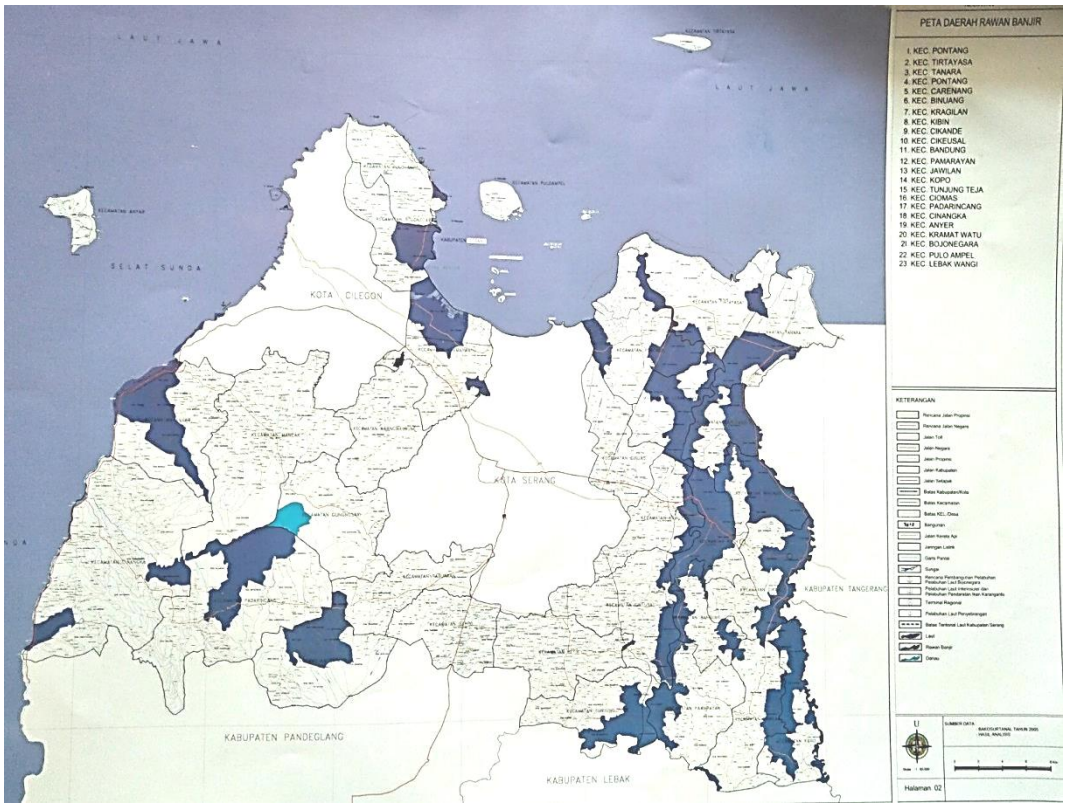

Gambar 4.1 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Serang

Sumber : Buku Masterplan peta rawan bencana banjir Kabupaten Serang 2017

4.2. Profil BPBD Kabupaten Serang

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, terkhusus pada bencana banjir. Kegiatan tersebut termuat dalam program kerja pengurangan risiko bencana banjir. Permasalahan banyaknya korban jiwa dan harta benda akibat bencana banjir yang terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Serang, menunjukkan

adanya permasalahan dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir. Hal tersebut membuat aparat pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang sebagai Badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir perlu diteliti. Bagaimana kegiatan komunikasi, strategi yang digunakan dalam mengkoordinir semua elemen yang terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.

Terdapat beberapa program kerja BPBD Kabupaten Serang, namun pada penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada program kerja bagian pencegahan dan kesiapsiagaan yang berkenaan dengan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Peneliti langsung mendatangi informan penelitian, juga mengikuti salah satu kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi aspek-aspek keterlibatan aktor komunikasi yang terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, aliran komunikasi yang terjadi, dan strategi yang digunakan dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan semakin baik karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 memiliki tugas sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Serang yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana.

Visi dan Misi

Visi BPBD Kabupaten Serang 2015-2018 yaitu "menjadikan masyarakat Kabupaten Serang yang sadar dan tahan terhadap berbagai bencana." Sedangkan misi BPBD Kabupaten Serang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Serang terhadap bencana melalui sosialisasi pendidikan dan pelatihan dengan mengutamakan pengurangan risiko bencana.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara professional dan terkoordinasi, cepat dan tepat.
4. Membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

Struktur Organisasi

Berikut ini susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang:

Kepala Badan : Agus Erwana, M.Si

Kepala Pelaksana : Nana Sukmana Kusuma, SE, MM

Sekertaris : H. M. Furqon Syafiudin, SH, M.Si

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Muhanah, SE, M.Si

Sub Bagian Keuangan : Dian Fitriany, S.Sos, M.Si

Sub Bagian Program dan Evaluasi : Endah Wahyuni, SE, M.Si

Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan : Drs. Endang Saputra D., M.Si

Subbid Pengurangan Risiko Bencana : Drs. Wawan Darmawan, M.Si

Subbid Kesiapsiagaan : Setianingsih, S.Sos

Bidang Penanganan Darurat : Eman Supriyadi, SH., M.Si

Subbid Tanggap Darurat : Nivan Zulviana, SH, M.Si

Subbid Logistik dan Sarana Prasarana : Iwan Rahmat, SE

Subbid Perbaikan dan Bantuan Darurat : Wawan, SE

Bidang Rehabilitasi dan Rekontrruksi : Drs. H. Agus Rusli, M.Pd

Subbid Penilaian Kerusakan : Siti Komariah, SH, M.Si

Subbid Penanganan Pengungsi : Ma’mun

Subbid Pemulihan dan Peningkatan FSE : Farid Afandi, SH, M.Si

Bidang Pemadam Kebakaran : H. TB Maftuhi, S.Sos. M.Si

Subbid Penanggulangan Bencana Kebakaran : M. Machfud, S.Ip

Subbid Pencegahan dan Proteksi Kebakaran : Drs. H. Karta, M.Si

Subbid Penyelamatan Kebakaran : Adi Prijanto, BA

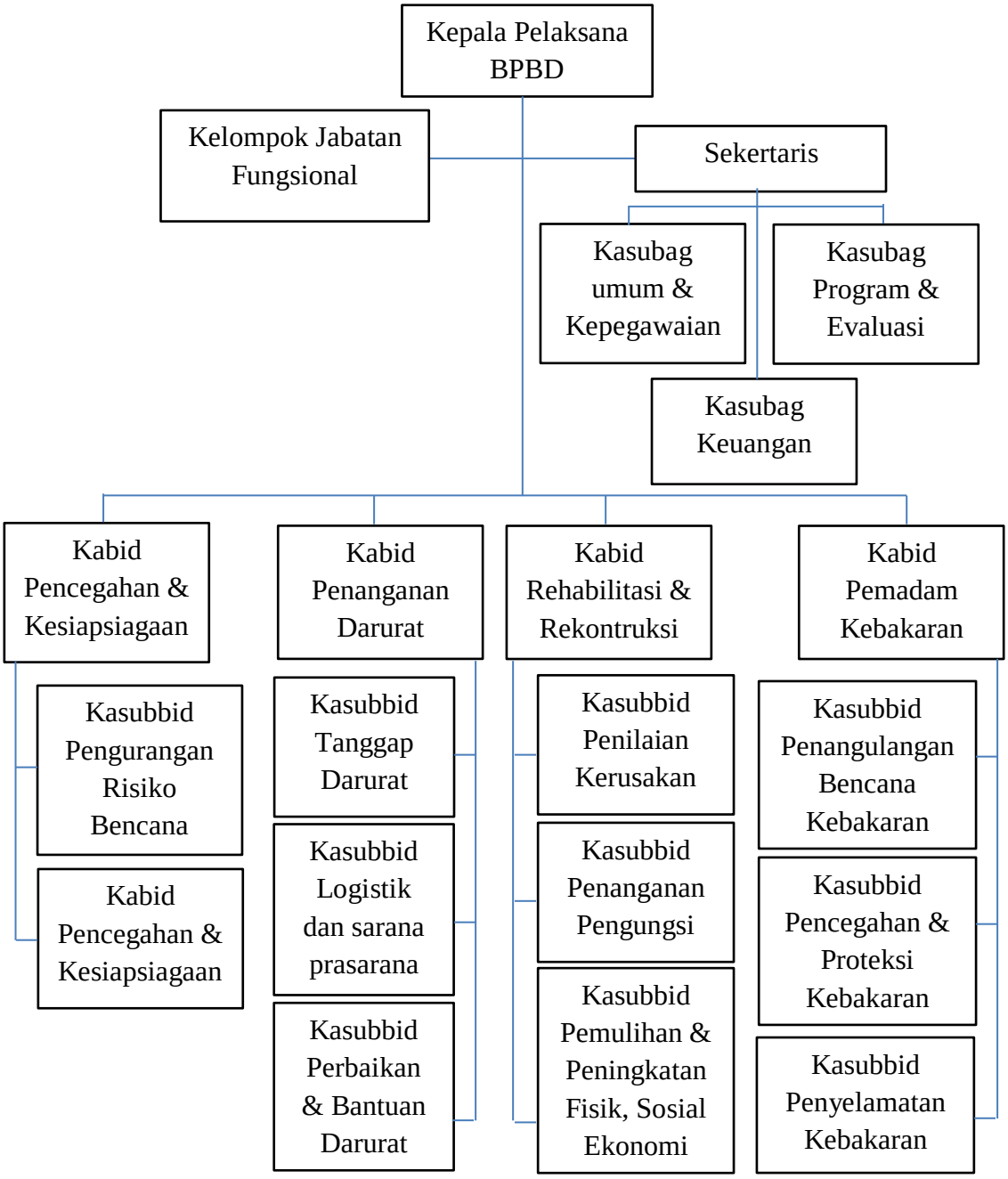

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Serang

Sumber : Data BPBD Kabupaten Serang, 2018

Program kerja bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang

Program Kerja Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2018.

1. Penyusunan *masterplan* dan *actionplan* kebencanaan (letak wilayah Kabupaten Serang, peta rawan bencana banjir, longsor, puting beliung, bencana industri Kabupaten Serang);
2. Pembuatan peta tematik banjir dan longsor (peta *zonasi liquifasi*);
3. Pembentukan relawan bencana (daerah terdampak bencana alam);
4. Simulasi Kebencanaan (penanganan);
5. Sosialisasi pengurangan risiko bencana;
6. Pembentukan desa tangguh bencana (10 desa);
7. Apel Kesiapsiagaan (SKPD yang terkait dalam kebencanaan seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, masyarakat);
8. Pembuatan brosur dan pamflet kebencanaan;
9. Pembentukan organisasi kelompok masyarakat siaga bencana;
10. Pembuatan standar operasional prosedur (SOP) informasi pengurangan risiko banjir dan evakuasi masyarakat;
11. Penyebaran informasi pengurangan risiko banjir melalui media cetak (surat kabar dan brosur);

sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 2018

4.3. Kegiatan-Kegiatan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir BPBD Kabupaten Serang

BPBD Kabupaten Serang merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam kegiatan penanggulan bencana banjir di Kabupaten Serang, terdapat program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana. Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan dalam beberapa program kerja bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Program kerja komunikasi pengurangan bencana banjir terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan.. Program kerja bagian Penceghan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang diantaranya:

Program kerja komunikasi pengurangan risiko bencna banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2018.

1. Pembentukan relawan bencana (daerah terdampak bencana alam);
2. Simulasi Kebencanaan (penanganan);
3. Sosialisasi pengurangan risiko bencana;
4. Pembentukan desa tangguh bencana (10 desa);
5. Apel Kesiapsiagaan (SKPD yang terkait dalam kebencanaan seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, masyarakat);
6. Pembuatan brosur dan pamflet kebencanaan;
7. Pembentukan organisasi kelompok masyarakat siaga bencana;

8. Penyebaran informasi pengurangan risiko banjir melalui media cetak (surat kabar dan brosur);

Dari beberapa program kerja diatas, peneliti mengelompokkan program-program yang serupa menjadi empat bagian besar kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di BPBD Kabupaten Serang:

4.6.1. Sosialisasi dan Simulasi

BPBD Kabupaten Serang menempatkan masyarakat sebagai target sasaran dari segala program kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian BPBD Kabupaten Serang, salah satunya minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir. Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari salah satu aspek tersebut adalah dengan mengedukasi dan memberikan informasi mengenai pengurangan risiko bencana banjir.

Sosialisasi dan simulasi merupakan program kerja BPBD Kabupaten Serang yang menjangkau masyarakat secara langsung. BPBD Kabupaten Serang menyelenggarakan beberapa jenis sosialisasi dalam program kerjanya. Sosialisasi dan simulasi dilakukan dalam tiga kegiatan yaitu Sosialisasi pembentukan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana, Sosialisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir. Ketiganya dilakukan dengan tujuan utama yang sama yaitu pengurangan risiko bencana banjir.

Sosialisasi pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang dengan sasaran masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi bencana, dan masyarakat industri. Selian itu, untuk masyarakat daerah rawan bencana, BPBD Kabupaten Serang mengadakan sosialisasi sekaligus pembentukan kelompok relawan bencana. BPBD Kabupaten Serang juga menyelenggarakan sosialisasi beserta simulasi untuk masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana di Kabupaten Serang.

Sosialisasi dan simulasi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana dan industri. Sosialisasi dan simulasi dirasa efektif untuk menjadikan masyarakat yang sadar bencana dan turut berpartisipatif dalam penanggulangan bencana didaerahnya sendiri.

4.6.2. Pembentukan Relawan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2014 menyebutkan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir diperlukan karena masyarakat dianggap merupakan pihak yang paling mengetahui daerah tempat tinggalnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

BPBD Kabupaten Serang merancang suatu program kerja dengan memanfaatkan rasa kemanusiaan dan kepedulian masyarakat. BPBD

Kabupaten Serang berupaya menumbuhkan rasa partisipatif masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Salah satu bentuk program BPBD Kabupaten Serang adalah pembentukan relawan bencana. Relawan bencana merupakan mereka yang terlibat dengan sukarela membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana alam.

Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam bidang penanggulangan bencana yang bekerja secara ikhlas untuk kegiatan penanggulangan bencana (Undang-undang No. 17 Tahun 2011). Pada mulanya relawan dibentuk atas azas pemanfaatan oleh BNPB, setelah tahun 2011, ditetapkan Undang-undang mengenai relawan.

Sebagai relawan, masyarakat diberi bekal untuk dapat menangani keresahan mengenai isu-isu kebencanaan yang berkembang dimasyarakat, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan penyediaan informasi. Selain itu, masyarakat juga dilatih untuk turut serta dapat menangani keadaan darurat, melakukan tindakan cepat menghadapi bencana.

Relawan bencana dibentuk, dibina dan dilatih oleh BPBD Kabupaten Serang untuk dapat melakukan penanggulangan bencana alam secara mandiri. Relawan bencana binaan BPBD Kabupaten Serang dibentuk dari berbagai macam kegiatan. Relawan bencana dari Kelompok Masyarakat Siada Bencana (KMSB), Relawan bencana dari Desa Tangguh Bencana (Destana), dan Relawan industri.

Terdapat pula relawan bencana yang berasal dari kelompok ataupun organisasi lain, namun bukan disebut sebagai relawan bencana binaan BPBD Kabupaten Serang.

Pembentukan relawan bencana binaan BPBD Kabupaten Serang dibangi benjadi dua program, yaitu Desa Tangguh Bencana dan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana. Kegiatan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana dan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana memiliki tujuan akhir untuk meresmikan pengurus Desa Tangguh Bencana dan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana. Pengurus tersebut kemudian yang disebut sebagai relawan bencana. BPBD Kabupaten Serang rutin melakukan komunikasi dengan relawan bencana desa/kelurahan. Selain melakukan komunikasi, BPBD Kabupaten Serang juga rutin melakukan pembinaan dan pelatihan.

Relawan bencana bertugas menyampaikan pesan komunikasi yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat di desanya masing-masing. Informasi yang disampaikan berupa pelatihan simulasi penanggulangan bencana banjir, informasi kebencanaan, informasi cuaca serta pola hidup masyarakat. Penyampaian pesan komunikasi dilakukan BPBD Kabupaten Serang kepada para relawan bencana melalui proses sosialisasi dan simulasi, serta komunikasi intens melalui media sosial. Kemudian para relawan menyampaikan pesan komunikasi kepada masyarakat desanya masing-masing dengan komunikasi tatap muka.

4.6.3. Penyebaran Informasi melalui Media Massa

Kegiatan pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang dilakukan dengan menjalankan program kerja yang telah termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Sasaran dari pelaksanaan program kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana adalah masyarakat secara umum dan instansi lain pendukung kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Dalam pelaksanaan program kerja, BPBD Kabupaten Serang menjangkau sasaran komunikasi dengan melakukan penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan melalui media massa dan website pribadi BPBD Kabupaten Serang, juga melalui media lokal. BPBD Kabupaten Serang mengundang pers untuk turut serta membantu menyebar informasi kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang. BPBD Kabupaten Serang memberikan *press release* kepada pers media lokal mengenai setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang. *Press release* tersebut yang nantinya akan dimuat dalam website BPBD Kabupaten Serang.

4.6.4. Koordinasi dengan Instansi

Melakukan kegiatan koordinasi degan instansi menjadi salah satu tugas dari BPBD Kabupaten Serang. Mengkoordinir instansi-instansi terkait penanggulangan bencana banjir termasuk dalam kegiatan perencaanaan yang bertujuan untuk penyusunan rencana kegiatan atau program yang akan dilakukan. Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD

Kabupaten Serang diataranya koordinasi dengan pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui apel kesiapsiagaan, koordinasi dengan industri melalui pembentukan Tim Koordinasi Tanggap Darurat (TKTD), Koordinasi dengan media melalui *media relation* dengan pers. Selain itu, BPBD juga tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) banjir yang merupakan forum diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkenaan dengan pengurangan risiko bencana banjir. FPRB beranggotakan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga non-pemerintah yang tergabung dalam forum PRB seperti industri, media massa, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum Provinsi Banten

Salah satu kegiatan yang menjadi media dalam pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir BPBD Kabupaten Serang adalah rapat koordinasi. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan SKPD terkait dilakukan melalui apel kesiapsiagaan yang dijadwalkan setahun sekali. Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan koordinasi mengenai penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang. Pembahasan dalam apel tersebut mengenai rencana penanggulangan bencana banjir, serta program yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, koordinasi dengan industri juga dilaksanakan melalui koordinasi dengan TKTD. Peran industri dalam komunikasi

pengurangan bencana banjir dapat dilihat dari keterlibatannya dalam Tim Koordinasi Tanggap Darurat (TKTD). TKTD merupakan suatu kelompok perwakilan masyarakat industri yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Serang dalam rangka melancarkan komunikasi pengurangan risiko bencana dengan kelompok industri. Memberi penilaian, pengawasan, serta pendidikan kepada masyarakat industri mengenai keamanan (*safety*) daerah industri, seperti mencegah limbah yang menumpuk dan menyumbat saluran air, bangunan yang tidak sesuai aturan dan menghambat saluran air, dan yang lainnya. Industri berperan melakukan komunikasi pengurangan risiko bencana dalam lingkungannya sendiri

TKTD beranggotakan perwakilan dari tiap-tiap industri dan relawan BPBD Kabupaten Serang. Peran industri dalam hal ini yaitu melakukan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir melalui pengawasan terhadap lingkungannya sendiri, melakukan pembinaan terhadap masyarakat industri lingkungannya sendiri. BPBD Kabupaten Serang mengkoordinir tiap-tiap TKTD masing-masing zona melalui TKTD tingkat Kabupaten yang dipegang langsung oleh BPBD Kabupaten Serang.

TKTD yang merupakan wadah untuk memudahkan koordinasi masyarakat industri dengan BPBD Kabupaten Serang. Pembentukan TKTD dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi pengelola TKTD yang direpresentasikan oleh perwakilan industri-industri yang ada

dalam satu zona dalam hal penanggulangan bencana daerah industri. Penanggulangan bencana yang dimaksud baik saat terjadi bencana, pra, maupun pasca bencana. Ketika terjadi bencana TKTD menjadi pioneer utama dalam penanggulangan bencana. Dalam tahap pra bencana, TKTD berperan untuk memberikan pemahaman bencana banjir, peringatan bahaya limbah, pelatihan, serta memastikan bahwa setiap industri menjaga ke*safety*an nya, terutama dalam hal-hal yang dapat menyebabkan bencana dalam kawasan industri dan berbahaya bagi masyarakat industri.

BPBD Kabupaten Serang juga berkoordinasi dengan pengurus media massa melalui kegiatan *media relation.* BPBD Kabupaten Serang menghimpun rekan-rekan pers dari beberapa media lokal dalam satu grup media sosial whatsapp. Selain itu, BPBD Kabupaten Serang juga rutin mengundang perwakilan pers dari beberapa media lokal untuk datang ke kantor BPBD Kabupaten Serang. Hal ini sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan pengurus media lokal.

Salah satu bentuk dari pelaksanaan program kerja BPBD Kabupaten Serang ialah keterlibatan BPBD Kabupaten Serang dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Banten. Forum PRB beranggotakan berbagai macam elemen yang terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko bencana. Forum PRB beranggotakan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga non-pemerintah yang tergabung dalam forum PRB seperti industri, media massa,

Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum Provinsi Banten.

Forum PRB Provinsi Banten digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD Kabupaten Serang turut serta berpartisipasi dalam forum tersebut dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan akibat bencana banjir. PRB sebagai salah satu bentuk penanggulangan bencana banjir, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, uatamanya dari tiga elemen yang terdapat dalam logo segitiga berwarna biru pada logo BPBD yang bermakna perlindungan dan tiga elemen yang bekerja sama dalam mengupayakan penaggulangan bencana, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. FPRB menjadi salah satu wadah untuk menjalin kerjasama dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Forum PRB yang didalamnya terdapat berbagai elemen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, BPBD tiap Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten dan perwakilan Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) Provinsi Banten. Juga terdapat keterlibatan Swasta seperti, perwakilan Industri yang ada di Provinsi Banten, juga terdapat perwakilan masyarakat yang direpresentasikan dengan adanya relawan BPBD, PMI, dan TAGANA. Terdapat pula LSM, dan Ormas.

4.4. Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan informan yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Data penelitian diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu melalui wawancara penelitian yang dilakukan dengan beberapa orang yang terdapat dalam struktur organisasi BPBD Kabupaten Serang. Jumlah informan yang peneliti wawancarai sebagai sumber data yaitu sebanyak 8 orang. Informan terdiri dari Kepala Pelaksana, Kepala Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana, Kepala Sub Bagian Kesiapsiagaan, Anggota Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana, Perwakilan Wartawan, Perwakilan Masyarakat target sasaran, konsultan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Peneliti memilih Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang sebagai *key informan* karena Kepala Pelaksana dianggap memenuhi persyaratan, dan mengetahui kegiatan komunikasi penngurangan risiko bencana banjir yang dilaksanakan. Selanjutnya, peneliti memilih Kepala Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana dan Kepala Sub Bagian Kesiapsiagaan karena mereka yang mengepalai dan mengerti akan segala kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang dilakukan. Peneliti juga memilih salah satu Staff

Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana, karena beliau merupakan salah satu pelaksana kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Berikutnya, peneliti memilih salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Cikeusal sebagai salah satu perwakilan dari elemen masyarakat yang diwawancarai karena beliau berperan dalam mendukung penyampaian pesan pengurangan risiko bencana banjir. Peneliti juga mewawancarai salah satu orang masyarakat Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal yang merupakan salah satu daerah sasaran program kegiatan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir. Terakhir, peneliti mewawancarai masyarakat yang sudah tergabung dalam kelompok relawan binaan BPBD Kabupaten Serang.

Penelitian ini fokus untuk mendapatkan informasi mengenai komunikassi pengurangan risiko bencana banjir yang dilakukan, serta bagaimana keterlibatan aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BPBD dalam menyampaikan pesan komunikasi. Alasan peneliti memilih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai subjek penelitian adalah karena melihat fakta yang peneliti amati langsung di lapangan bahwa risiko akibat bencana banjir yang dialami masyarakat Kabupaten Serang setiap tahun selalu meningkat, Kabupaten Serang yang memiliki wilayah yang cukup luas juga dengan banyaknya daerah industri didalamnya, membuat beberapa wilayah di Kabupaten Serang menjadi daeah rawan bencana banjir menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Komunikasi risiko yang efektif menurut Leiss (1950), melibatkan aktor-aktor komunikasi yang berperan didalamnya. Aktor yang terlibat dalam mendukung efektivitas komunikasi pengurangan risiko bencana diantaranya adalah Pemerintah, Industri, Media Massa, Akademisi, dan Masyarakat. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada keterlibatan masing-masing aktor komunikasi, dan bagaimana aliran komunikasi yang terjadi.

Tabel 4.1 Informasi Informan Penelitian

Kode Informan	Nama Informan	Usia (tahun)	Pekerjaan
NSK	Nana Sukmana Kusuma, SE, MM	54 tahun	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang
WD	Drs. Wawan Darmawan, M.Si	52 tahun	Kepala Sub Bidang Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang
SN	Setianingsih, S.Sos	55 tahun	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang
M	Maman	45 tahun	Staff Sub Bidang Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang
K	Hj. Kublik	62 tahun	Tokoh Masyarakat Kecamatan Cikeusal
NR	Nana Rusmana	31 tahun	Masyarakat Desa Panosogan
RM	Rizky Milyatullah	26 tahun	Relawan Mitra BPBD Kabupaten Serang

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2018

Penelitian dilakukan melalui kegiatan wawancara yaitu di bulan Juni-Juli 2018. Peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu pada informan. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara secara langsung sekaligus turut serta

melakukan observasi dengan mengikuti salah satu program kerja subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat bantu penelitian yaitu perekam suara *handphone* untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data.

Pertama, di pertengahan bulan Juni peneliti mendatangi tempat subjek peneitian yaitu BPBD Kabupaten Serang. Peneliti mulai melakukan pendekatan dengan beberapa *key informan* yang terdapat di BPBD Kabupaten Serang. Setelah itu, peneliti mulai melakukan wawancara pertama dengan informan kedua. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2018, dimulai pukul 12.00 s/d 15.00 WIB. Wawancara dengan informan keempat, dilakukan di tempat dan waktu yang sama dengan informan kedua, karena berada dalam sub bidang yang sama.

Pada tanggal yang berdeda, peneliti bertemu degan informan pertama dan ketiga di kantor BPBD Kabupaten Serang, 28 Juni 2018 yang dimulai dari pukul 10.00 s/d 13.00 WIB. Selanjutnya, peneliti mengikuti kegiatan program kerja sub bagian pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal pada tanggal 24 Juli 2018. Dalam kegiatan observvasi tersebut, peneliti bertemu dengan informan kelima, keenam dan ketujuh. Peneliti mewawancarai ketiga peneliti tersebut secara bergantian dari pukul 11.00 hingga 15.00 WIB.

Peneliti tidak banyak menemukan kesulitan dalam hal berkomunikasi dan menjalin kedekatan dengan para informan. Setelah proses wawancara berlangsung, peneliti tidak serta merta hilang kontak dengan para informan,

peneliti masih menjalin komunikasi demi menjaga kedekatan dan keakraban untuk selanjutnya peneliti mengikuti program kerja yang di laksanakan oleh informan dalam proses observasi.

4.5. Hasil Penelitian

4.5.1. Penemuan Fakta Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Penelitian ini berfokus pada kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Komunikasi pengurangan risiko banjir perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah kerugian serta korban jiwa akibat terjadinya bencana banjir. Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir diselenggarakan oleh lembaga nasional khusus penanggulangan bencana yaitu Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta lembaga serupa yang berada disetiap daerah yang merupakan lembaga yang berada dibawah naungan BNPB, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Komunikasi pengurangan risiko banjir dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setiap daerah, sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Kegiatan pengurangan risiko bencana banjir merupakan salah satu bentuk kegiatan penanggulangan bencana dalam kategori pra-bencana. Oleh seban itu, BPBD setiap daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana. Begitu pula dengan BPBD Kabupaten Serang. Hal tersebut sesuai dengan yang

diutarakan oleh informan 1 mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam BPBD Kabupaten Serang:

> *"Jelas kami melakukan. Di BPBD Kabupaten Serang sendiri ada empat bidang, pertama adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Pencegahan dan kesiapsiagaan itu memiliki tugas pokok dan fungsi memitigasi, membaca, membuat peta, melakukan pemetaan. Dimana titik titik rawan bencana, berapa satelit yang kita butuhkan, berapa relawan yang dibutuhkan, sarana pra sarana apa yang dibutuhkan. Sehingga mitigasi bencana bisa terpetakan. Oleh sebab itu BPBD memiliki masterplan yang spesial. Dan perlu diketahui masterplan kita adalah masterplan pertama yang dimiliki BPBD di Indonesia. Itu adalah sistem. Lalu, kesiapsiagaan juga menyiapkan relawan, melatih relawan, dan segala macam. Nah dalam bidang pencegahan inilah salah satu sub bidangnya adalah sub bidang pengurangan risiko bencana atau PRB. Lalu yang kedua, adalah kedaruratan. Kedaruratan itu pusat pengendali informasi. Kita punya krisis centre. Dimana mereka action melakukan tindakan ketika terjadi bencana. Yang ketiga, rehabilitasi rekontruksi. Kita melakukan rehabilitasi rekontruksi pasca bencana. Yang keempat adalah pemadam kebakaran. Siapa yang diperiksa, siapa yang diawasi dan siapa yang dibina. Adalah masyarakat. Kabupaten Serang (Kusuma, 2018)."*

Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang didalamnya terdapat sub bagian Pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan, memiliki tugas salah satunya melakukan kegiatan komunikasi pengurngan risiko bencana banjir. Kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana dilakukan dengan tujuan umum yaitu mengurangi jumlah dampak yang ditimbulkan akibat bencana bajir, baik korban jiwa maupun materiil. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan narasumber kedua:

> *"Iya kami melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana, itu bidang kami, pencegahan dan kesiapsiagaan, sub bidangnya ada pengurangan risiko bencana, sama kesiapsiagaan. Itu bagian pra bencana. Kalo pra itu menciptakan sumber daya manusia, melatih dalam kebencanaan. Tugas Pak Wawan (kepala sub bagian pencegahan) mengurangi dari 200 rumah yang terdampak bagaimana bisa menjadi 50 rumah saja. Mengurangilah. Adanya di pra. Dengan segala program kegiatannya. Tugas bu Ning (kepala sub bagian kesiapsiagaan) menciptakan relawan, nah misalkan ada bencana orang-orang itulah*

yang aktif. Di pra adanya. Pra bencana ini butuh orang-orang yang kreatif" (Darmawan, 2018).

Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang merencanakan program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko akibat bencana banjir. Oleh sebab itu, penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana banjir memerlukan data yang jelas dan terukur. Data mengenai daerah rawan bencana, curah hujan, jumlah masyarakat, serta riwayat kejadian bencana banjir.

BPBD Kabupaten Serang melakukan penemuan fakta komunikasi dalam dua bentuk kegiatan, pertama pengumpulan data untuk pembuatan masterplan, kedua survei untuk penyusunan program kerja. Dalam pelaksanaan penemuan fakta untuk penyusunan *masterplan*, informasi yang dikumpulkan dilapangan berupa jumlah penduduk dari setiap Kecamatan, jumlah pemukiman warga dari setiap Kecamatan, jumlah sarana sosial (sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan), sarana perekonomian (sawah, peternakan, tambak), sarana pemerintahan (kantor camat, kantor desa dan balai desa), rekapitulasi bencana banjir pertahun, jumlah kerusakan sarana prasarana serta korban jiwa akibat banjir pertahun dari tiap Kecamatan, tempat evakuasi sementara yang terdapat di setiap Kecamatan, dan peralatan evakuasi di setiap Kecamatan.

Penyusunan program kerja juga memerlukan penemuan fakta terlebih dahulu. Informasi yang dikumpulkan dalam penemuan fakta komunikasi untuk penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Serang antara lain jumlah korban bencana dan kerusakan akibat bencana yang terjadi, jumlah penduduk

terdampak bencana banjir, sarana pra sarana penunjang kegiatan evakuasi bencana, serta budaya masyarakat.

BPBD Kabupaten Serang membuat *masterplan* yang berisi data mengenai peta daerah rawan bencana banjir yang berisi statistik jumlah korban bencana banjir, jumlah penduduk setiap daerah dan data fasilitas penanggulangan bencana banjir disetiap kecamatan di Kabupaten Serang. *Masterplan* bencna banjir juga terdiri dari buku dokumen hasil pemantauan daerah rawan bencana banjir dan rencana kontijensi banjir Kabupaten Serang. BPBD membuat *masterplan* juga sebagai panduan penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana banjir. *masterplan* dibuat dalam bentuk buku dan di berikan kepada setiap kecamatan di Kabupaten Serang. Masterplan BPBD Kabupaten Serang berbentuk beberapa buah buku yang berisi data mengenai hasil pemantauan daerah rawan bencana di Kabupaten Serang, rencana kontijensi bencana banjir di Kabupaten Serang, serta peta rawan bencana banjir di Kabupaten Serang. Seperti yang dijelaskan oleh Narasumber 1:

> *"…dalam melakukan pendataan dan pemetaan, BPBD memiliki masterplan untuk memetakan dimana titik-titik rawan bencana, satelit apa yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, berapa relawab yang dimiliki, sarana pra sarana apa yang dimiliki. Perlu diketahui, BPBD Kabupaten Serang itu satu-satunya BPBD yang memiliki masterplan, itu cuma kita doang (Kusuma, 2018)."*

Masterplan membantu BPBD Kabupaten Serang dalam proses perencanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Masterplan yang dibuat diperiode sebelumnya, menjadi acuan pembuatan program kerja diperiode mendatang. Selain melalui acuan data dari *masterplan*, penyusunan program pengurangan risiko bencana banjir juga

diawali dengan proses penemuan fakta melalui survei. Proses penemuan fakta atau *fact finding* ini hanya melibatkan BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Proses penemuan fakta melalui survei dilakukan oleh beberapa staff dan pejabat bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang, yang kemudian disebut sebagai tim survei. Proses survei yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan dan masyarakat daerah pelaksanaan program kerja. Target sasaran program kerja BPBD Kabupaten Serang merupakan masyarakat umum Kabupaten Serang terutama masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana, sehingga perlu dilakukan penemuan fakta dilapangan terlebih dahulu dalam menyusun program kerjanya. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Narasumber 3 mengenai proses penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Serang:

> *"Karena sasaran kami masyarakat, jadi kami survei dulu bagaimana kondisi lapangan. Setelah itu, disusun usulan programnya, anggaran, dan lain-lain. Baru diajukan. Jadi semua berproses (Setianingsih, 2018)."*

Survei yang dilakukan mengenai daerah rawan banjir, kebutuhan masyarakat daerah rawan banjir, jumlah korban dan kerugian akibat banjir, kejadian banjir terakhir, intensitas kejadian banjir, dan lain-lain. Survei tersebut bertujuan untuk menentukan program kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Narasumber 1 berbicara mengenai hal tersebut:

> *"... Jadi penyusunan program itu tidak sembarang hanya menyusun berdasarkan ide yang sedang muncul. Jadi semua berdasarkan hasil riset, survei lapangan. Kita melihat apa kekurangan kelebihan program kemarin, kita lihat keadaan mereka (sasaran komunikasi) bagaimana,*

keadaan wilayahnya. Sehingga kita membuat program berdasarkan masyarakat, karena target sasaran kita ya masyarakat (Kusuma, 2018)."

Hal yang sama pun disampaikan oleh Narasumber 2 terkait proses survei untuk penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana banjir:

"Kita survei dulu apa yang dibutuhin masyarakat, ada timnya. Internal kita juga evaluasi program. Semua itu akan jadi acuan pengusulan program periode mendatang… (Darmawan, 2018)."

4.5.2. Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Proses komunikasi pengurangan risiko bencana banjir diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan pada dasarnya dilakukan jauh sebelum suatu kegiatan berlangsung. Perencanaan dibuat untuk dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan yang diharapkan. Perencanaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan manajemen komunikasi bencana. Perencanaan dibuat sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan manajemen komunikasi bencana.

Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan dengan melaksanakan beberapa program kerja yang telah tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Proses penyusunan program kerja dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Selain itu, pihak BPBD Kabupaten Serang melalui sub bidang pengurangan risiko bencana melakukan survei langsung untuk menentukan program kerja yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal

tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh informan 4 mengenai proses penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Serang:

> *"Sebelumnya kan udah ada program kerja yang dijalankan, ada evaluasi dari program yang sudah berjalan. Apa kekurangannnya, apa kendalanya, gimana capaian kegiatannya. Semua dievaluasi. Baru dibuat kerangka program kerja periode mendatang, diajukan kepada bagian program dan evaluasi. Lalu bagian program dan evaluasi mengkaji, setelah selesai diajukan kepada Kalaksa (kepala pelaksana) dan Sekertaris. Kemudian diajukan kepada BAPPEDA, dikaji. Baru setelah itu diturunkanlah program yang akan BPBD Kabupaten Serang laksanakan dalam bentuk DPA (Maman, 2018)."*

Selanjutnya, tim survei BPBD Kabupaten Serang yang merupakan beberapa staff sub bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang melaporkan hasil survei kepada kepala sub bagian pengurangan risiko bencana banjir untuk selanjutnya dilakukan penyusunan program kerja yang kemudian akan diusulkan kepada bagian program dan evaluasi BPBD Kabupaten Serang. Usulan program kerja akan dibahas dalam rapat oleh bagian program dan evaluasi bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang dan Sekertaris. Terakhir, program kerja akan diajukan kepada Bappeda sebagai representasi pemerintah daerah untuk kemudian disahkan. Program kerja yang telah disetujui akan tertuang dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Proses perencanaan juga membutuhkan angka dan data, hal ini digunakan dalam memperkirakan berbagai hal yang diperlukan dalam perencanaan program ini, misalkan penetuan lokasi kegiatan, jumlah peserta kegiatan, dan lain sebagainya. BPBD Kabupaten Serang menggunakan *masterplan* daerah

rawan bencana banjir yang telah dibuat untuk memudahkan dalam memperkirakan berbagai hal dalam proses perencanaan.

Perencanaan melibatkan proses persiapan anggaran, anggaran dana kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang. Perencanaan penggunaan anggaran termasuk dalam salah satu proses perencanaan. Anggaran dana merupakan penyokong kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Selain anggaran dana, yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir adalah fasilitas. Fasilitas yang digunakan BPBD Kabupaten Serag dalam melaksanakan program kerjanya merupakan fasilitas internal BPBD Kabupaten Serang dan merupakan bantuan dari BNPB. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Narasumber 3 mengenai sumber anggaran dan fasilitas:

> *"Anggaran penyelenggaraan bersumber dari Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten Serang (Setianingsih, 2018)."*

Hal ini juga disampaikan oleh Narasumber 4 mengenai sumber anggaran dan fasilitas:

> *"Kalo sumber anggaran itu dari APBD Kabupaten Serang ya, kalo fasilitas itu dari internal kami, kaya spanduk, kendaraan, infokus. Kalo fasilitas standar kebencanaan untuk kecamatan-kecamatan itu kami dapat bantuan dari BNPB, sebagian juga kami anggarkan (Maman, 2018)."*

Pada pelaksanaan program kerja sosialisasi dan simulasi serta pembentukan relawan bencana, diawali dengan penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan). PPTK merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya (PP 58/2005, Pasal 1 angka 16). PPTK merupakan

salah satu pejabat dalam bagian atau sub bagian BPBD Kabupaten Serang yang bidangnya sesuai dengan program kerja yang akan dijalankan. Dalam hal ini, karena fokus penelitian pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, maka PPTK dalam program kerja-program kerja yang dimaksud merupakan pejabat dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Setelah penunjukkan PPTK, dibentuklah panitia pelaksana kegiatan pada saat kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Panitia pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekertaris, dan anggota. Panitia pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan. Panitia pelaksana terdiri dari pejabatan dan staff BPBD Kabupaten Serang yang dipilih berdasarkan kesesuaian bidang kerjanya. PRB tersebut. Panitia pelaksana akan menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan teknis. Seperti yang disampaikan narasumber 2:

> *"Kalo perencanaan yang paling utama kan konsep ya, konsep dan pesan komunikasi itu sudah tertuang dalam DPA, jadi kita tinggal menterjemahkan saja, mau menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang seperti apa, penyampaiannya bagaimana, ataukah akan disederhanakan atau tidak, penyampai pesannya siapa (Darmawan. 2018)."*

Setelah pembentukan panitia pelaksana, mereka langsung menjalankan tanggung jawab dengan mengadakan rapat internal panitia pelaksana untuk mempersiapkan pelaksanaan program kerja. Semua dibahas dan dipersiapkan dalam proses ini. Pesan komunikasi, konsep, penyampaian pesan. pembicara (komunikator), lokasi, serta yang lainnya. Dalam tahap ini juga dibahas mengenai koordinasi dengan aktor lain dalam proses penyampaian pesan komunikasi, seperti media massa dan relawan. Hal ini karena dalam program

kerja sosialisasi dan simulasi serta pembentukan relawan bencana, akan diakhiri dengan penyebaran informasi melalui media massa. Hal ini dibenarkan oleh Narasumber 3:

> *"Semua dipersiapkan ya, panitia dibentuk untuk membahas dan mempersiapkan itu. Pembicara, pesan semua dibahas, bahkan koordinasi sama media sama relawan juga (Darmawan, 2018)."*

Dalam tahap ini juga dibahas mengenai perencanaan pesan komunikasi. Pesan komunikasi disusun secara persuasif dan edukatif, artinya pesan yang disampaikan bersifat mengajak masyarakat untuk turut serta berperan dalam penanggulangan bencana banjir, juga memberitahu dan mendidik masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai praktek pengurangan risiko bencana. Pesan komunikasi utamanya bertujuan untuk meningkatkan pertisipasi komunikan (sasaran program kerja) dalam penanggulangan bencana banjir untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir. Pesan komunikasi disampaikan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatannya. Sehingga pesan komunikasi mendukung pencapaian tujuan kegiatan tersebut.

> *"Kalo pesan ya intinya bagaimana masyarakat berperan dalam lingkungannya buat penanggulangan. Misalnya dengan dia ga buang sampah sembarangan, merawat sungai sebagaimana mestinya, tidak menebang pohon. Itu sederhananya. Kalo yang lebih rumit ya mengenai pembangunan dan pemanfaatan lahan. Untuk pemukiman, industri. oleh sebab itu sasaran kita juga industri. Makanya kita sering jalin komunikasi sama industri-industri juga (Rusmana, 2018)."*

Begitu pula Narasumber 2 yang berpendapat mengenai pesan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir:

> *"Pesan komunikasi tertera disetiap kerangka acuan kerja setiap kegiatan ya, tapi intinya begini, kalo sasaran kita masyarakat, ya tujuannya partisipasi masyarakat, kalo sasaran kita industri, ya tujuannya partisipasi industri, kalo sasran kita SKPD atau instansi lain, ya*

tujuannya untuk mengkoordinir mereka dalam proses penanggulangan bencana, kan gitu (Darmawan, 2018),"

Strategi yang digunakan dalam proses penyampaian pesan komunikasi melalui program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana adalah dengan menggunakan komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif diterapkan oleh BPBD Kabupaten Serang dalam melaksanakan komunikasi penanggulangan bencana yang efektif.

Komunikasi partisipatif merupakan suatu proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Muljono dan Lumintang, 2011 : 19). Nilai penting dari komunikasi partisipatif dalam proses penanggulangan bencana banjir tidak dapat diukur dari keterlibatan elemen-elemen secara fisik saja dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir. Unsur komunikatif yang paling penting lebih kepada proses dialog yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Karena kegiatan komunikasi itu sendiri sebenarnya bukan kegiatan memberi dan menerima, melainkan "berbagi dan berdialog". Dengan demikian daya kreatif dari elemen-elemen komunikasi melalui uraian ide dan gagasan dalam berbagai forum, akan membuat mereka menjadi elemen yang aktif dalam komunikasi penanggulangan bencana banjir.

Selain itu, strategi yang digunakan dalam program pengurangan risiko bencana banjir adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan komunikasi pengurangan risiko, hal ini bertujuan untuk

menambah kesan kredibilitas dalam penyampaian pesan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Narasumber 2:

> *"Jadi salah satu cara kita menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, lurah, camat begitu neng (Darmawan, 2018)."*

Hal yang sama juga diutarakan Narasumber 4:

> *"Kalo sosialisasi sama simulasi pasti kita undang tokoh masyarakat neng. Yang ngesahin pembentukan pengurus KMSB sana Destana kan dari kita sama perwakilan tokoh masyarakat. Jadi tanda kalo masyarakat sana mendukung lah gitu (Setianingsih, 2018)."*

Pernyataan kedua Narasumber dari internal BPBD Kabupaten Serang tersebut dibenarkan oleh Narasumber 5:

> *"Saya sebagai orang yang dituakan didaerah sini neng, karena umur karena pengalaman. Saya disini mah cuma dampingin, saya juga seneng kalo masyarakat ada kegiatan gini. Pemerintah masih peduli tandanya sama keselamatan masyarakat (Kubik, 2018)."*

Program kerja komunikasi pengurangan risiko lainnya yaitu koordinasi dengan instansi lain dan penyebaran informasi melalui media massa. Koordinasi dengan instansi dilakukan oleh staff bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Pelaksanaan program kerja koordinasi dengan instansi dilakukan dengan komunikasi formal dan informal. Koordinasi secara formal dilakukan BPBD Kabupaten Serang dalam koordinasi dengan Pemerintah daerah beserta SKPD Kabupaten Serang, Industri dan juga koordinasi dengan pihak terkait dalam forum komunikasi. Sedangkan koordinasi dengan media (pers), dijalin dengan komunikasi informal.

Koordinasi secara formal pertama yaitu koordinasi dengan industri melalui TKTD. TKTD merupakan tempat koordinasi BPBD Kabupaten Serang

dengan perwakilan industri-industri di suatu zona atau wilayah yang telah ditentukan. Pengurus TKTD bertugas menyampaikan pesan komunikasi risiko bencana kepada masyarakat industri. TKTD juga sebagai pengawas dalam zona industri tersebut. Komunikasi BPBD Kabupaten Serang dengan pengurus TKTD dijalin secara intens dan rutin.

> *"TKTD itu koordinasi rutin. Tiap sebulan sekali kami pasti datang mengecek sekaligus silaturahmi, gimana relawan disana, gimana masyarakat industri (Darmawan, 2018)."*

Selanjutnya koordinasi BPBD Kabupaten Serang dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Banten dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Banten. BPBD Provinsi Banten mengadakan koordinasi dengan mengundang semua lembaga terkait kebencanaan di Provinsi Banten dalam FPRB Provinsi Banten secara rutin satu tahun dua kali.

> *"Kalo FPRB Kabupaten kan belum ada ya, jadi kita diundang sama BPBD Provinsi untuk koordinasi dalam FPRB Provinsi Banten. Rutin setahun dua kali (,2018)."*

Pada intinya, proses koordinasi dengan instansi lain merupakan upaya BPBD Kabupaten Serang untuk menjalin komunikasi. BPBD Kabupaten Serang sebagaimana mestinya bertugas sebagai lembaga *leading sector*. Artinya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD tidak bekerja sendiri, melainkan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat.

4.5.3. Pelaksanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Tahap selanjutnya dalam model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center adalah kegiatan komunikasi atau pelaksanaan komunikasi. Tahapan komunikasi adalah tindakan yang harus dilakukan, yakni membuat dan menyebarluaskan informasi baik melalui media massa maupun melalui saluran-saluran komunikasi lainnya (kelompok, tradisional, media baru, *focus group,* publik) (Cangara, 2014:75). Kegiatan komunikasi adalah tahapan pelaksanaan dari perencanaan komunikasi yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya.

Pelaksanaan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan risiko akibat bencana banjir. Pelaksanaan kegiatan komunikasi PRB sangat bermanfaat bagi semua pihak terutama masyarakat, karena melalui kegiatan komunikasi PRB masyarakat jadi lebih sadar dan siap siaga dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana banjir di masa yang akan datang. Sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir atau mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana banjir. Karena dalam mengatasi bencana banjir, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam menanggulanginya, akan tetapi faktor terbesar adalah dari masyarakat sendiri. Perlu kesadaran yang besar bagi tiap-tiap individu dalam menjaga dan menyayangi lingkungannya.

> *"Pelaksanaan kegiatan komunikasi PRB mengutamakan asas manfaat bagi masyarakat. Utamanya masyarakat Kabupaten Serang, juga masyarakat industri (Setianingsih, 2018)."*

Pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir BPBD Kabupaten Serang melalui program kerja sosialisasi dan simulasi serta pembentukan relawan bencana dilakukan dalam satu rangkaian acara. Pembentukan relawan bencana diawali dengan proses sosialisasi terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan proses sosialisasi dan simulasi, panitia pelaksana kegiatan menjalankan perencanaan yang telah disiapkan dalam tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, BPBD Kabupaten Serang sebagai orang yang merumuskan pesan komunikasi, menyiapkan segala komponen komunikasi. Komunikator, pesan, media, dan komunikan disiapkan oleh BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Penyampaian pesan komunikasi dilakukan oleh seorang komunikator. Komunikator dipersiapkan oleh panitia penyelenggara untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada komunikan, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Serang. Proses pemilihan komunikator dalam setiap program kerja BPBD Kabupaten Serang dibahas dalam rapat internal.

Komunikator dalam program kerja sosialisasi dan simulasi merupakan orang yang bertugas menyampaikan pesan komunikasi yang telah dipersiapkan dalam kerangka acuan kerja. Komunikator dalam program sosialisasi dan simulasi merupakan pembicara atau narasumber yang telah dipilih dan dipersiapkan oleh panitia pelaksanaan kegiatan. Pembicara dipilih

berdasarkan kapasitas dan kapabilitas serta kesesuaian bidang kerjanya. BPBD Kabupaten Serang memilik pembicara tidak hanya dari internal BPBD Kabupaten Serang, tetapi juga dari instansi lain, seperti kedinasan maupun Pemerintah daerah, sesuai dengan tema dan topik pembicaraan sosialisasi. Tokoh masyarakat formal dan nonformal juga dilibatkan dalam peneguhan dan pemberian motivasi agar materi yang disampaikan BPBD Kabupaten Serang dilaksanakan oleh masyarakat.

> *"Kalo pembicara nggak cuma dari kita (BPBD Kabupaten Serang), ada juga dari pemda, kedinasan. Kalo misalkan kita mau masukin topik PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), boleh kita gaet dinas kesehatan. Sesuain sama topik intinya. Kita dari internal BPBD biasanya Bapak (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang), terus Kabag-kabag (Kepala Bagian di BPBD Kabupaten Serang) ..... Oh, tokoh masyarakat juga ada (Darmawan, 2018)."*

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Narasumber dari pihak masyarakat:

> *"Kalo yang ngomong didepan tadi mah pake baju biru (seragam BPBD Kabupaten Serang) neng ada 3, dari BPBD ya neng, pake power point. Pak Camat juga didepan, sama Pak Haji (tokoh masyarakat) (Rusmana, 2018)."*

Pada program kerja pembentukan relawan bencana, komunikator yang dimaksud merupakan mereka yang bertugas melakukan pembinaan dan komunikasi secara intens dengan pengurus relawan bencana setiap desa. Komunikator yang dipilih merupakan staff sub bagian pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang. Selain itu, BPBD Kabupaten Serang menyertakan tokoh masyarakat dalam proses pembinaan relawan bencana disetiap desa. Hal ini dibenarkan oleh Narasumber 5 yang merupakan tokoh masyarakat:

"Saya ikut membina kalo relawan. Hanya mendampingi. Sama Kang Wawan (Kepala Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana) juga (Kublik, 2018)."

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Narasumber 7:

"Kalo yang mendampingi ada Pak Wawan (Kepala Sub bagian pengurangan risiko bencana), sama Pak Lurah, sama Pak Haji (Tokoh masyarakat). Kami pengurusnya ber enam (Millyatullah, 2018)."

Pelibatan tokoh masyarakat dakam proses pembinaan relawan di Desa-desa bukan tanpa sebab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penerimaan pesan komunikasi sehingga komunikator dalam hal ini pihak BPBD Kabupaten Serang memiliki kredibilitas serta kepercayaan.

Setelah kegiatan sosialisasi dan simulasi serta pembentukan relawan bencana dijalankan, pihak BPBD Kabupaten Serang membuat press release kemudian dimuat dalam website BPBD Kabupaten Serang, serta disebar luaskan kepada pers media lokal. Komunikasi yang dijalin BPBD Kabupaten Serang dengan pers media lokal yaitu melalui grup whatsapp. Komunikator yang menjalin komunikasi serta mengolah segala pemberitaan BPBD Kabupaten Serang adalah Humas BPBD Kabpaten Serang beserta Pusat Data dan Informasi (PUSDALOPS) BPBD Kabupaten Serang.

"Kalo yang buat berita itu PUSDALOPS, yang hubungan sama media juga sama. Karena Humas kan yang biasanya whatsappan sama pers (Maman, 2018)."

Program kerja pengurangan risiko bencana yang juga dijalankan oleh BPBD Kabupaten Serang adalah koordinasi dengan Instansi lain. Komunikator pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dipilih sesuai dengan instansi sasaran. Umumnya penunjukkan komunikator tidak

berdasrkan pemilihan panitia pelaksana kegiatan. Komunikator ialah staff sub bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang.

Penyusunan pesan serta media yang digunakan dalam program sosialisasi dan simulasi serta pembentukan relawan bencana dilakukan oleh panitia pelaksana. Pesan komunikasi disusun berdasarkan masyarakat sasaran dan juga daerah sasaran. Sedangkan media pendukung yang digunakan dalam program sosialisasi dan simulasi adalah brosur, pamflet dan spanduk. Dalam kegiatan koordinasi dengan instansi lain, media pendukung yang digunakan adalah melalui media sosial whatsapp.

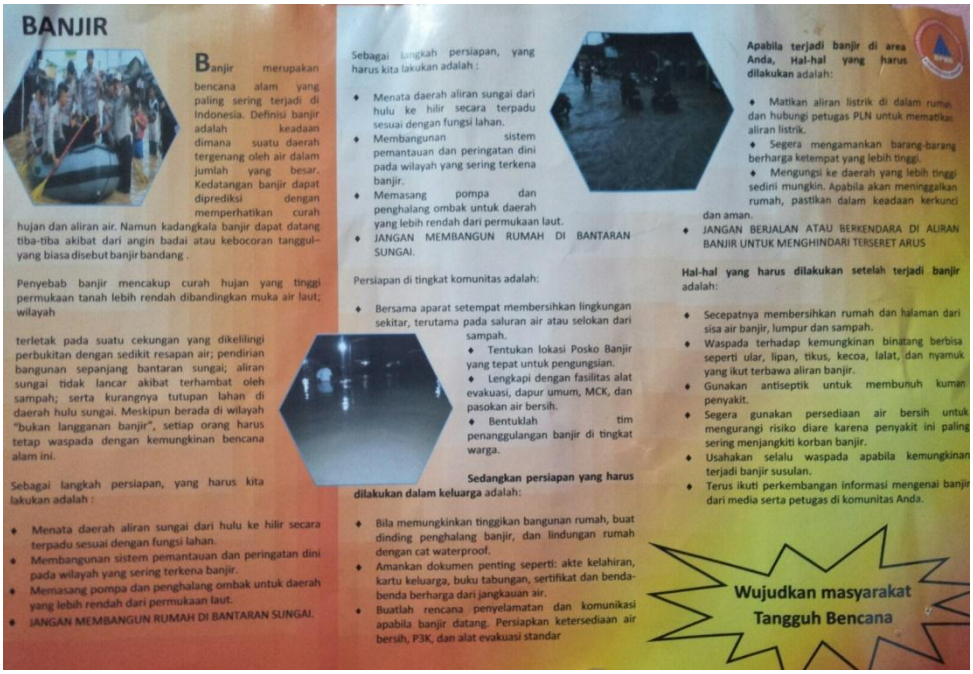

Gambar 4.3 Brosur Kegiatan Desa Tangguh Bencana

Sumber : arsip BPBD Kabupaten Serang

Penentuan komunikan atau sasaran komunikasi pada setiap program kerja disesuaikan dengan tujuan kegiatan. Komunikan pada setiap kegiatan

komunikasi pengurangan risiko bencana banjir umumnya merupakan masyarakat Kabupaten Serang. Sosialisasi dan simulasi serta pembentukan relawan bencana, komunikannya dipilih dengan menggunakan *masterplan* peta rawan bencana banjir. Sedangkan untuk koordinasi dengan instansi, komunikan dipilih berdasarkan bidang kerjanya.

4.5.4. Evaluasi Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Setelah pelaksanaan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan, BPBD Kabupaten Serang melakukan evaluasi dan pengontrolan. Evaluasi atau pengendalian yang dilakukan merupakan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan melalui rapat internal panitia pelaksana. Tujuan utama fungsi pengendalian adalah, agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Pengendalian merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

> *"Evaluasi kita lakukan selalu setiap abis pelaksanaan program kerja ya. Kita melaksanakan evaluasi itu ya untuk mengukur seberapa besar kesuksesan acara, apa kelemahannya. Evaluasi juga buat bahan pertimbangan penyususnan usulan program periode mendatang (Darmawan, 2018)."*

Selain itu, pengontrolan terhadap pesan komunikasi juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah dengan relawan bencana disetiap Desa dan relawan industri. Pengontrolan juga dilakukan dengan meninjau ulang daerah-

daerah yang sudah menjadi daerah tempat pelaksanaan program kerja. Peninjauan ulang dilakukan dengan tujuan melakukan pengontrolan apakah pesan komunikasi sudah tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

> *"Buat ngontol pesan, dan mengetahui respon publik kita peninjauan ulang sih ya. Jadi kita ke desa-desa kita kesana buat tau gimana respon masyarakat. Kita juga liat apa pesannya udah sampai ke masyarakat (Setianingsih, 2018)."*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Narasumber 7 yang merupakan relawan bencana:

> *"Setelah diresmikan, kami menjadi petugas relawan Destana (Desa Tangguh Bencana), kami diwajibkan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyakarat desa kita masing-masing. Nanti dikontrol sama orang BPBD (Milyatullah, 2018)."*

Respon balik yang diberikan oleh masyarakat berupa penilaian terhadap acara dan pesan komunikasi yang disampaikan BPBD Kabupaten Serang. BPBD Kabupaten Serang menerima respon masayarakat untuk bahan evaluasi internal BPBD. Dengan demikian program yang dibuat berikutnya diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada program koordinasi, evaluasi dan pengontrolan yang dilakukan dengan melakukan pengontrolan ke lapangan serta di lanjutkan dengan rapat internal.

4.5.5. Aktor Komunikasi Risiko Pengurangan Bencana

Penelitian ini berfokus pada kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Komunikasi pengurangan risiko banjir perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah kerugian serta korban jiwa akibat terjadinya bencana banjir. Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir diselenggarakan oleh lembaga nasional khusus penanggulangan bencana yaitu Bandan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) serta lembaga serupa yang berada disetiap daerah yang merupakan lembaga yang berada dibawah naungan BNPB, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang didalamnya terdapat sub bagian Pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan, memiliki tugas salah satunya melakukan kegiatan komunikasi pengurngan risiko bencana banjir. Kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana dilakukan dengan tujuan umum yaitu mengurangi jumlah dampak yang ditimbulkan akibat bencana bajir, baik korban jiwa maupun materiil. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan narasumber keempat:

> *"Iya, kan kita sub bidang pengurangan risiko bencana. Program kerja kami pengurangan risiko bencana." (Maman, 2018).*

Dalam menjalankan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, BPBD Kabupaten Serang tidak bekerja sendiri. BPBD Kabupaten Serang sebagai lembaga *leading sector*, juga bertugas mengkoordinir pihak-pihak yang dibutuhkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Seperti makna yang tersirat dalam gambar segitiga biru pada logo BPBD, yang melambangkan kerjasama dan sinergisitas antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, terdapat beberapa pihak, lembaga, maupun instansi yang terlibat dalam keberlangsungan kegiatan pengurangan risiko bencana, yang selanjutnya disebut sebagai aktor komunikasi pengurangan risiko bencana.

Aktor komunikasi pengurangan risiko bencana atau komunikator pengurangan risiko bencana pada dasarnya merupakan semua orang,

kelompok atau instansi yang berkomunikasi guna mengupayakan pengurangan risiko bencana. Aktor dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang dapat dilihat dari beberapa kegiatan komunikasi baik kegiatan formal maupun non formal yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Serang.

Kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang terbagi menjadi dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan komunikasi formal dan non formal. Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir diawali dengan mengajukan program kerja kepada BAPPEDA untuk kemudian dibahas kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Barulah setelah melalui pembahasan oleh pemerintah melalui BAPPEDA, program kerja BPBD Kabupaten Serang di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Seperti yang dijelaskan oleh narasumber 4 mengenai proses penyusunan program kerja:

> *"Kita survei dulu apa yang dibutuhin masyarakat, ada timnya. Internal kita juga evaluasi program. Semua itu akan jadi acuan pengusulan program periode mendatang. Kita mengusulkan kepada Bapak (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang), nanti beliau mengkaji bersama pejabat lainnya, terus diajukan kepada BAPPEDA. Nanti muncul di DPA. Berapa anggaran, fasilitas, berapa desa dan lain-lainnya (Setianingsih, 2018)*

Pelaksanaan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan risiko akibat bencana banjir. Dalam setiap kegiatan PRB, masyarakat selalu aktif ikut terlibat didalamnya. Sebagai salah satu bentuk respon baik yang diberikan masyarakat terhadap BPBD Kabupaten Serang ditunjukkan dengan kesediaan

masyarakat menjadi relawan bencana binaan BPBD Kabupaten Serang. Masyarakat turut mendukung kegiatan komunikasi PRB yang diselenggaran oleh BPBD Kabupaten Serang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Narasumber 3 mengenai keterlibatan masyarakat:

> *"Masyarakat jelas terlibat, agar masyarakat menjadi penyelamat diri sendiri dan orang sekitarnya. Masyarakat juga yang kenal daerah mereka sendiri kan. Ya kita melatih lah (Setianingsih, 2018)".*

Masyarakat menerima pesan komunikasi yang disampaikan melalui pelaksanaan kegiatan program kerja oleh BPBD Kabupaten Serang. Pesan komunikasi yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Serang disesuaikan dengan lokasi pelaksanaan kegiatan. BPBD Kabupaten Serang memprioritaskan masyarakat terdampak bencana banjir menjadi dalam pelaksanaan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Tujuan utama pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Serang adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan sumber daya manusia dalam penanganan bencana. Masyarakat desa yang menjadi sasaran program kerja komunikasi PRB dilatih untuk dapat mengenali gejala dari segala jenis bencana yang memungkinkan dapat terjadi di daerahnya. Kemudian masyarakat dilatih untuk dapat berkoordinasi pada saat penanganan bencana, juga menjadi SDM yang handal dalam penanganan pertama ketika terjadi bencana. Masyarakat menerima pesan komunikasi kemudian merespon dengan berbagai keterlibatannya dalam kelompok binaan BPBD Kabupaten Serang. Seperti yang disampaikan Narasumber 7:

> *"Iya kami masyarakat yang terkena banjir. Kalo banjir mah ya, daerah sini udah sering. Kita dilatih buat bisa nanganin masyarakat kalo ada*

banjir. Pertolongan pertama kalo terjadi banjir gitu neng. Perdesa diambil beberapa orang aja, nggak semuanya diambil, Kepala desa sama sekdes wajib. Yang udah jadi perwakilan warga itu nanti yang jadi relawan. Jadi nanti mereka yang nyampein ke warga yang lainnya lagi begitu neng." (Rusmana, 2018).

Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam bidang penanggulangan bencana yang bekerja secara ikhlas untuk kegiatan penanggulangan bencana (Undang-undang No. 17 Tahun 2011). Pada mulanya relawan dibentuk atas azas pemanfaatan oleh BNPB, setelah tahun 2011, ditetapkan Undang-undang mengenai relawan.

Sebagai relawan, masyarakat diberi bekal untuk dapat menangani keresahan mengenai isu-isu kebencanaan yang berkembang dimasyarakat, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan penyediaan informasi. Selain itu, masyarakat juga dilatih untuk turut serta dapat menangani keadaan darurat, melakukan tindakan cepat menghadapi bencana.

"Kami dilatih untuk dapat menjadi pioneer utama dalam penanganan bencana di daerah kami. Kan kami orang-orang yang ada di daerah, kami orang-orang yang paham daerah kami, ya kami dilatih untuk bisa menanggulangi bencana, seperti membuat dapur umum, membuat jalur evaluasi, mengenali debit air, ya banyak mba (Milyatullah, 2018)."

Masyarakat tergabung dalam kelompok relawan dan kelompok lain bentukan BPBD Kabupaten Serang guna menyukseskan pengurangan risiko bencana. Organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat tidak terlibat aktif dalam kegiatan PRB. Ormas dan LSM aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana saat terjadi bencana. Hal ini juga sesuai dengan yang diutarakan narasumber 2:

> *"Oh buat kelompok masyarakat mah ya paling kelompok relawan neng, atau kelompok masyarakat siaga bencana. Ya kelompok-kelompok bentukan kita. Kalo ormas atau LSM itu mereka berpartisipasinya ketika tanggap darurat, bukan di pra tapi lebih di saat bencana (Darmawan,2018)."*

Strategi BPBD dalam pelaksanaan setiap kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir adalah dengan menggunakan komunikasi partisipatori. Komunikasi yang terjadi secara dua arah yang terjalin antara berbagai elemen komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan BPBD Kabupaten Serang merupakan salah satu bentuk komunikasi partisipatori. Selain itu, strategi yang digunakan BPBD Kabupaten Serang dalam penyampaian pesan komunikasi adalah dengan menyasar masyarkat yang terdampak bencana. BPBD Kabupaten Serang banyak memiliki program kerja yang berbentuk sosialiasi, hal ini merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang untuk menarik simpati dan membangun kesadaran (*awareness*) masyarakat. hal ini dilakukan untuk memunculkan respon masyarakat berupa kesediaannya terlibat menjadi relawan binaan BPBD Kabupaten Serang.

> *"Kami rutin melakukan sosialisasi dan biasanya yang kami prioritaskan itu masyarakat terdampak bencana yang zona wilayahnya udah masuk rawan bencana. Kenapa begitu? Karena kami ingin membangun kesadaran. Kesadaran itu biasanya gampang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana karena mereka merasakan langsung bagaimana dampak terjadinya bencana didaerah mereka. (Kusuma, 2018)"*

Komunikasi partisipatori yang dijalankan BPBD Kabupaten Serang merupakan komunikasi dua arah yang melibatkan berbagai elemen dalam menjalankan program komunikasi PRB. Selain menjadikan relawan sebagai

salah satu strategi penyampaian pesan komunikasi PRB, BPBD Kabupaten Serang juga melibatkan orang yang berpengaruh di lingkungannya untuk membantu menyampaikan pesan komunikasi.

Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas, namun dalam menyampaikan pesan komunikasi PRB, semua masyarakat Kabupaten Serang harus menerimanya. Dalam hal ini, media massa berperan menyebarluaskan pesan komunikasi PRB. BPBD Kabupaten Serang, sehingga pesan komunikasi sampai kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Serang. Media massa turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan PRB yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Serang, dengan meliput dan menyebarluaskan pesan komunikasi PRB. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Narasumber 3 mengenai penyebarluasan pesan komunikasi:

> *"Terlibat, media biasanya publikasi ya. Dibeberapa kegiatan kita undang media untuk meliput kegiatan kita, Tapi biasanya suka tau aja gitu ada yang tahu-tahu datang wartawan ngga diundang juga. Kita juga bikin laporannya kan nanti kalo ada acara, nah terus nanti dipublikasi di website kita, di kirim juga ke grup yang ada wartawan nya nanti wartawan baru publikasi ke medianya. Kita memanfaatkan media sosial juga sih, kaya facebook, ada juga whatsapp khusus milik BPBD Kabupaten Serang (Darmawan, 2018)."*

Media massa turut terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Media massa berperan dalam menyebar luaskan informasi pengurangan risiko bencana banjir. Media massa disertakan dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir karena hal ini merupakan salah satu strategi dari BPBD Kabupaten Serang untuk menjangkau masyarakat Serang secara luas. BPBD Kabupaten Serang menjalin hubungan

baik dengan beberapa media massa lokal dan nasional, kemudian dihimpun dalam satu grup media sosial whatsapp. Hubungan yang dijalin tidak sebatas jika ada kegiatan atau berita, pihak humas BPBD Kabupaten Serang juga selalu menjalin hubungan baik dengan media *(media relation)* dengan rutin mengundang media datang untuk bersilaturahmi.

> *"Kalo pers, ada grupnya mba. BPBD Kabupaten Serang menghimpun. Banyak media di grup. Jadi kalo undangan itu ya lewat grup, nggak cuman PRB mba. Terlebih saat bencana ya. Kita juga ngundang untuk dateng di apel kesiapsiagaan ya (Maman, 2018)."*

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Narasumber 3:

> *"Kita punya grup whatsapp yang berisi pers dari tiap media, ada lokal ada nasional. Jadi nanti mereka bisa menyebarluaskan pesan yang kita buat. ini strategi juga. Biar gak cuma satu desa yang terjangkau gitu. Kita juga masiv di media sosial (Setianingsih, 2018)."*

Salah satu bentuk dari pelaksanaan program kerja BPBD Kabupaten Serang ialah keterlibatan BPBD Kabupaten Serang dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Banten. Forum PRB beranggotakan berbagai macam elemen yang terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko bencana. Forum PRB beranggotakan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga non-pemerintah yang tergabung dalam forum PRB seperti industri, media massa, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum Provinsi Banten.

Forum PRB Provinsi Banten digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD Kabupaten Serang turut serta berpartisipasi dalam forum tersebut dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan akibat bencana banjir. PRB

sebagai salah satu bentuk penanggulangan bencana banjir, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, uatamanya dari tiga elemen yang terdapat dalam logo segitiga berwarna biru pada logo BPBD yang bermakna perlindungan dan tiga elemen yang bekerja sama dalam mengupayakan penaggulangan bencana, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. FPRB menjadi salah satu wadah untuk menjalin kerjasama dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Forum PRB yang didalamnya terdapat berbagai elemen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, BPBD tiap Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten dan perwakilan Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) Provinsi Banten. Juga terdapat keterlibatan Swasta seperti, perwakilan Industri yang ada di Provinsi Banten, juga terdapat perwakilan masyarakat yang direpresentasikan dengan adanya relawan BPBD, PMI, dan TAGANA. Terdapat pula LSM, dan Ormas. Hal ini serupa dengan yang dijelaskan oleh Narasumber 2 mengenai forum PRB:

> *"Kita sebisa mungkin melibatkan pihak-pihak terkait. Seperti lambang BPBD ya segitiga warna biru, itu maksudnya ada kerjasama, kesinambungan antara pemerintah, swasta salah satunya industri, dan masyarakat. Sudah ada forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Provinsi Banten yang melibatkan pemerintah, dunia usaha,PMI, TAGANA, Relawan masyarakat. Jadi tu bukan lembaga tandingan, tapi lembaga di bawah BPBD yang dikoordinir. Pengurusnya juga dari perwakilan masing-masing lembaga, ada orang BPBD juga didalamnya, pemerintah, masyarakat (Darmawan, 2018)."*

Salah satu elemen yang terdapat dalam forum PRB adalah Industri. Industri terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Keterlibatan industri salah satunya melalui forum PRB. Beberapa industri

yang terdapat di Kabupaten Serang terlibat dalam FPRB Provinsi Banten dengan tujuan mengkoordinir industri dan beberapa elemen lainnya. Industri turut tergabung dalam forum PRB karena industri turut menyumbang limbah yang bisa merusak lingkungan jika tidak dibuang sesuai dengan aturannya. Industri juga menjadi pengguna lahan yang tidak sedikit. Seperti yang disampaikan oleh Narasumber 2 mengenai Forum PRB:

> *"Terkhususnya industri-industri kimia harus terlibat, khususnya seperti di Bojonegara, Puloampel, di kragilan juga ada tuh. Pengurus-pengurusnya di forum banyak dari pengusaha di perusahaan tersebut (Darmawan, 2018)."*

Namun sayangnya FPRB Kabupaten Serang belum terberntuk hingga saat ini. Program kerja tahun 2018, belum turut melibatkan industri untuk berperan langsung dalam program kerja pengurangan risiko bencana. Namun telah ada bahasan untuk pembentukan FPRB Kabupaten Serang untuk membuat lebih efektiv dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah untuk mengkoordinir CSR dari setiap anggota industri yang terlibat. Meski demikian, industri sudah aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana ketika terjadi bencana (tanggap darurat). Seperti yang dijelaskan oleh narasumber 4 mengenai rencana pembentukan FPRB KabupatenSerang:

> *"FPRB Kabupaten Serang belum terbentuk ya untuk saat ini, sudah ada bahasan tapi belum terealisasi. Kita sampai saat ini terlibat dalam FPRB Provinsi Banten,berkoordinasi dengan pengurus FPRB Provinsi Banten terus ya (Maman, 2018)."*

Selain dalam forum PRB, industri juga melakukan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilingkungannya sendiri dalam Kelompok Tim Koordinasi Tanggap Darurat (TKTD). TKTD merupakan kelompok

buatan BPBD Kabupaten Serang yang beranggotakan perwakilan industri-industri dan perwakilan relawan BPBD, dengan tujuan melakukan komunikasi dan kegiatan PRB dilingkungan (zona) masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan komunikasi PRB tidak disertai dengan keterlibatan akademisi didalamnya. Kaum akademisi lebih banyak berperan dalam kegiatan penanggulangan saat terjadinya bencana atau tanggap darurat, yaitu dengan berperan dalam kelompok organisasi mahasiswa. Seperti yang dijelaskan oleh Narasumber 2 mengenai keterlibatan akademisi:

> *"Kalo mahasiswa biasanya ada neng, pas terjadi bencana, jadi bukan di pra. Kaya ikut memberi bantuan (Darmawan, 2018)"*

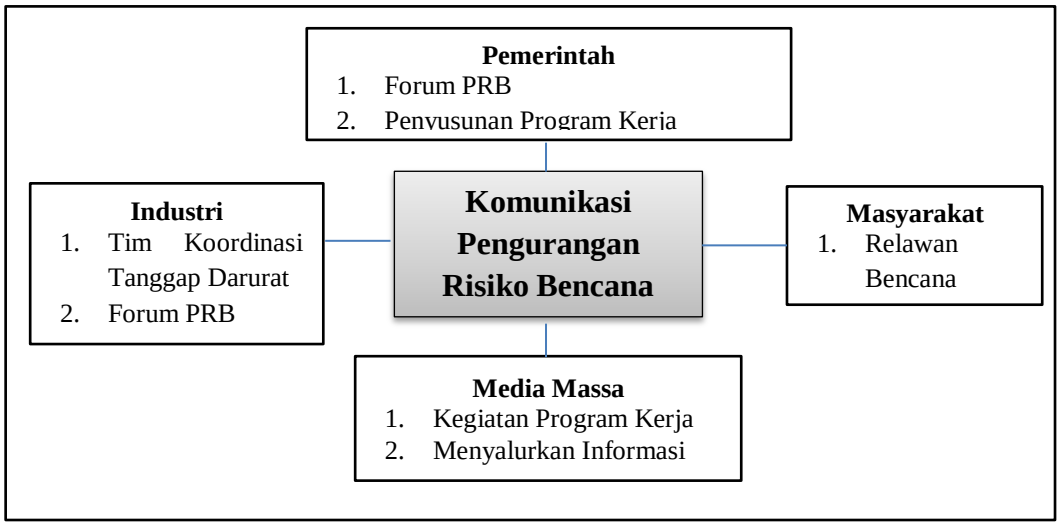

Gambar 4.4 Aktor Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

4.6. Pembahasan

Analisis data dilakukan peniliti setelah melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dengan teknik partisipasi

pasif, dan studi dokumen yang kemudian dianalisis berdasarkan identifikasi masalah dan tinjauan pustaka. Kegiatan analisis data yang dilakukan oleh peneliti ditinjau berdasarkan hasil penelitian yang kemudin diinterpretasikan ke dalam analisis model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center..

Dalam penelitian "Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang" ini, peneliti melihat bagaimana penyelenggaraan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang sebagai badan penyelenggara. Penyelenggaraan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, salah satunya dilakukan melalui program kerja BPBD Kabupaten Serang. Program kerja yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir salah satunya adalah program kerja Desa Tangguh.

Berikut adalah gambaran yang berisi ringkasan mengenai kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang dengan mengunakan analisis model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center:

4.6.1. Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Melalui Program Sosialisasi dan Pembentukan Relawan Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Cikeusal

Pengurangan risiko bencana dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang sebagai badan penyelenggara penanggulangan bencana alam dengan menjalankan program kerja yang termuat dalam DPA. Salah satu program kerja yang dilaksanakan dalam rangka komunikasi pengurangan risiko bencana banjir adalah Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana merupakan

salah satu program kerja pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang yang dilaksanakan dalam upaya mempersiapkan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana lebih siap siaga menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadinya bencana. Program ini dilaksanakan disetiap tingkat Desa/Kelurahan terutama pada daerah rawan bencana. BPBD Kabupaten Serang berupaya menjadikan suatu desa menjadi desa yang mandiri dalam menghadapi ancaman bencana.

Masyarakat menjadi pihak yang pertama dan utama dalam penanggulangan bencana sebelum datangnya bantuan dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta. Destana dirintis untuk dapat meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui peran aktif masyarakat atau partisipasi masyarakat dengan menggunakan pendekatan dan metode yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek penanggulangan bencana.

Pada tanggal 24 Juli 2018 telah dibentuk Desa Tangguh Bencana di 4 Desa di Kecamatan Cikeusal, yaitu Desa Panosogan, Desa Gandayasa, Desa Panyabrangan dan Desa Katulisan. Pembentukan Destana di empat Desa di Kecamatan Cikeusal ini karena empat Desa tersebut masuk kedalam daerah rawan bencana Kabupaten Serang dan dinilai lebih sering terjadi bencana khususnya bencana banjir akibat luapan sungai Ciujung. Pembentukan Destana juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana banjir. Destana dilaksanakan dalam proses sosialisasi dan pembentukan pengurus Destana (relawan bencana).

a. Penemuan Fakta, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Program Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Cikeusal

Proses komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dalam kegiatan Destana menurut Cutlip dan Center dalam Cangara (2017: 72-73) dilakukan dengan penemuan fakta komunikasi, perencanaan, pelaksanaan komunikasi, dan evaluasi. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, seperti program Destana ini, terlebih dahulu harus melihat keadaan objektif yang sedang terjadi saat ini melalui penemuan fakta (*fact finding*). Penemuan fakta bertujuan untuk mengetahui keadaan dimasyarakat atau sasaran komunikasi.

Melihat dari program Destana di Kecamatan Cikeusal, proses penemuan fakta (*fact finding*) hanya dilakukan oleh Pemerintah, sebagai penyelenggara program Destana. Proses perencanaan terlihat pada tahap survei hingga pengajuan program Destana. Menurut Cangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, Langkah-langkah perencanaan komunikasi (Cangara, 2017: 72-73) diawali dengan mendefinisikan masalah atau peluang (analisis situasi). Kegiatan Sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana melalui program Destana, melalui proses analisis situasi dalam dua tahap. Pertama penemuan fakta daerah rawan bencana melalui pembuatan Masterplan peta rawan bencana Kabupaten Serang. Proses perkiraan yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang mendata daerah-daerah rawan bencana banjir beserta jumlah korban jiwa dan kerugian akibat bencana banjir serta kelengkapan data lainnya yang

mendukung pembuatan peta rawan bencana banjir. Peta rawan bencana banjir dibuat dengan model setiap Kecamatan di Kabupaten Serang. *Masterplan* peta rawan bencana banjir salah satunya digunakan untuk menentukan daerah sasaran program kegiatan pengurangan risiko bencana banjir BPBD Kabupaten Serang. Berdasarkan data yang ada, dilakukan perhitungan daerah yang paling membutuhkan tindakan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir hingga desa yang tidak terlalu terdampak bencana. berdasarkan perhitungan tersebut, kemudian program Destana dipilih menjadi salah satu program, pengurangan risiko bencana banjir.

Selanjutnya, proses penemuan fakta dilakukan dengan survei daerah sasaran program Destana. Survei ini merupakan salah satu cara untuk menjawab pertanyaan “apa yang sedang terjadi saat ini?”. Survei dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh bagian pencegahan dan kesiapsiagaan. Survei akan mendapatkan hasil mengenai keadaan masyarakat, fasilitas, dan informasi lain yang mendukung pemilihan desa yang tepat dalam satu Kecamatan yang dipilih menjadi sasaran komunikasi.

Proses setelah penemuan fakta yaitu membuat rencana komunikasi. Membuat rencana dan penyusunan program (strategi) mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama dalam kebijakan dan program organisasi. Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang tujuan

komunikasi, publik program, tindakan, serta strategi (Cutlip, Center, dan Broom, 2005 : 268).

Pada program Destana, dilakukan perencanaan komunikasi dengan menentukan tujuan komunikasi. Tujuan pelaksanaan program Destana adalah untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir di Kecamatan Cikeusal, khususnya Desa Panosogan, Gandayasa, Katulisan, dan Panyabrangan. Selain itu tujuan khusus pelaksanaan program Destana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, para pemangku kebijakan peduli PRB, serta masyarakat.

Selanjutnya penyusunan publik program, publik atau sasaran komunikasi dari program Destana. Sasaran dari program Destana merupakan masyarakat desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Cikeusal. Desa yang dipilih yaitu Desa Panyabrangan, Katulisan, Panosogan, dan Gandayasa.

Penetuan tindakan pada program Desatana, terdiri dari tiga kegiatan utama. Karena tujuan utama pelaksanaan program iniadalah untuk

menciptakan kemandirian dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, maka disusun tiga kegiatan dalam program Destana. Pertama, sosialisasi yang berisi kegiatan pengedukasian masyarakat desa mengenai kebencanaan. Selanjutnya, simulasi menghadapi bencana banjir, serta penanganan korban bencana. Terakhir, pembentukan pengurus Destana yang merupakan relawan bencana masing-masing Desa. Orang-orang ini yang nantinya akan menyampaikan pesan komunikasi yang telah didapatnya dalam simulasi dan sosialisasi oleh BPBD Kabupaten Serang.

Langkah terakhir dalam proses perencanaan yaitu penentuan strategi. Strategi utama pelaksanaa kegiatan Destana yaitu komunikasi partisipatif. BPBD mengupayakan komunikasi partisipatif dengan pengurus Destana masing-masing desa untuk memperluas area jangkauan pesan komunikasi. Selain itu, relawan bencana Destana juga dapat menjadi sumber informasi mengenai keadaan disetiap desa jika terjadi bencana banjir. Selain itu, strategi yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Serang yaitu melibatkan tokoh masyakat dalam penyampaian pesan komunikasi Destana. Tokoh masyarakat yang dilibatkan yaitu tokoh masyarakat formal dan informal, dalam hal ini yaitu Bapak Camat dan Lurah masing-masing desa yang menjadi tokoh formal, dan masyarakat yang dituakan di Kecamatan Cikeusal sebagai tokoh informal.

Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan komunikasi. Pelaksanaan komunikasi mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan

komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada tahap ini terdapat pembahasan komponen-komponen komunikasi.

Pelaksanaan program Destana dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dan pelantikan pengurus Destana dari empat Desa yang termasuk dalam kategori rawan banjir di Kecamatan Cikeusal. Selain mitigasi, isi pesan dari kegiatan Destana ini juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengasah kreativitas dengan merawat dan memanfaatan lahan dan sumber daya alam di Desa masing-masing untuk mengurangi risiko bencana banjir.

Pelaksanaan kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi semua pihak terutama masyarakat Desa, karena melalui kegiatan ini masyarakat jadi lebih sadar dan siap siaga dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana banjir di masa yang akan datang. Sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir atau mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana banjir. Karena dalam mengatasi bencana banjir, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam menanggulanginya, akan tetapi faktor terbesar adalah dari masyarakat sendiri. Perlu kesadaran yang besar bagi tiap-tiap individu dalam menjaga dan menyayangi lingkungannya.

Sosialisasi dan pembentukan Destana yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang ini sifatnya hanya sebagai pengkoordinasian, artinya BPBD Kabupaten Serang hanya bertugas sebagai koordinator yang

memberikan pengarahan, menetapkan pedoman, menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir kepada pengurus Destana masing-masing Desa tersebut. Namun tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir masih menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Serang. BPBD Kabupaten Serang tetap memastikan pesan komunikasi sampai kepada masyarakat Desa secara keseluruhan.

Dalam proses pelaksaan, panitia pelaksana juga menyiapkan media pendukung yang digunakan dalam menyampaikan pesan komunikasi. Media pendukung yang disiapkan panitia pelaksana yaitu berupa brosur yang berisikan pesan tentang penyebab banjir, tata cara yang dilakukan pada saat banjir, serta persiapan menghadapi banjir. Brosur tersebut digunakan untuk mempermudah penyampaian pesan komunikasi, walaupun isi pesannya tidak mencakup semua pesan komunikasi dalam program Destana.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan pelantikan pengurus Destana masing-masing Desa selesai dilakukan, BPBD Kabupaten Serang melakukan evaluasi dan pengontrolan. Evaluasi atau pengendalian yang dilakukan merupakan evaluasi kegiatan sosialisasi Destana yang diselenggarakan melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan Destana. Tujuan utama fungsi pengendalian adalah, agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Pengendalian merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya,

mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setelah itu dapat ditentukan, apakah strategi komunikasi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Selain itu, pengontrolan terhadap pesan komunikasi dalam program Destana juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah dengan pengurus Destana masing-masing Desa. Pengurus Destana tiap-tiap Desa tergabung dalam kelompok relawan bencana binaan BPBD Kabupaten Serang. Pengontrolan juga dilakukan dengan meninjau ulang daerah-daerah yang sudah menjadi Destana dan memiliki pengurus Destana. Peninjauan ulang dilakukan dengan tujuan melakukan pengontrolan apakah pesan komunikasi sudah tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

b. Aktor Komunikasi Destana di Kecamatan Cikeusal

Destana beranggotakan beberapa masyarakat dalam satu desa. Destana-destana dalam Kecamatan Cikeusal saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana banjir. BPBD Kabupaten Serang memberi pembinaan kepada pengurus Destana setiap desa, selanjutnya pengurus Destana yang menyalurkan informasi kepada masyarakat desa masing-masing. Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam proses penyaluran informasi Destana ini.

Terdapat beberapa aktor komunikasi yang terlibat dalam program Destana. Pertama, Pemerintah yang direpresentasikan oleh BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara program Destana. Pemerintah Daerah beserta OPD Kabupaten Serang juga terlibat dalam proses perencanaan program Destana. Selain lembaga Pemerintahan, media massa juga turut terlibat dalam program Destan. Media massa terlibat dalam penyampaian pesan komunikasi PRB. Media massa diundang oleh BPBD Kabupaten Serang untuk meliput proses pelaksanaan program Destana untuk kemudian disebar luaskan kepada masyarakat Kabupaten Serang secara luas.

Masyarakat juga terlibat dalam program Destana. Masyarakat sebagai penerima pesan komunikasi, kemudian memberikan respon dengan turut terlibat dalam kepengurusan Desa Tangguh Bencana. Pengurus Destana disebut sebagai relawan bencana. Mereka memiliki tugas sebagai komunikator bagi masyarakat di Desanya, selain itu juga merawat alat-alat siaga bencana.

Jika melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikai risiko yang dikemukakan oleh Wiliam Leiss dalam Crowley dan Mitchell (1944), ada beberapa unsur yang tidak terlibat dalam proses komunikasi program Destana. Komunikasi risiko yang efektif menurut Leiss melibatkan lima unsur dalam pelaksanaannya. Kelima unsur tersebut diantaranya, Pemerintah, Industri, Media massa, Akademisi, dan Masyarakat. Dalam program Destana hanya melbatkan 3 dari 5 unsur yang ada, yaitu

Pemerintah, Media massa, dan masyarakat. Unsur industri dan akademisi tidak terlibat dalam proses komunikasi PRB dalam program Destana. Hal ini karena unsur industri dan akademisi belum banyak melibatkan diri dalam proses pra bencana, mereka lebih banyak terlibat dalam proses saat terjadinya bencana.

Berdasarkan prinsip komunikasi risiko yang diungkapkan oleh Leiss, pesan komunikasi dirumuskan sesuai dengan analisis khalayak penerima pesan komunikasi. Pesan komunikasi dalam program Destana dirumuskan melalui beberapa proses yaitu survei lapangan, evaluasi program Desatana di Desa lain yang telah terbentuk, lalu dirumuskan oleh bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang. Sedangkan pemilihan khalayak dalam program Destana, BPBD Kabupaten Serang memilih 4 desa di Kecamatan Cikeusal yang termasuk dalam desa rawan bencana banjir yang dimuat dalam masterplan peta rawan bencana banjir BPBD Kabupaten Serang 2017. Kecamatan Cikeusal dipilih karena merupakan salah satu Kecamatan yang dilewati aliran sungai Ciujung, salah satu Daerah Aliran Sungai yang menjadi prioritas program pengurangan risiko bencana banjir.

Dalam kaitannya dengan prinsip komunikasi risiko selanjutnya yang melibatkan pakar ilmiah. Program Destana Kecamatan Cikeusal yang digagas oleh BPBD Kabupaten Serang, pengkaji risiko tidak dilakukan oleh pakar ilmiah. Salah satu tujuan dari adanya keterlibatan pakar ilmiah seperti akademisi adalah untuk membantu melakukan pengkajian risiko.

Namun sayangnya dalam program Destana ini, akademisi tidak terlibat dalam proses pengkajian risiko.

Prinsip berikutnya, menciptakan keahlian dalam berkomunikasi. Dalam hal ini komunikator program Destana harus dipersiapkan untuk dapat menyampaikan pesan komunikasi sesuai dengan yang dirancang. Komunikator program Destana yang menyampaikan pesan kepada para calon pengurus Destana Cikeusal adalah BPBD Kabupaten Serang. BPBD Kabupaten Serang menyiapkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya untuk menyampaikan pesan komunikasi risiko, diantaranya yaitu para pimpinan Bidang dan Sub Bidang serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang. Selain itu, komunikator yang juga dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Serang dalam menyebarluaskan pesan komunikasi risiko ialah para pengurus Destana di Kecamatan Cikeusal. Para pengurus dari empat Desa tersebut berperan sebagai penyambung pesan komunikasi dari BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat Desanya, seperti pelatihan penanggulangan bencana, informasi cuaca, informasi kebencanaan hingga bagaimana menanggulangi bencana ketika terjadi bencana banjir.

Menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya juga merupakan juga prinsip komunikasi risiko. Menilik kedalam program Destana, pihak peenyampai pesan atau komunikator selain kompeten juga harus dapat dipercaya. BPBD Kabupaten Serang sampai saat ini merupakan pihak yang memiliki kredibilitas dimata masyarakat Desa karena

penanggulangan bencana merupakan bidang penyelenggaraan BPBD Kabupaten Serang. Selain itu, BPBD Kabupaten Serang melibatkan tokoh masyarakat formal yaitu masing-masing Sekertaris Desa untuk bergabung dalam kepengurusan Destana. Hal ini dipersiapkan BPBD Kabupaten Serang untuk membuat Destana memiliki kredibilitas, dan Destana merupakan sumber informasi satu-satunya di Desa dalam hal informasi kebencanaan.

Terakhir, keterbukaan dan tanggung jawab bersama. Dalam program Destana, tanggung jawab terhadap program Destana bukan hanya tanggung jawab BPBD dalam tingkat Kabupaten saja, tetapi juga tanggung jawab Pengurus Kecamatan, Pengurus Desa, dan Pengurus Destana serta masyarakat Desa masing-masing.

Program Destana yang juga merupakan program pendukung dalam pengurangan risiko bencana banjir yang dicanangkan oleh BPBD Kabupaten Serang terlaksana dengan berbagai keterlibatan aktor komunikasi. Keterlibatan 3 aktor utama dalam program Destana, yaitu Pemerintah, Media Massa dan Masyarakat, masing-masing memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam proses penyampaian pesann komunikasi. Keterlibatan Pemerintah dalam program Destana adalah sebagai perancang pesan komunikasi dan penyelenggara program Destana. Hal ini terlihat dalam proses perancangan pesan komunikasi yang dirumuskan oleh tim PRB BPBD Kabupaten Serang hingga dianalisis oleh Pemerintah Daerah. Kemudian, keterlibatan media massa

dalam program Destana sebagai penyalur pesan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Serang secara luas. Hal ini terlihat dalam proses penyebarluasan pesan komunikasi Destana Kecamatan Cikeusal melalui media massa lokal yaitu Radar Banten, dan dimuat dalam berita online Radar Banten. Sedangkan peran masyarakat dalam program Destana dapat dilihat dari keterlibatannya dalam kepengurusan Destana, pengurus Destana yang didominasi oleh masyarakat Desa secara umum dan perangkat Desa.

Strategi yang digunakan BPBD Kabupaten Serang merupakan komunikasi partisipatif. Komunikasi yang melibatkan berbagai elemen komunikasi, juga komunikasi yang terjadi bersifat dua arah. Partisipai dari masyarakat dan media massa juga merupakan strategi yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Serang dalam menjalankan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Hal ini dilakukan untuk membuat program Destana yang merupakan salah satu program pengurangan risiko bencana banjir lebih efektif dapat menjangkau masyarakat Kabupaten Serang secara luas.

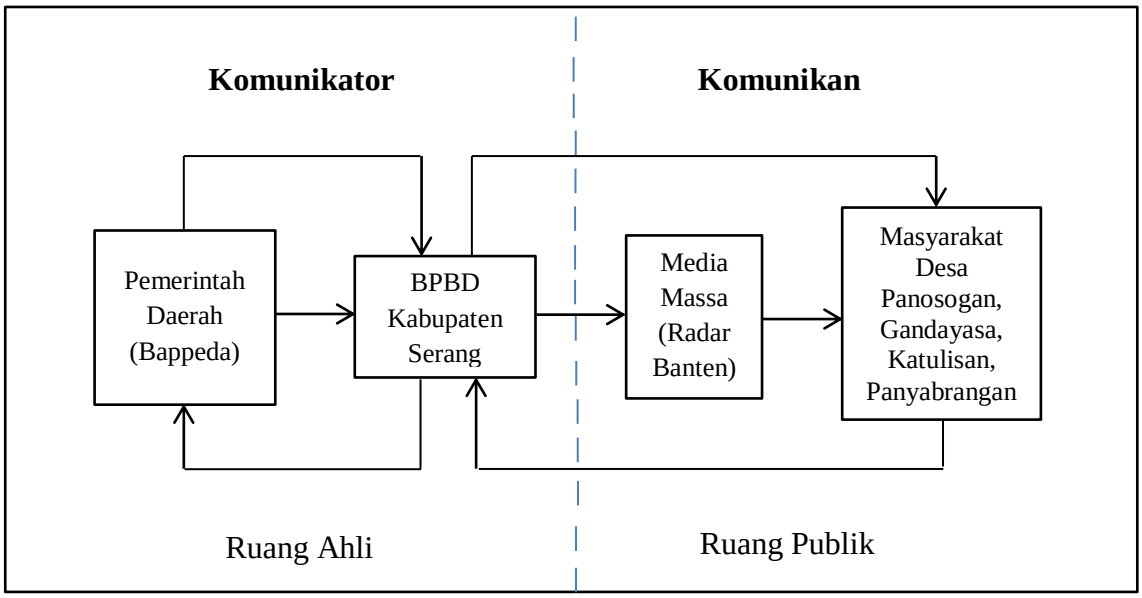

Gambar 4.5 Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana empat Desa di Kecamatan Cikeusal

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018.

4.6.2. Penemuan Fakta Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Langkah pertama dari proses komunikasi pengurangan risiko bencana ini mencakup penyelidikan dan pemantauan pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Pada langkah ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menjadi dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya. Pertanyaan pada tahap ini adalah “apa yang sedang terjadi saat ini?”.

Penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana banjir memerlukan data yang jelas dan terukur. Data mengenai daerah rawan

bencana, curah hujan, jumlah masyarakat, serta riwayat kejadian bencana banjir. BPBD Kabupaten Serang membuat *masterplan* yang berisi data mengenai daerah rawan bencana banjir, statistic jumlah korban bencana banjir, jumlah penduduk setiap daerah dan data fasilitas penanggulangan bencana banjir disetiap kecamatan di Kabupaten Serang. BPBD membuat *masterplan* panduan penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana banjir. *masterplan* dibuat dalam bentuk buku dan di berikan kepada setiap kecamatan di Kabupaten Serang. Masterplan BPBD Kabupaten Serang berbentuk beberapa buah buku yang berisi data mengenai hasil pemantauan daerah rawan bencana di Kabupaten Serang, rencana kontijensi bencana banjir di Kabupaten Serang, serta peta rawan bencana banjir di Kabupaten Serang.

Masterplan membantu BPBD Kabupaten Serang dalam proses perencanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Masterplan yang dibuat diperiode sebelumnya, menjadi acuan pembuatan program kerja diperiode mendatang. Selain melalui acuan data dari *masterplan*, penyusunan program pengurangan risiko bencana banjir juga diawali dengan proses penemuan fakta melalui survei. Proses penemuan fakta atau *fact finding* ini hanya melibatkan BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Proses penemuan fakta melalui survei dilakukan oleh beberapa staff dan pejabat bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang, yang kemudian disebut sebagai tim survei. Proses survei yang

dilakukan BPBD Kabupaten Serang bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan dan masyarakat daerah pelaksanaan program kerja. Target sasaran program kerja BPBD Kabupaten Serang merupakan masyarakat umum Kabupaten Serang terutama masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana, sehingga perlu dilakukan penemuan fakta dilapangan terlebih dahulu dalam menyusun program kerjanya. Survei yang dilakukan mengenai daerah rawan banjir, kebutuhan masyarakat daerah rawan banjir, jumlah korban dan kerugian akibat banjir, kejadian banjir terakhir, intensitas kejadian banjir, dan lain-lain. Survei tersebut bertujuan untuk menentukan program kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penemuan fakta komunikasi menghasilkan informasi yang akan digunakan BPBD Kabupaten Serang untuk menyusun *masterplan* dan program kerja pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang. Informasi yang dihasilkan dalam penemuan fakta untuk pembuatan *masterplan* bencana banjir tersebut terdiri dari jumlah penduduk dari setiap Kecamatan, jumlah pemukiman warga dari setiap Kecamatan, jumlah sarana sosial (sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan), sarana perekonomian (sawah, peternakan, tambak), sarana pemerintahan (kantor camat, kantor desa dan balai desa), rekapitulasi bencana banjir pertahun, jumlah kerusakan sarana prasarana serta korban jiwa akibat banjir pertahun dari tiap Kecamatan, tempat evakuasi sementara yang terdapat di setiap Kecamatan, dan peralatan evakuasi di setiap

Kecamatan. Selain itu, penyusunan program kerja juga memerlukan penemuan fakta terlebih dahulu. Informasi yang dikumpulkan dalam penemuan fakta komunikasi untuk penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Serang antara lain jumlah korban bencana dan kerusakan akibat bencana yang terjadi, jumlah penduduk terdampak bencana banjir, sarana pra sarana penunjang kegiatan evakuasi bencana, serta budaya masyarakat.

Menurut Anne Gregory (2004), dalam buku Perencanaan dan Manajemen Kampanye *Public Relation*, untuk membantu mengenali lingkungan eksternal, digunakan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi). Analisis PEST pada penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Serang dimulai dengan melihat faktor politik.. Faktor politik dalam penyusunan program kerja BPBD Kabupaten terdiri dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, serta peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keduanya merupakan dasar hukum dari penyelenggaraan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

Faktor ekonomi dalam penyusunan *masterplan* dan penyusunan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir adalah ketersediaan jumlah anggaran BPBD Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan

dalam penyusunan program kerja. Selain itu, data kerusakan fasilitas-fasilitas akibat banjir di daerah-daerah Kabupaten Serang juga menjadi salah satu pertimbangan penyusunan *masterplan* dan program kerja, hal ini membantu BPBD Kabupaten Serang dalam menentukan lokasi penyelenggaraan program kerja pada lokasi terdampak terparah.

Faktor sosial dalam penyusunan program pengurangan risiko bencana banjir adalah kondisi geografis setiap daerah rawan bencana di Kabupaten Serang. Hal ini bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan *masterplan* dan juga penentuan lokasi penyelenggaraan program kerja. Selain itu, rekapitulasi bencana banjir di daerah-daerah di Kabupaten Serang beserta potensi penyebabnya juga menjadi faktor sosial yang bertujuan untuk mempermudah penentuan jenis program kerja berdasarkan faktor penyebab kejadian banjir yang paling banyak terjadi.

Selanjutnya faktor teknologi, berupa data ketersediaan bantuan peralatan evakuasi. Hal ini sangat berguna untuk menentukan program yang akan disusun, serta membantu dalam penyediaan bantuan peralatan yang belum tersedia di daerah rawan bencana. selanjutnya ketersediaan tempat evakuasi sementara disetiap daerah rawan bencana banjir. Hal ini penting, karena menjadi salah satu materi yang akan dijelaskan dalam program pengurangan risiko bencana banjir.

Politik	Ekonomi
• UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	• Anggaran dana BPBD Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang • Kerusakan fasilitas-fasilitas akibat banjir di daerah-daerah Kabupaten Serang
Sosial	**Teknologi**
• Faktor geografis setiap daerah rawan bencana di Kabupaten Serang • Rekapitulasi bencana banjir di daerah-daerah di Kabupaten Serang beserta potensi penyebabnya	• Ketersediaan bantuan peralatan evakuasi • Ketersediaan tempat evakuasi sementara disetiap daerah rawan bencana banjir

Gambar 4.6. Analisis Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

Faktor politik dalam penemuan fakta komunikasi yaitu aturan dasar penyelenggaraan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Berdasarkan aturan tersebut, maka BPBD Kabupaten Serang menyelenggarakan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Sedangkan faktor ekonomi terdiri dari dua poin. Pertama, anggaran dana BPBD Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang. maksud. APBD merupakan faktor pendukung terselenggaranya kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Kedua, kerusakan fasilitas akibat banjir didaerah terdampak

bencana. Banyaknya fasilitas masyarakat maupun umum akibat bencana banjir menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar yang menurun, akibat banyaknya kerusakan fasilitas, bahkan kerusakan tempat yang dimanfaatkan menjadi tempat usaha masyarakat.

Faktor sosial dalam penyelenggaraan komunikasi pengurangan risiko bencana banjr adalah kondisi geografis setiap daerah rawan bencana di Kabupaten Serang. Selain itu juga, adanya rekapitulasi bencana banjir di daerah terkait yang menjadikan daerah tersebut dikatakan rawan bencana. Adanya sebutan daerah rawan bencana menyebabkan dampak pada kehidupan sosial masyarakat daerah setempat. Masyarakat menjadi lebih waspada ketika musim penghujan tiba.

Faktor teknologi dari penyelenggaraan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yaitu ketersediaan bantuan peralatan dan tempat evakuasi. Jumlah peralatan dan tempat evakuasi menunjukkan tingkat kelayakan daerah untuk menjadi daerah prioritas penyelenggaraan komunikasi peengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.

4.6.3. Perencanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Perencanaan pada dasarnya dilakukan jauh sebelum suatu kegiatan berlangsung. Perencanaan dibuat untuk dapat mengoptimalkan

pencapaian tujuan yang diharapkan. Perencanaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan manajemen komunikasi bencana. Perencanaan dibuat sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan manajemen komunikasi bencana.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir didahului dengan proses perencanaan. Proses perencanaan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara kegiatan komunikasi PRB. Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang meliputi perencanaan teknis dan non teknis. Proses perencanaan non-teknis dimulai dengan melakukan survei terhadap daerah-daerah rawan banjir yang menjadi target utama pelaksanaan kegiatan komunikasi PRB. Tim yang dibentuk BPBD Kabupaten Serang melakukan survei mengenai daerah rawan banjir, kebutuhan masyarakat daerah rawan banjir, jumlah korban dan kerugian akibat banjir, kejadian banjir terakhir, intensitas kejadian banjir, dan lain-lain. Hasil survei tersebut akan menjadi bahan pertimbangan perumusan program PRB pada rapat internal bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Hingga akhirnya diajukan dan disahkan dalam bentuk DPA.

Persiapan teknis yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang dimulai dengan pembentukan panitia pelaksana. Panitia pelaksana kemudian melakukan persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Persiapan yang dilakukan terdiri dari perumusan konsep, pesan komunikasi, penyampaian pesan, dan pembagian kerja, manajemen anggaran, persiapan lokasi kegiatan serta media pendukung kegiatan dan mitra kegiatan.

Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses, dimulai dengan perkiraan yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang, yaitu melalui proses pembuatan peta rawan bencana, mendata daerah-daerah rawan bencana banjir beserta jumlah korban jiwa dan kerugian akibat bencana banjir. Berdasarkan data yang ada, dilakukan perhitungan daerah yang paling membutuhkan tindakan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir hingga desa yang tidak terlalu terdampak bencana. Perhitungan tersebut kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program dan lokasi kegiatan.

Proses perencanaan dilanjutkan dengan penentuan tujuan, tujuan utama dari setiap kegiatan komunikasi PRB yang dibuat BPBD Kabupaten Serang yaitu untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir di daerah-daerah di Kabupaten Serang. Juga untuk membuat masyarakat Kabupaten Serang menjadi masyarakat yang sadar bencana, dan mandiri dalam penanggulangan bencana. Intinya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Proses perencanaan memerlukan penentuan sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana

banjir. Yang diperlukan dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana banjir antara lain anggaran dana, peralatan dan fasilitas, serta sumber daya manusia. Anggaran dana dalam kegiatan komunikasi PRB bersumber dari pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Serang. Anggaran dana kegiatan diusulkan oleh BPBD Kabupaten Serang kepada Pemerintah daerah melalui BAPPEDA bersamaan dengan pengusulan program kerja.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi komunikasi adalah ketersediaan dana dan fasilitas yang dimiliki lembaga. Pertimbangan dana memang dalam banyak hal menjadi yang paling utama, karena suatu kegiatan komunikasi, bagaimanapun juga pasti memerlukan biaya tertentu. Demikian pula fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu program komunikasi. Maksudnya, dalam hal ini adalah kemudahan-kemudahan dan perangkat sistem yang diperlukan untuk kegiatan yang dimaksud. Menurut informan, sarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Serang masih seadanya bahkan terbilang kurang, namun sarana dan anggaran tersebut cukup mendukung kegiatan yang dilaksanakan BPBD. Hal ini disebabkan karena daerah rawan bencana banjir yang tersebar luas hampir disetiap Kecamatan disekitar tiga sungai besar yang mengalir melintasi di Kabupaten Serang. Hingga saat ini, fasilitas kegiatan komunikasi PRB bersumber dari bantuan BNPB dan BPBD Kabupaten Serang sendiri.

Sumber daya manusia dalam program komunikasi PRB merupakan pejabat dan staff BPBD Kabupaten Serang. Selain itu, BPBD Kabupaten Serang juga memanfaatkan para relawan bencana dan relawan industri untuk membantu menyampaikan pesan komunikasi kepada masyarakat di desa atau wilayahnya.

Aktor komunikasi merupakan orang yang terlibat dalam proses komunikasi sebagai penyampai pesan komunikasi atau komunikator. Jika melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikai risiko yang dikemukakan oleh Wiliam Leiss (1944), komunikasi risiko yang efektif melibatkan lima unsur dalam pelaksanaannya. Menilik dari program komunikasi PRB yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Serang, tidak semua unsur terlibat dalam proses perencanaan komunikasi PRB. Dalam proses perencanaan terdapat beberapa aktor komunikasi yang terlibat. Pemerintah merupakan aktor utama dalam perencanaan komunikasi PRB. Pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang. Dalam proses perencanaan, hanya BPBD Kabupaten Serang dan Pemerintah daerah yang terlibat. Hal ini karena, perencanaan merupakan proses awal dan merupakan persiapan dalam sebuah kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, sehingga hanya melibatkan internal penyelenggara.

Berdasarkan prinsip komunikasi risiko yang diungkapkan oleh Leiss (1994), pesan komunikasi dirumuskan sesuai dengan analisis khalayak penerima pesan komunikasi. Pesan komunikasi dalam dirumuskan

melalui beberapa proses yaitu survei lapangan, evaluasi program kerja yang sudah berjalan, lalu dirumuskan oleh bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang

Khalayak atau sasaran BPBD yang paling mendasar adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada didaerah rawan bencana banjir, seperti masyarakat di daerah dataran rendah ataupun masyarakat yang tinggal didaerah bantaran sungai serta daerah rawan banjir. Selain masyarakat umum Kabupaten Serang, segmentasi BPBD adalah masyarakat industri, karena masyarakat industri juga perlu diberi pemahaman dalam mendukung program pengurangan risiko bencana banjir di lingkungan industrinya.

Dalam kaitannya dengan prinsip komunikasi risiko selanjutnya yang melibatkan pakar ilmiah. Program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang digagas oleh BPBD Kabupaten Serang, pengkaji risiko tidak dilakukan oleh pakar ilmiah. Namun sayangnya dalam program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, akademisi tidak terlibat dalam proses pengkajian risiko perumusan program kerja.

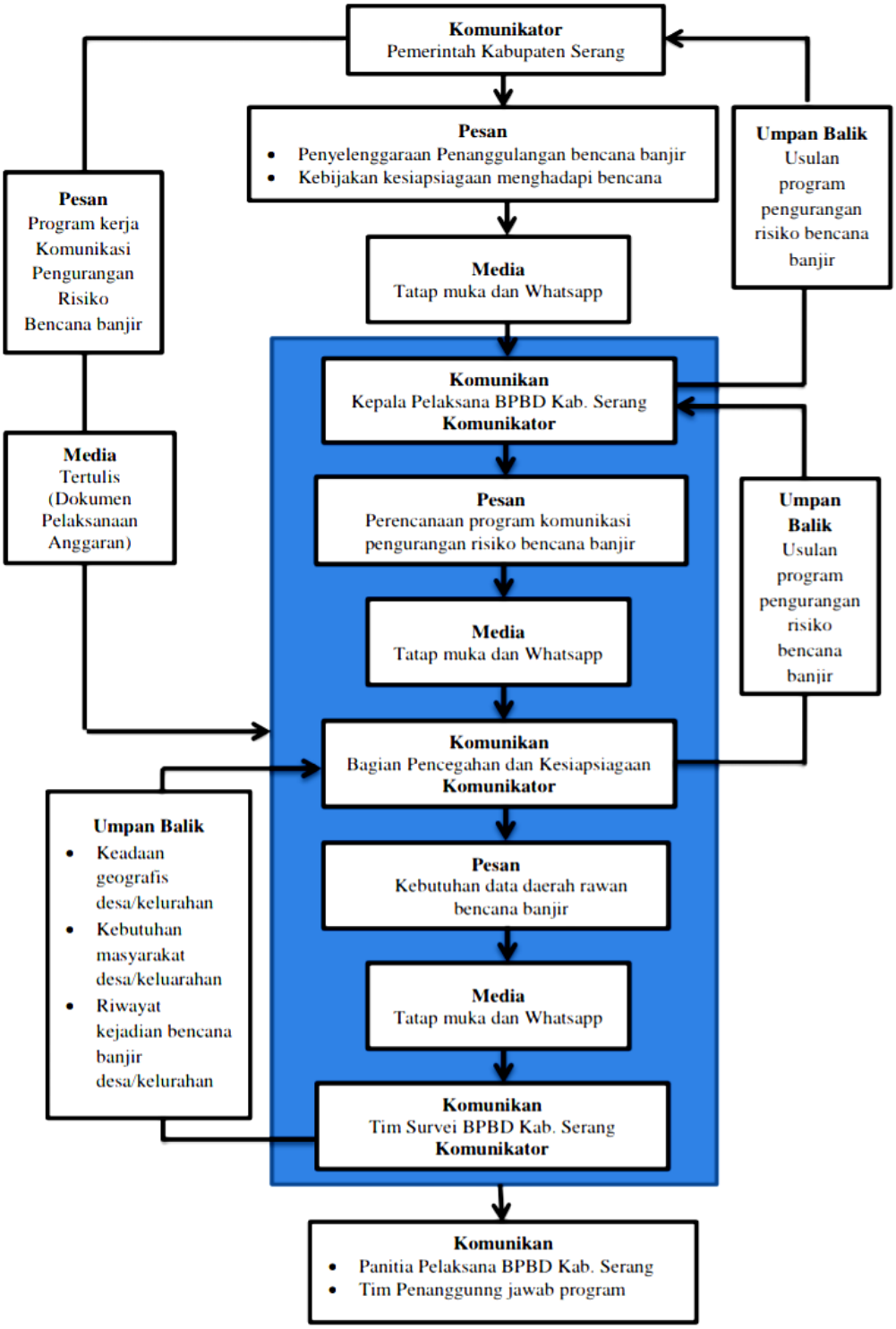

Gambar 4.7 Proses perencanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

4.6.4. Pelaksanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Setelah melakukan analisis situasi dan perencanaan, BPBD Kabupaten Serang dapat menjalankan program kerja pengurangan risiko bencana banjir. Program kerja dijalanan oleh panitia pelaksana. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan proses perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir mengedepankan asas kebermanfaatan bagi semua pihak tidak terutama masyarakat Kabupaten Serang. Salah satunya tujuan penyelenggaraan kegiatan program kerja pengurangan risiko bencana banjir adalah untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sadar dan siap siaga dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana banjir di masa yang akan datang. Sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir atau mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana banjir. Karena dalam mengatasi bencana banjir, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam menanggulanginya, akan tetapi faktor terbesar adalah dari masyarakat sendiri. Perlu kesadaran yang besar bagi tiap-tiap individu dalam menjaga dan menyayangi lingkungannya.

Pelaksanaan program kerja pengurangan risiko bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Serang menggunakan strategi komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif mengedepankan hubungan timbal balik dua arah yang melibatkan berbagai elemen komunikasi. Partisipai

dari masyarakat dan media massa juga merupakan strategi yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Serang dalam menjalankan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Hal ini dilakukan untuk membuat program Destana yang merupakan salah satu program pengurangan risiko bencana banjir lebih efektif dapat menjangkau masyarakat Kabupaten Serang secara luas.

Sihabudin dan Winangsih (2012:37) dalam Komunikasi Antar Manusia, menyebutkan beberapa komponen komunikasi yang terdiri dari komunikator, pesan, media, dan komunikan. Komunikator dalam pelaksanaan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yaitu BPBD Kabupaten Serang. Sebagai komunikator, kredibilitas yang tinggi sangat diperlukan dalam menyampaikan pesan komunikasi. Artinya, BPBD sebagai komunikator kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir memiliki kemampuan dan menguasai bidang penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaan program sosialisasi dan simulasi, komunikator yang dimaksud merupakan pembicara yang menyampaikan pesan komunikasi secara langsung kepada komunikan. Pembicara dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas serta kesesuaian bidang kerjanya. BPBD Kabupaten Serang memilik pembicara tidak hanya dari internal BPBD Kabupaten Serang, tetapi juga dari instansi lain, seperti kedinasan maupun Pemerintah daerah, sesuai dengan tema dan topik pembicaraan sosialisasi. Tokoh masyarakat formal dan nonformal juga

dilibatkan dalam peneguhan dan pemberian motivasi agar materi yang disampaikan BPBD Kabupaten Serang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada program kerja pembentukan relawan bencana, komunikator yang dimaksud merupakan mereka yang bertugas melakukan pembinaan dan komunikasi secara intens dengan pengurus relawan bencana setiap desa. Komunikator dipilih sesuai dengan bidang kerja dan keahlian dalam bidang pra bencana. Mereka merupakan staff sub bagian pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang.

Program kerja koordinasi dilakukan dengan beberapa instansi atau lembaga. Koordinasi dengan pengurus media atau pers, koordinasi dengan instansi pemerintah, dan koordinasi dengan pengurus industri. Umumnya penunjukkan komunikator berdasarkan bidang kerja yang digelutinya. Komunikator dipilih dari staff sub bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang.

Dalam memilih komunikator, tingkat kepercayaan komunikan kepada komunikator menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Seorang komunikator dipercaya oleh khalayak, karena didukung oleh unsur kredibilitas, disamping perilaku jujur. Serta kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Salah satu strategi BPBD Kabupaten Serang dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana adalah melibatkan orang yang memiliki pengaruh dikalangan sasaran komunikasi. Dalam sasaran komunikasi masyarakat, komunikator

pndukung yang dilibatkan adalah tokoh masyarakat. Dalam dunia industri, yang dilibatkan adalah para pejabat perusahaan. Tokoh masyarkaat dipilih karena memiliki kesamaan tinggi dengan komunikan, baik dari aspek bahasa ataupun tempat tinggal. Sedangkan pejabat perusahaan karena memiliki kekuatan dan kekuasaan, seperti karisma, wibawa, otoritas, dan kompetensi atau keahlian.

Selain komunikator, elemen paling penting dalam proses komunikasi adalah pesan komunikasi. Pesan komunikasi dalam setiap program kerja BPBD Kabupaten Serang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Struktur dan format pesan disusun oleh panitia pelaksana kegiatan, sesuai dengan sasaran komunikasi.

Pesan komunikasi pada program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana disusun secara persuasif dan edukatif. Pesan komunikasi disusun secara persuasif yang berarti informasiyang berada didalamnya berisi ajakan. BPBD menyusun pesan secara persuasif dengan tujuan mengajak komunikan untuk turut serta berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana banjir, contohnya melalui keterlibatannya menjadi relawan, ketersediaannya hadir dan mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Serang, serta turut serta mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pesan juga disusun secara edukatif. Informasi yang dimuat akan memberikan pengetahuan baru bagi siapa saja yang mendapatkannya. Hal ini karena informasi

kebencanaan yang akan disampaikan oleh BPBD Kabpaten Serang akan memberi pengetahuan kepada masyarakat atau komunikan. Pengetahuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko akibat bencana banjir.

Pada program penyebaran informasi melalui media massa, pesan komunikasi disusun secara informatif. Hal ini karena *press release* yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Serang berisi informasi kebencanaan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang maupun informasi lainnya. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Serang secara umum. Pesan komunikasi dalam program kerja koordinasi dengan instansi lain disusun secara persuasif. Hal ini karena BPBD Kabupaten Serang berupaya untuk turut serta mengajak instansi lain dalam kegiatan pengurangan risiko bencana banjir.

Selain itu, media juga menjadi komponen penting dalam proses komunikasi. Penyampaian pesan komunikasi dilakukan secara langsung dengan komunikasi tatap muka oleh anggota BPBD Kabupaten Serang. Untuk mendukung pelaksanaannya, digunakan media pendukung dalam mengoptimalkan tersampaikannya pesan komunikasi kepada komunikan. Media yang dipilih dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir merupakan media cetak brosur, pamphlet, media luar ruangan spanduk dan banner, media online seperti website BPBD Kabupaten Serang, selain itu pers dari perusahaan media

lokal juga turut meliput beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana BPBD Kabupaten Serang.

Komunikan dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir umumnya merupakan masyarakat Kabupaten Serang, namun juga terdapat beberapa komunikan lain, seperti masyarakat industri, pers, instansi pemerintah lain, juga relawan.

Menurut Leiss (1994), dalam prinsip komunikasi risiko, penyampaian pesan komunikasi salah satunya membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi. Dalam hal ini komunikator program kerja komunikasi PRB harus dipersiapkan untuk dapat menyampaikan pesan komunikasi sesuai dengan yang dirancang. Komunikator program Destana yang kemudian akan menyampaikan pesan komunikasi kepada masyarakat sasaran harus merupakan orang yang berkualitas dan memiliki kredibilitas dimata masyarakat. BPBD Kabupaten Serang menyiapkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya untuk menyampaikan pesan komunikasi risiko. Seperti dalam program yang berbentuk sosialisasi dan pelatihan, komunikator yang disiapkan harus yang menguasai materi, baik dari internal BPBD Kabupaten Serang maupun dari luar BPBD Kabupaten Serang. BPBD Kabupaten Serang dalam hal ini juga mempersiapkan para relawan untuk bisa menjadi komunikator penanggulangan bencana di daerahnya, melalui proses pelatihan.

Menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya juga merupakan juga prinsip komunikasi risiko. Menilik kedalam program kerja BPBD Kabupaten Serang, pihak penyampai pesan atau komunikator selain kompeten juga harus dapat dipercaya. BPBD Kabupaten Serang sampai saat ini merupakan pihak yang memiliki kredibilitas dimata masyarakat desa karena penanggulangan bencana merupakan bidang penyelenggaraan BPBD Kabupaten Serang. Selain itu, BPBD Kabupaten Serang melibatkan tokoh masyarakat formal dan non formal dalam pelaksanaan program kerja untuk menambah nilai kredibilitasnya dimata masyarakat.

Aktor komunikasi dalam pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir antara lain BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara. Selain BPBD Kabupaten Serang, media massa juga berperan dalam menyampaikan pesan komunikasi kepada masyarakat. selain itu, masyarakat (relawan bencana) juga terlibat.

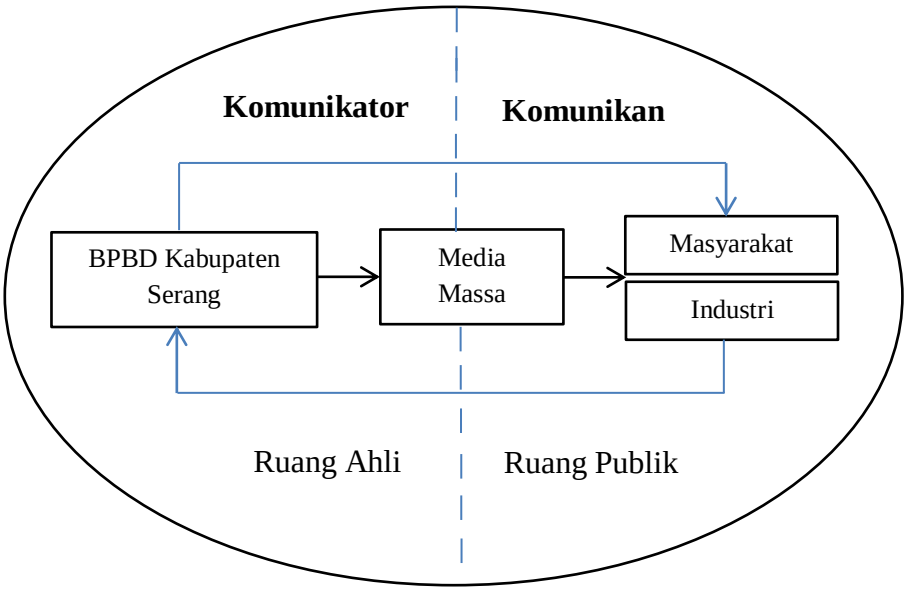

Gambar 4.8 Proses Pelaksanaan program kerja BPBD Kabupaten Serang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Dari gambaran diatas, diketahui bahwa komunikator, lembaga Pemerintahan dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang menyampaikan pesam komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Serang dan masyarakat Industri sebagai khalayak penerima pesan, baik secara langsung melalui pelaksanaan program kerja, maupun melalui media massa yang menjadi perpanjangan tangan BPBD Kabupaten Serang dalam menyampaikan pesan komunikasi kepada khalayak masyarakat Kabupaten Serang secara umum yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh BPBD Kabupaten Serang. Pesan komunikasi yang disampaikan berupa berita yang diterbitkan oleh perusahaan media massa tertentu yang pesannya berasal dari BPBD Kabupaten Serang

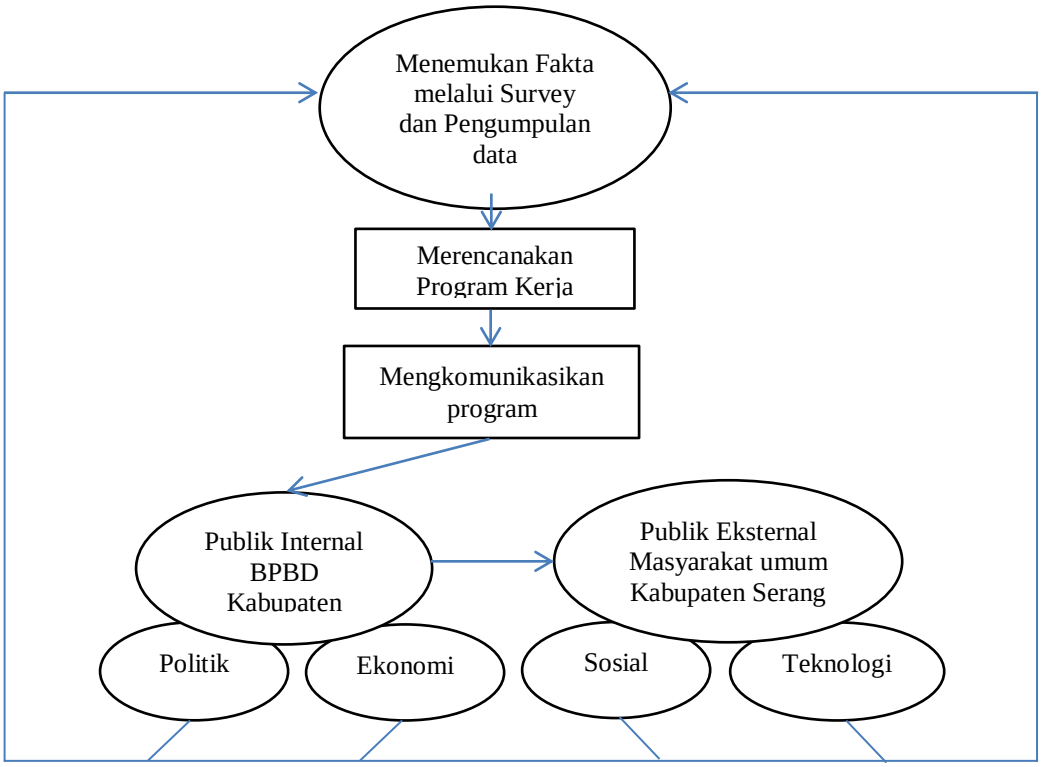

Gambar 4.9 Proses penemuan fakta hingga pelaksanaan program kerja BPBD Kabupaten Serang

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

Gambar diatas menerangkan proses komunikasi pengurangan risiko bencana yang dimulai dengan penemuan fakta dari internal dan eksternal BPBD Kabupaten Serang, dilanjutkan dengan proses perencanaan serta pengkomunikasian kepada seluruh internal BPBD Kabupaten Serang dalam hal ni rapat internal BPBD Kabupaten Serang dilanjutkan dengan pelaksannaan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana kepada publik eksternal.

4.6.5. Evaluasi Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Setelah pelaksanaan program kerja selesai dilakukan, BPBD Kabupaten Serang kemudian melakukan evaluasi dan pengontrolan. Evaluasi atau pengendalian yang dilakukan merupakan evaluasi kegiatan program kerja yang diselenggarakan melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan. Tujuan utama fungsi pengendalian adalah, agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Pengendalian merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setelah itu dapat ditentukan, apakah strategi komunikasi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Selain itu, pengontrolan terhadap pesan komunikasi dalam program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah dengan kelompok relawan bencana dan relawan industri. Pengontrolan juga dilakukan dengan meninjau ulang daerah-daerah yang tempat pelaksanaan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Peninjauan ulang dilakukan dengan tujuan melakukan pengontrolan apakah pesan komunikasi sudah tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Pengawasan terdiri dari tiga tipe, pertama pengawasan pendahuluan, yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Melihat dalam program pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir pada program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana proses pengawasan ini masih dalam tahap pelaksanaan program kerja. Pengawasan yang dilakukan meliputi sinkronisasi antara panitia pelaksana dengan pembicara, kelompok relawan pembantu pelaksana, dan media massa.

Kedua, pengawasan yang pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan pasca kegiatan, atau evaluasi. Pengawasan ini terlihat dalam proses program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yaitu dalam rapat internal pasca kegiatan. Hal ini rutin dilakukan pasca selesai melaksanakan program kerja, karena untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan program. Serta mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan program.

Pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan umpan balik. Dalam program komunikasi PRB, BPBD Kabupaten Serang menjalankan evaluasi berupa peninjauan kembali daerah-daerah tempat pelaksanaan program kerja untuk melihat apakah pesan komunikasi tersampaikan dengan baik.

Dalam proses evaluasi terdapat pembahasan capaian pelaksanaan program kerja, beserta hambatan yang dihadapi. Hambatan dari pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko di Kabupaten Serang antara lain anggaran dana yang tidak sesuai dengan wilayah Kabupaten Serang yang luas terbentang dari kecamatan Anyer sampai Serang timur. Karena wilayah yang luas tersebut pula membuat sulitnya menjangkau semua masyarakat di wilayah rawan bencana dalam waktu yang singkat, sehinggs membutuhkan waktu yang lama dan berproses.

4.6.6. Aktor Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang

Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang didalamnya terdapat sub bagian Pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan, memiliki tugas salah satunya melakukan kegiatan komunikasi pengurngan risiko bencana banjir. Kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana dilakukan dengan tujuan umum yaitu mengurangi jumlah dampak yang ditimbulkan akibat bencana bajir, baik korban jiwa maupun materiil.

Dalam menjalankan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, BPBD Kabupaten Serang tidak bekerja sendiri. Seperti makna yang tersirat dalam gambar segitiga biru pada logo BPBD, yang melambangkan kerjasama dan sinergisitas antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, terdapat beberapa pihak, lembaga, maupun instansi yang terlibat dalam keberlangsungan kegiatan pengurangan risiko bencana,

yang selanjutnya disebut sebagai aktor komunikasi pengurangan risiko bencana.

Aktor komunikasi pengurangan risiko bencana atau komunikator pengurangan risiko bencana pada dasarnya merupakan semua orang, kelompok atau instansi yang berkomunikasi guna mengupayakan pengurangan risiko bencana. Aktor dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang dapat dilihat dari beberapa kegiatan komunikasi baik kegiatan formal maupun non formal yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Serang.

Terdapat beberapa aktor komunikasi yang terlibat dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Pertama, Pemerintah yang direpresentasikan oleh BPBD Kab. Serang sebagai penyelenggara program pengurangan risiko bencana banjir. Pemerintah Daerah beserta OPD Kabupaten Serang juga terlibat dalam proses perencanaan program pengurangan risiko bencana banjir. Selain lembaga Pemerintahan, pengurus media massa melalui pers, juga turut terlibat dalam program pengurangan risiko bencana banjir. Pers terlibat dalam penyampaian pesan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Pers diundang oleh BPBD Kab. Serang untuk meliput proses pelaksanaan program Destana untuk kemudian disebar luaskan kepada masyarakat Kab. Serang secara luas. Walaupun tidak disetiap kegiatan pers hadir untuk melakukan peliputan, namun BPBD Kabupaten Serang selalu membuat *press release*

yang kemudian akan disebarluaskan kepada pers dari berbagai media, melalui grup whatsapp.

Masyarakat juga terlibat dalam program pengurangan risiko bencana banjir. Masyarakat sebagai penerima pesan komunikasi, kemudian memberikan respon balik, salah satunya dengan turut terlibat dalam kelompok relawan bencana. Industri juga tururt terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir melalui keterlibatannya dalam TKTD serta FPRB Provinsi Banten. Relawan binaan BPBD Kabupaten Serang menjadi penyambung pesan komunikasi BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat Kabupaten Serang. Aliran komunikasi terlihat dalam gambar dibawah ini.

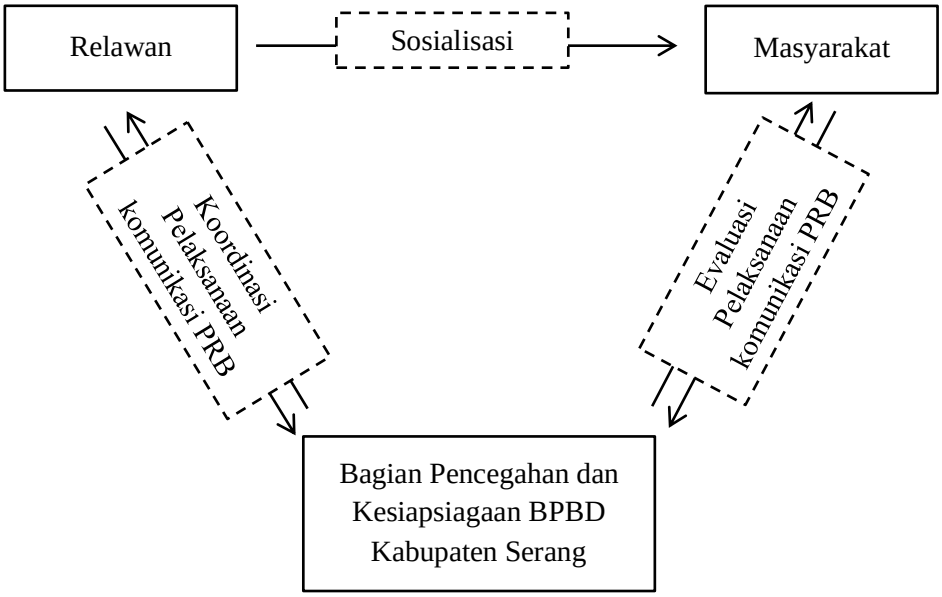

Gambar 4.10 Proses Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir Berbasis Relawan

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018

Jika melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikai risiko yang dikemukakan oleh Wiliam Leiss (1944), ada beberapa unsur yang tidak terlibat dalam proses komunikasi program Destana. Komunikasi risiko yang efektif menurut Leiss (1944) melibatkan lima unsur dalam pelaksanaannya. Kelima unsur tersebut diantaranya, Pemerintah, Industri, Media massa, Akademisi, dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir hanya melbatkan 4 dari 5 unsur yang ada, yaitu pemerintah, media massa, industri dan masyarakat. Unsur akademisi tidak terlibat dalam proses komunikasi PRB Hal ini karena unsur akademisi belum banyak melibatkan diri dalam proses pra bencana, mereka lebih banyak terlibat dalam proses saat terjadinya bencana. Peran akademisi memang sangat penting dalam komunikasi pengurangan risiko bencana, baik dalam pengkajian risiko, atau keterlibatannya dalam kelompok relawan. Namun hingga saat ini, belum ada keterlibatan kaum intelektual tersebut terlebih dalam peran pengkajian risiko.

Berdasarkan prinsip komunikasi risiko yang diungkapkan oleh Leiss (1994), pesan komunikasi dirumuskan sesuai dengan analisis khalayak penerima pesan komunikasi. Pesan komunikasi dalam program pengurangan risiko bencana banjir, dirumuskan melalui beberapa proses yaitu survei lapangan, evaluasi program pengurangan risiko bencana banjir yang telah berjalan, lalu dirumuskan oleh bagian Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Serang.

Pesan komunikasi dirumuskan dalam bentuk pesan yang bersifat informatif, edukatif, dan persuasif. Informatif terlihat dari pesan yang disampaikan selalu memberikan informasi yang lengkap, terlihat dari pesan yang disampaikan pada program kerja sosialisasi dan simulasi melalui media brosur.

Selain itu, pesan yang disampaikan juga bersifat persuasif. Hal ini terlihat pada pesan yang disampaikan dalam program kerja sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana. Pesan yang disampaikan terdapat ajakan untuk turut serta menjadi relawan bencana dan melakukan kegiatan yang dapat mendukung pengurangan bencana banjir didaerahnya masing-masing. Selain itu, dalam program kerja koordinasi dengan instansi lain seperti industri, melalui koordinasi dalam TKTD, BPBD Kabupaten Serang berupaya mengajak pengurus TKTD yang merupakan perwakilan perusahaan-perusahaan dalam satu daerah untuk menjadi pioneer utama dalam penanggulangan bencana didaerahnya, juga untuk menjaga lingkungan industri yang sehat. Koordinasi dengan Pemerintah daerah beserta OPD Kabupaten Serang juga dilakukan dengan mengajak semua bagian dari Pemerintahan Kabupaten Serang untuk terlibat dalam penanggulangan bencana banjir melalui apel kesiapsiagaan.

Pesan komunikasi juga bersifat edukatif. Hal ini terlihat pada pesan yang disusun dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi, informasi yang

diberikan berupa pengetahuan baru dalam penanggulangan bencana dan dipraktekan melalui simulasi.

Prinsip komunikasi selanjutnya yaitu pemilihan khalayak dalam program. Khalayak dalam kegiatan sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan bencana umumnya masyarakat Kabupaten Serang yang berada didaerah rawan bencana. Alasannya, masyarakat didaerah rawan bencana lebih berpotensi terdampak bencana bannjir. Pengetahuan yang baru mengenai kebencanaan banjir sangat diperlukan oleh masyarakat didaerah ini supaya dapat mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana banjir. Selain itu, masyarakat industri juga menjadi khalayak dalam program komunikasi pengurangan risiko bencna, hal ini karena kawasan industri menjadi daerah penting dalam pengurangan risiko bencana. pengurangan risiko bencana juga dapat diusahakan dengan melakukan tindakan preventif di daerah industri, seperti menjamin ke*safety*an daerah industri dari limbah yang tidak pada tempatnya.

Dalam kaitannya dengan prinsip komunikasi risiko selanjutnya yang melibatkan pakar ilmiah. Program kerja pengurangan risko bencana banjir yang digagas oleh BPBD Kabupatan Serang, pengkaji resiko tidak dilakukan oleh pakar ilmiah. Salah satu tujuan dari adanya keterlibatan pakar ilmiah seperti akademisi adalah untuk membantu melakukan pengkajian risiko. Namun sayangnya dalam program kerja pengurangan

risiko bencana BPBD Kabupaten Serang, belum ada keterlibatan akademisi dalam proses pengkajian risiko.

Prinsip berikutnya, menciptakan keahlian dalam berkomunikasi. Dalam hal ini komunikator harus dipersiapkan untuk dapat menyampaikan pesan komunikasi sesuai dengan yang dirancang. Komunikator program kerja sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana BPBD Kaupaten Serang. BPBD Kabupaten Serang menyiapkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya untuk menyampaikan pesan komunikasi risiko, diantaranya yaitu para pimpinan Bidang dan Sub Bidang serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang. Tidak hanya dari BPBD Kabupaten Serang, pembicara yang dipilih juga dari OPD Kabupaten Serang yang sesuai dengan topik bahasan dan memiliki keahlian dibidangnya. Selain itu, komunikator yang juga dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Serang dalam menyebarluaskan pesan komunikasi risiko ialah para relawan yang berperan sebagai penyambung pesan komunikasi dari BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat di daerahnya, seperti pelatihan penanggulangan bencana, informasi cuaca, informasi kebencanaan hingga bagaimana menanggulangi bencana ketika terjadi bencana banjir.

Pada program kerja koordinasi dengan instansi lain, komunikator yang dipersiapkan harus memahami tentang konsep dan pesan pengurangan risiko bencana yang dirumuskan oleh BPBD Kabupaten Serang. Pejabat atau staff Bagian pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi

komunikator utama dalam program tersebut. Sedangkan pada penyebaran informasi, komunikator yang berperan yaitu pembuat *press release*, yaitu Humas dan Pusdalops BPBD Kabupaten Serang. Hal ini karena membuat *press release* membutuhkan kemampuan khusus, sehingga pesan yang disampaikan sesuai dan dapat diterima secara maksimal oleh khalayak.

Menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya juga merupakan juga prinsip komunikasi risiko. Menilik kedalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, pihak peenyampai pesan atau komunikator selain kompeten juga harus dapat dipercaya. BPBD Kabupaten Serang sampai saat ini merupakan pihak yang memiliki kredibilitas dimata khalayak karena penanggulangan bencana merupakan bidang penyelenggaraan BPBD Kabupaten Serang. Sebagai strategi yang digunakan, BPBD Kabupaten Serang melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu menyampaikan pesan komunikasi. Hal ini dipersiapkan BPBD Kabupaten Serang untuk membuat program pengurangan risiko bencana memiliki kredibilitas, dan merupakan sumber informasi satu-satunya dalam hal informasi kebencanaan.

Terakhir, keterbukaan dan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan program komunikasi pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD dalam tingkat Kabupaten saja, tetapi juga tanggung jawab Pengurus Kecamatan, Pengurus Desa, dan relawan serta masyarakat Desa masing-masing.

Program pengurangan risiko bencana banjir dicanangkan oleh BPBD Kabupaten Serang dengan berbagai keterlibatan aktor komunikasi. Keterlibatan 4 aktor utama dalam program pengurangan risiko bencana banjir, yaitu pemerintah, media massa dan masyarakat, memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam proses penyampaian pesann komunikasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan seperti wawancana, observasi, dan dokumentasi, serta menjabarkan hasil penelitian mengenai Komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi pengurangan risiko bencan banjir di Kabupaten Serang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang sebagai aktor utama komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Selain itu, aktor komunikasi lain yang terlibat diantaranya Pemerintah daerah beserta OPD yang selalu berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Serang dalam pembahasan penyusunan rencana program kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, media massa (pers) yang berperan menyebar luaskan pesan komunikasi, industri (pengurus perusahaan) yang berperan menjadi relawan dalam lingkungannya sendiri melalui koordinasi dengan BPBD Kabupatan Serang, masyarakat Kabupaten Serang melalui keterlibatannya dalam kelompok relawan bencana binaan BPBD Kabupaten Serang.
2. Penemuan fakta dalam komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan melalui proses survei dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan *masterplan* dan program kerja komunikasi

pengurangan risiko bencana banjir. Data yang dikumpulkan terdiri dari faktor politik berupa dasar hukum penyelenggaraan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir, ekonomi berupa anggaran dana BPBD Kabupaten Serang serta kerusakan fasilitas didaerah akibat bencana banjir, sosial berupa kondisi geografis daerah rawan bencana dan rekapitulasi kejadian bencana banjir setiap Kecamatan, dan teknologi dalam hal kebencanaan berupa ketersediaan bantuan peralatan evakuasi serta ketersediaan tempat evakuasi sementara setiap daerah di Kabupaten Serang.

3. Perencanaan komunikasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang dengan menyusun program kerja pengurangan risiko bencana banjir berdasarkan hasil penemuan fakta yang telah dilakukan. Program kerja kemudian diajukan kepada Pemerintah dan dikeluarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). yang terdiri dari empat bentuk program kerja yaitu sosialisasi dan simulasi, pembentukan relawan bencana, koordinasi dengan instansi, dan penyebaran informasi melalui media massa. Perencanaan juga mencakup penyusunan pesan komunikasi dan strategi komunikasi. Pesan komunikasi pada program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana disusun secara persuasif dan edukatif dengan strategi komunikasi partisipatif, sedangkan pada program. Sedangkan dalam program penyebaran informasi melalui media massa, pesan komunikasi disusun secara informatif dan strategi yang digunakan dengan membuat *press release* yang kemudian diberikan

kepada pers dari berbagai media. Pesan komunikasi dalam program kerja koordinasi dengan instansi lain disusun secara persuasif.

4. Pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan oleh bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Program sosialisasi, simulasi dan pemebentukan relawan bencana dilakukan dengan komunikasi tatap muka dengan media pendukung berupa media cetak brosur dan pamflet, serta media luar ruang spanduk dan *banner*. Pada program penyebaran informasi melalui media massa, komunikasi dengan pers dilakukan dengan penyebaran *press release* melalui media sosial whatsapp, selain itu *press release* juga dimuat dalam website BPBD Kabupaten Serang. Sedangkan dalam koordinasi dengan instansi lain, komunikasi dilakukan secara tatap muka.
5. Evaluasi komunikasi pengurangan risiko bencana banjir pada program sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan bencana dilakukan dalam tiga tahap yaitu melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan, rapat bulanan, dan peninjauan kembali daerah-daerah tempat pelaksanaan program kerja. Sedangkan dalam program lainnya, hanya dilakukan evaluasi pada rapat internal bulanan.

5.2. Saran

Peneliti telah menyimpulkan hasil penelitian dan analisis berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat beberapa saran yang menjadi acuan kepada hal yang lebih baik lagi mengenai komunikasi pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang.

5.2.1. Saran Akademis

Penelitian ini baru mengambil sisi tahapan komunikasi beserta aktor komunikasi yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang, maka akan lebih bak jika nantinya dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat bagaimana komunikasi pengurangan risiko di daerah lain. Selain itu, penelitian ini masih dapat dikembangkan untuk mengetahui bagaimana strategi BPBD dalam menjalankan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Penelitian serupa dengan menggunakan jenis dan paradigma lain yang berbeda juga dapat dikembangkan dengan topik komunikasi pengurangan risiko bencana banjir.

5.2.2. Saran Praktis

1. BPBD Kabupaten Serang dalam melaksanakan program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir diharapkan dapat melibatkan 5 aktor utama pendukung komunikasi risiko yaitu, Pemerintah, Media Massa, Akademisi, Industri dan Masyarakat. BPBD Kabupaten Serang sebagai penyelenggara kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir harus lebih memaksimalkan peran akademisi sebagai pengkaji risiko juga industry untuk mendukung komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang efektif.
2. BPBD diharapkan lebih memaksimalkan program pengurangan risiko bencana dengan perencanaan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Serang yang saat ini belum terbentuk.

3. BPBD Kabupaten Serang juga diharapkan lebih memaksimalkan website resmi BPBD Kabupaten Serang dengan terus menyampaikan segala bentuk informasi kebencannaan kepada masyarakat melalui website tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPBD Kabupaten Serang. 2015. *Dokumen Hasil Pemantauan Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Serang*.

_____. 2015. *Rencana Kontijensi Banjir Kabupaten Serang.*

_____. 2017. *Peta Rawan Bencana Banjir dan Longsor Tahun 2017.*

Bungin, Burhan. 2005 . *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada..

Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua.* Jakarta : Rajawali Pers.

_____. 2017. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Cutlip, Scott M. Allen H, Center. Broom, Glen M. 2005. *Effective Public Relations (Edisi delapan)*.Jakarta. PT Indeks Kelompok Gramedia.

DeVito, A. Joseph, 1997. *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta. Professional Books.

Effendy, Onong Uchjana. 1997. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Gregory, Anne. 2004. *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations, Edisi Kedua.* Jakarta: Penerbit Erlangga

Haddow, G. D, dan Kims. 2008. *Disaster Communications, In A Changing Media World.* London: Elsevier

Kriyantono, Rachmat. 2012. *Public Relation & Crisis Management*. Jakarta : Kencana Prenada.

Leiss W. 1994. *Risk Communication and Public Knowledge*. Di dalam : Crowley D, Mitchell D, editor. *Communication Theory Today*. California (US): Stanford University Press.

Renn, O. (2008). *Risk Governance: Coping with Uncertainly in a Complex World*. London : Earthscan.

Sellnow, T. dan Matthew, S. 2013. *Theorizing Crisis Communication.*England: Wiley-Blackwell.

Sihabudin, Ahmad & Winangsih, Rahmi. 2012. Komunikasi Antar Manusia. Serang: Pustaka Getok Tular.

Sugiyono. 2009 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Press.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Supartini Eny, Kumalasari Novi, Andry Dian, et al. 2017. *Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan.*

Wiryanto, 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana.

Skripsi dan Jurnal

Asteria, Dona. 2016. *Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana*. Jurnal Komunikasi.Vol.1 No. 11. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia.

Cox, Andrew M. dan Corrall, Sheila. 2013. *Evolving Academic Library Specialties.* Journal of the American Society for Information Science and Technology. Vol. 64 Issue 8.

Lestari, Puji. 2010. *Manajemen Komunikasi Becana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat.* Jurnal Komunikasi. Vol. 10 No. 2. UPN Veteran Yogyakarta.

Mutianingrum, Dian. 2017. *Strategi Komunikasi Bencana yang Dijalankan BPBD DIY.* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Rudianto. 2015. *Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana.* Jurnal Simbolika Vol 1 No. 1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saputra, Erwind. 2018. *Manajemen Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Bencana Banjir di Kabupaten Kampar.* Universitas Riau.

Sumber Online

Adiyoga, Witono. *Komunikasi Risiko Sebagai Salah Satu Komponen Struktur Analisis Risiko*. Dipetik 19 Februari 2018 dari www.scribd.com : www.scribd.com/doc/15249499/Komunikasi-Risiko-Sebagai-Salah-Satu-Komponen-Struktur-Analisis-Risiko

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2017. Dipetik 18 Fabruari 2018 dari www.bnpb.go.id : www.bnpb.go.id/home/potensi.html

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2018. Dipetik 16 Juni 2018 dari www.bpbd.serangkab.go.id : www.bpbd.serangkab.go.id/v1/

Faiz. 2017. *Kabupaten Serang Benctuk Desa Siaga*. Dipetik 18 Mei 2018 dari www.bantensatu.com : https://bantensatu.co/2017/12/06/kabupaten-serang-bentuk-desa-siaga/

Pusat Krisis Kesehatan - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Dipetik 15 Februari 2018 dari kemkes.go.id : https://pusatkrisis.kemkes.go.id/pantauan_bencana/

Wahono, Tri. *Bannjir di Serang Rendam 2.300 Hektar Sawah.* Dipetik 18 Februari 2018 dari www..nasional.kompas.com : www.nasional.kompas.com/read/2012/01/16/22055090/banjir.di.serang.Rendam.2.300.Hektar.Sawah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Transkip Wawancara dengan Informan 1

Wawancana dengan Bapak Nana Sukmana Kusuma, SE, MM yang merupakan Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Serang ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018 yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan 10.30 WIB. Wawancara dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Serang, yang beralamat di Jalan Ki Tapa nomor 1, Kota Serang..

Pertanyaan:

1. **BPBD Kabupaten Serang sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana tingkat daerah melakukan kegiatan komunikasi pengurangan bencana juga tidak pak?**

   Jawab :

   Jelas kami melakukan. Di BPBD Kabupaten Serang sendiri ada empat bidang, pertama adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Pencegahan dan kesiapsiagaan itu memiliki tugas pokok dan fungsi memitigasi, membaca, membuat peta, melakukan pemetaan. Dimana titik titik rawan bencana, berapa satelit yang kita butuhkan, berapa relawan yang dibutuhkan, sarana pra sarana apa yang dibutuhkan. Sehingga mitigasi bencana bisa terpetakan. Oleh sebab itu BPBD memiliki *masterplan* yang spesial. Dan perlu diketahui *masterplan* kita adalah *masterplan* pertama yang dimiliki BPBD di Indonesia. Itu adalah sistem.

   Lalu, kesiapsiagaan juga menyiapkan relawan, melatih relawan, dan segala macam. Nah dalam bidang pencegahan inilah salah satu sub bidangnya adalah sub bidang pengurangan resiko bencana atau PRB. Lalu yang kedua, adalah kedaruratan. Kedaruratan itu pusat pengendali informasi. Kita punya krisis center. Dimana mereka action melakukan tindakan ketika terjadi bencana.

Yang ketiga, rehabilitasi rekontruksi. Kita melakukan rehabilitasi rekontruksi pasca bencana. Yang keempat adalah pemadam kebakaran. Siapa yang diperiksa, siapa yang diawasi dan siapa yang dibina. adalah masyarakat. Kab. Serang.

2. **Apakah terdapat bidang khusus pengurangan risiko bencana banjir di BPBD Kab. Serang?**

   Jawab :

   Ya terdapat, yang tadi Saya jelaskan, Sub Bidang Pengurangan Risiko Bencana di bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk bencana banjir masuk ke dalamnya, jadi tidak hanya bencana banjir, PRB ini mengurusi pengurangan risiko semua bencana.

3. **Kalau boleh tahu, jenis kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana apa saja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang?**

   Jawab :

   Sebetulnya ada 2 golongan, yang sudah terselenggara atau dilaksanakan pada tahun 2017, dan yang sedang atau akan dilaksanakan pada tahun 2018. Semuanya tersusun dan dimuat dalam program kerja tahunan kami.

4. **Nah untuk program kerja sendiri pak, bisa disebutkan apa saja program kerja PRB?**

   Jawab :

   Banyak ya, yang sudah terlaksana itu pembuatan masterplan kebencanaan, lalu sosialisasi pengurangan risiko bencana banjir, yang akan terlaksana minggu depan nih pembuatan desa tangguh. Kalo buat semua prokernya nanti ada di dokumen kita, nanti boleh lihat.

5. **BPBD sebagai badan yang mengkoordinir lembaga-lembaga dalam penanggulangan bencana alam, dalam melakukan kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir, apakah BPBD hanya mengkoordinir lembaga lain ataukah BPBD menjalankan program kerja sendiri?**

   Jawab :

   BPBD sebagai lembaga leading sector, kami tidak bekerja sendiri, Masyarakat, industri, dinas-dinas, itu mitra kami. Relawan. Nah untuk relawan sendiri, kami sudah memiliki banyak relawan mitra yang bergabung.

6. **Apakah terdapat keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana?**

   Jawab :

   Oh jelas, kami juga bagian dari Pemerintah Kabupaten Serang. Kami berkoordinasi dengan Pemerintah secara rutin pastinya.

7. **Apakah terdapat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Kami rutin melakukan sosialisasi dan biasanya yang kami prioritaskan itu masyarakat terdampak bencana yang zona wilayahnya udah masuk rawan bencana. Kenapa begitu? Karena kami ingin membangun kesadaran. Kesadaran itu biasanya gampang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana karena mereka merasakan langsung bagaimana dampak terjadinya bencana didaerah mereka.

8. **Apakah terdapat keterlibatan elemen industri dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Jelas. Intinya titik-titik rawan adalah industri. Hubungan komunikasi informasi dengan Industri itu harus tepat. Bahkan BPBD harus bisa menilai, indutri ini safety atau tidak. Industri kita banyak yang berbahaya bagi lingkungan, tapi dengan hubungan komunikasi informasi yang kita lakukan,

bagaimana kita melakukan pembinaan kepada industri. Tentunya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat industri. Kita melakukan penilaian, pengawasan kepada industri, aman atau tidak. Yang menjadi eksekutor tim TKTD.

9. **TKTD itu apa ya Pak?**

   Jawab :

   Tim koordinasi tanggap darurat. Itu bagian dari kami. Jadi kita perlu edukasi masyarakat industri. Mulai dari pengolahan, pembuangan limbah. Bagaimana pengawasan terhadap industri, pembentukan bangunan baru, ya kami ada disana untuk mengedukasi, mengontrol, memantau, menilai, dan menanggulangi jika terjadi bencana. TKTD kita baru ada 1 dari rencana kami 3 di tahun ini. 3 itu berbeda-beda zona, nanti akan bertambah lagi jadi 7. Selain TKTD tingkat wilayah ada juga yang di tingkat Kabupaten, itu diisi juga oleh orang kita (BPBD Kab. Serang). di masing-masing TKTD ada perwakilan orang K3 perusahaan dan perwakilan dari relawan kami. Tujuannya tidak lain untuk memberi pemahaman pada masyarat industri lah.

10. **Apakah terdapat keterlibatan elemen media massa dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Kami telah menghimpun rekan-rekan pers dalam satu kelompok. Itu pusdalops yang ngurus, mereka yang hubungan dengan rekan-rekan pers.

11. **Apakah BPBD Kabupaten Serang melakukan proses penemuan fakta sebelum melakukan penyusunan program kerja? Kaya mengumpulkan informasi gitu pak.**

    Jawab :

    Oh iya melakukan. BPBD kan memiliki masterplan. Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, BPBD memiliki masterplan untuk memetakan dimana titik-titik rawan bencana, satelit apa yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, berapa relawab yang dimiliki, sarana pra sarana apa

yang dimiliki. Perlu diketahui, BPBD Kabupaten Serang itu satu-satunya BPBD yang memiliki masterplan, itu cuma kita doang.

12. **Siapa sajakah sasaran dari kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Utamanya masyarakat Kabupaten Serang. Kita siaga 24 jam juga siaga untuk masyarakat.

13. **Media apa saja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Kami ada website khusus BPBD boleh dibuka, itu alamatnya di spanduk tuh. Kami rutin memberitahu masyarakat lewat media ini. BPBD juga punya whatsapp khusus milik BPBD. Jadi kalo terjadi bencana misalkan, masyarakat bisa melakukan pelaporan melalui whatsapp itu. Nanti kami tangani laporan tersebut.

14. **Bagaimana proses penyusunan program kerja pengurangan risiko bencana?**

    Jawab:

    Jadi penyusunan program itu tidak sembarang hanya menyusun berdasarkan ide yang sedang muncul. Jadi semua berdasarkan hasil riset, survei lapangan. Kita melihat apa kekurangan kelebihan program kemarin, kita lihat keadaan mereka (sasaran komunikasi) bagaimana, keadaan wilayahnya. Sehingga kita membuat program berdasarkan masyarakat, karena target sasaran kita ya masyarakat.

15. **Bagaimana penyusunan pesan komunikasi?**

    Jawab :

    Kalo pesan ya intinya bagaimana masyarakat berperan dalam lingkungannya buat penanggulangan. Misalnya dengan dia ga buang sampah sembarangan, merawat sungai sebagaimana mestinya, tidak menebang pohon.

Itu sederhananya. Kalo yang lebih rumit ya mengenai pembangunan dan pemanfaatan lahan. Untuk pemukiman, industri. oleh sebab itu sasaran kita juga industri. Makanya kita sering jalin komunikasi sama industri-industri juga.

16. **Apakah BPBD Kabupaten Serang melakukan proses evaluasi dalam setiap kegiatan PRB?**

    Jawab :

    Iya tentu ada evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan, ada evaluasi rutin bulanan.

Transkip Wawancara dengan Informan 2

Wawancara dengan informan Bapak Drs. Wawan Darmawan, M.Si yang merupakan Kepala Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana dilakukan pada tanggal 15 Juni 2018 pukul 12.00 di Kantor BPBD Kabupaten Serang, yang beralamat di Jalan Ki Tapa nomor 1, Kota Serang.

Wawancara dengan Bapak Wawan tidak dilakukan hanya satu kali. Peneliti juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi dengan mengikuti salah satu program kerja pengurangan risiko bencana yaitu sosialisasi dan simulasi pada tanggal 24 Juli 2018, di Aula desa Panosogan Kecamatan Cikeusal. Dalam mengikuti kegiatan tersebut, peneliti turut mengamati proses berlangsungnya kegiatan program kerja. Pada kesempatan ini pula, peneliti kembali mewawancarai informan 2.

Pertanyaan :

1. **BPBD Kabupaten Serang sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana tingkat daerah melakukan kegiatan komunikasi pengurangan bencana juga tidak pak?**

   Jawab :

Iya kami melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana, itu bidang kami, pencegahan dan kesiapsiagaan, sub bidangnya ada pengurangan risiko bencana, sama kesiapsiagaan. Itu bagian pre bencana. Kalo pra itu menciptakan sumber daya manusia, melatih dalam kebencanaan. Tugas Pak wawan (kepala sub bagian pencegahan) mengurangi dari 200 rumah yang terdampak bagaimana bisa menjadi 50 rumah saja. Mengurangilah. Adanya di pra. Dengan segala program kegiatannya. Tugas bu ning (kepala sub bagian kesiapsiagaan) menghimpun relawan, nah misalkan ada bencana orang-orang itulah yang aktif. Di pra adanya. Pra bencana ini butuh orang-orang yang kreatif.

2. **Jadi terdapat bidang khusus ya pak terkait pengurangan risiko bencana banjir?**

   Jawab :

   Iya ada sub bidangnya, Pak Wawan ini kasubagnya. Sub bidang pengurangan risiko bencana. Gak cuman banjir, semua bencanalah neng. Banjir, longsor, kekeringan, banyaklah.

3. **Untuk anggota PRB ada berapa orang pak?**

   Jawab:

   PRB? Oh ada 9 orang kita neng.

4. **Kalau boleh tahu, jenis kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana apa saja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang?**

   Jawab :

   Banyak jenisnya, seperti sosialisasi, himbauan ke masyarakat lewat website, pers, pelatihan kebencanaan atau simulasi.

5. **Nah untuk program kerja sendiri pak, bisa disebutkan apa saja program kerja PRB?**

   Jawab :

   Nah kalo ini jelas, ada neng. Ada yang udah terlaksana di tahun 2017 sama yang akan terlaksana ditahun 2018 neng. Yang sudah terlaksana itu ada

6. **BPBD sebagai badan yang mengkoordinir lembaga-lembaga dalam penanggulangan bencana alam, dalam melakukan kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir, apakah BPBD hanya mengkoordinir lembaga lain ataukah BPBD menjalankan program kerja sendiri?**

   Jawab:

   BPBD sebagai lembaga leading sector ya dalam penanggulangan bencana, jadi kita mengkoordinir kalo untuk pencegahan bencana. Tapi kalo untuk pencegahan ga semua dinas-dinas ikut dikoordinir, ga sebanyak kaya untuk penanggulangan pas terjadi bencana. Buat rehabilitasi dan rekontruksi juga ada buat pasca. Walaupun kita punya duit, untuk pelaksanaannya tetap saja harus sesuai peruntukannya. Siapa yang menjalankan harus sesuai tugasnya, tidak semua kita yang menjalankan. Kita sebisa mungkin melibatkan pihak-pihak terkait.

7. **Apakah terdapat keterlibatan elemen industri dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Seperti lambang BPBD ya segitiga warna biru, itu maksudnya ada kerjasama, kesinambungan antara pemerintah, swasta salah satunya industri, dan masyarakat. Sudah ada forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Provinsi Banten yang melibatkan pemerintah, dunia usaha,PMI, TAGANA, Relawan masyarakat. Jadi tu bukan lembaga tandingan, tapi lembaga di bawah BPBD yang dikoordinir. Seperti TKTD jjuga itu pengurusnya juga dari perwakilan masing-masing perusahaan, ada orang BPBD juga didalamnya. Untuk rencana tahun depan juga kita akan melibatkan industri dalam forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang melibatkan dunia usaha, termasuk kita mengkoordinir kegiatan CSR nya. Selama inikan belum, nah mulai tahun depan kita mau mengkoordinir. Untuk pencegahan juga.

8. **Itu perusahaan besar saja apa semuanya pak?**

   Jawab :

Engga dong neng, semuanya, terkhususnya industri-industri kimia harus terlibat, khususnya seperti di Bojonegara, Puloampel, di kragilan juga ada tuh. Pengurus-pengurusnya di forum banyak dari pengusaha di perusahaan tersebut.

9. **Bagaimana komunikasi yang dibangun BPBD dengan pengurus TKTD?**

   Jawab :

   TKTD itu koordinasi rutin. Tiap sebulan sekali kami pasti datang mengecek sekaligus silaturahmi, gimana relawan disana, gimana masyarakat industri (Darmawan, 2018).

10. **Kalo TKTD itu program kerja BPBD atau forum atau apa ya pak?**

    Jawab :

    TKTD itu tim koordinasi tanggap darurat. Pengurus TKTD itu adalah pengurus masing-masing industri. Jadi bukan dari BPBD aja. Bukan program kerja kami, tapi itu salah satu cara untuk menjangkau masyarakat industri. Mengawasi lah. Di setiap zona ada TKTDnya. Kita membagi zona industri berdasarkan lokasi. Nanti di kabupaten dihimpun sama TKTD tingkat Kabupaten. Kalo terjadi bencana bisa industri yang turun sendiri, kalo melibatkan industri lain dalam satu zona bisa TKTD yang turun, kalo lebih membesar lagi TKTD Kabupaten beserta BPBD yang turun

11. **Apakah terdapat keterlibatan elemen akademisi dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Kalo mahasiswa biasanya ada neng, pas terjadi bencana, jadi bukan di pra. Kaya ikut memberi bantuan. Akademisi terlibat banyaknya diproses saat terjadi bencana neng. Organisasi mahasiswa yang nyalurin sumbangan. Juga saat proses pasca bencana. Proses rehabilitasi, pemulihan kan perlu orang yang memiliki keahlian khusus ya, nah mereka ngajarin relawan buat membantu proses pemulihan pasca bencana. Jadi selain mereka yang

memiliki keahlian khusus kaya dokter, psikiater, dosen, terlibat juga kaya relawan, mahasiswa, mereka ikut membantu.

12. **Apakah terdapat keterlibatan elemen media massa dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Terlibat, media biasanya publikasi ya. Dibeberapa kegiatan kita undang media untuk meliput kegiatan kita, Tapi biasanya suka tau aja gitu ada yang tahu-tahu datang wartawan ngga diundang juga. Kita juga bikin laporannya kan nanti kalo ada acara, nah terus nanti dipublikasi di website kita, di kirim juga ke grup yang ada wartawan nya nanti wartawan baru publikasi ke medianya. Kita memanfaatkan media sosial juga sih, kaya facebook, ada juga whatsapp khusus milik BPBD Kabupaten Serang.

13. **Pak ketika saya *searching* di Google mengernai berita pra bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang, kok sedikit ya Pak?**

    Jawab :

    Ya begitu neng, pra bencana itu memang suka luput dari pemberitaan. Jarang yang ada di TV tuh kalo pra tuh jarang. Adanya pas kejadian bencana itu banyak, rehabilitasi rekontruksi juga. Tapi kalo pra jarang. Karena masih dianggap kurang penting, kurang menarik. Padahal pra ini yang penting.

14. **Apakah terdapat keterlibatan elemen masyarakat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Oh jelas ada kalo ini, kan sasaran kita juga masyarakat. kita menjangkau mereka, mereka juga aktif merespon baik kedatangan kita.

15. **Biasanya kalo partisipasi masyarakat itu bentuknya gimana ya pak?**

    Jawab :

    Ya kalo kita mau buat desa tangguh, kelompok masyarakat siaga bencana, sosialosasi, mereka aktif mau mengikuti. Mereka juga seneng dan antusias.

Nah kalo buat relawan, kita biasanya agak lama sosialisasinya, karena kan ada pelatihannya juga. Mereka juga banyak yang mau jadi relawan, seneng.

16. **Untuk kelompok masyarakat apakah ada kelompok masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan PRB ini pak?**

    Jawab :

    Oh buat kelompok masyarakat mah ya paling kelompok relawan neng, atau kelompok masyarakat siaga bencana. Ya kelompok-kelompok bentukan kita. Kalo ormas atau LSM itu mereka berpartisipasinya ketika tanggap darurat, bukan di pra tapi lebih di saat bencana.

17. **Bagaimana komunikasi yang dilakukan BPBD Kab. Serang dengan elemen industri dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana?**

    Jawab :

    Kalo industri untuk terlibat dalam komunikasi pengurangan risiko terlibat dalam TKTD. Kalo untuk FPRB forumnya belum dibuat yang khusus di Kabupaten Serang, ya mungkin tahun depan. Di Provinsi udah ada tuh forumnya, FPRB. Itu isinya perwakilan dari masing-masing lembaga pemerintah dan non pemerintah. industri juga ada di dalamnya. Jadi sampai saat ini kami terus berkoordinasi.

18. **Apakah BPBD Kabupaten Serang melakukan proses penemuan fakta sebelum melakukan penyusunan program kerja? seperti riset gitu pak mengumpulkan informasi.**

    Jawab :

    Iya. Kami melakukan pencarian informasi buat membuat masterplan, buat arsip, buat pertimbangan penyusunan program kerja.

19. **Bagaimana BPBD Kabupaten Serang melakukan penemuan fakta komunikasi?**

    Jawab :

Survei neng. Berapa jumlah korban bencana, kapan terjadi bencana. Data dari BMKG juga kita kumpulkan. Curah hujan, dan sebagainya. Buat pertimbangan penyusunan program kerja sama rencana kontinjensi banjir.

20. **Informasi atau data apa yang ditemukan BPBD Kabupaten Serang dalam proses penemuan fakta komunikasi?**

    Jawab :

    Banyak neng, data kejadian banjir, korban jiwa, kerusakan fasilitas didaerah akibat bencana banjir, kondisi geografis daerah rawan bencana, ketersediaan bantuan peralatan evakuasi sama tempat evakuasi sementara di daerah -daerah.

21. **Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam merancang dan menentukan program kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Jadi, persiapan itu awalnya kita survei dulu apa yang dibutuhin masyarakat, ada timnya. Internal kita juga evaluasi program. Semua itu akan jadi acuan pengusulan program periode mendatang. Kita mengusulkan kepada Bapak (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Serang), nanti beliau mengkaji bersama pejabat lainnya, terus diajukan kepada BAPPEDA. Nanti muncul di DPA. Berapa anggaran, fasilitas, berapa desa dan lain-lainnya. Setelah itu, dibentuk panitia pelaksana. Nah semua dipersiapkan ya, panitia dibentuk untuk membahas dan mempersiapkan itu. Pembicara, pesan semua dibahas, bahkan koordinasi sama media sama relawan juga.

22. **Bagaimana proses penyusunan pesan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir?**

    Jawab :

    Kalo perencanaan yang paling utama kan konsep ya, konsep dan pesan komunikasi itu sudah tertuang dalam DPA, jadi kita tinggal menterjemahkan saja, mau menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang seperti apa, penyampaiannya bagaimana, ataukah akan disederhanakan atau tidak,

penyampai pesannya siapa. Pesan komunikasi tertera disetiap kerangka acuan kerja setiap kegiatan ya, tapi intinya begini, kalo sasaran kita masyarakat, ya tujuannya partisipasi masyarakat, kalo sasaran kita industri, ya tujuannya partisipasi industri, kalo sasran kita SKPD atau instansi lain, ya tujuannya untuk mengkoordinir mereka dalam proses penanggulangan bencana, kan gitu.

23. **Bagaimana strategi yang digunakan dalam program komunikasi pengurangan risiko bencana banjir?**

    Jawab :

    Jadi salah satu cara kita menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, lurah, camat begitu neng. Selain itu, kita juga melibatkan masyarakat misalnya relawan, terus pers. Jadi dengan melakukan hal yang kecil tapi efeknya besar. Misalnya kita sosialisasi di satu kecamatan, yang diundang kesitu nanti yang ditugaskan menyampaikan pesan komunikasi lagi ke masyarakat lainnya. Kalo pers ya yang menyebarkan melalui medianya.

24. **Bagaimana proses pembagian kerja dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Kita bentuk panitia pelaksana. Mereka yang menjalankan. Mereka yang menyiapkan semuanya. Terus buat pembicara, nggak cuma dari kita (BPBD Kabupaten Serang), ada juga dari pemda, kedinasan. Kalo misalkan kita mau masukin topik PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), boleh kita gaet dinas kesehatan. Sesuain sama topik intinya. Kita dari internal BPBD biasanya Bapak (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang), terus Kabag-kabag (Kepala Bagian di BPBD Kabupaten Serang).

25. **Siapa sajakah sasaran dari kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

Sasaran kita itu umumnya masyarakat yang terdampak bencana, yang tinggal didaerah rawan bencana, masyarakat industri. Masyarakat yang tinggal di daerah tidak rawan bencana juga harus diberi pengetahuan sebenarnya, kenapa? Karena mereka juga berpotensi kena bencana. namanya bencana, siapa yang tahu ya.

26. Bagaimana ketersediaan dana dan fasilitas didalam pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko?

Jawab :

Anggaran pelaksanaan kegiatan masih dari Pemerintah Daerah, dari APBD.

27. Media apa saja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?

Jawab :

Kalo sosialisasi, simulasi itu brosur, pamflet, ada spanduk, sama *x-banner*.

28. Apa saja hambatan yang biasa di alami dalam penyampaian pesan komunikasi pengurangan risiko kepada masyarakat

Jawab :

Tidak ada ya, paling anggaran ya neng. Sama daerah kita yang luas dan nggak ngumpul di satu tempat gitu. Bayangin aja anyer-kragilan jauhnya. Tapi ya itu semua tantangan buat kita.

29. Apakah BPBD Kabupaten Serang melakukan proses evaluasi dalam setiap kegiatan PRB?

Jawab :

Jelas melakukan. Setiap melakukan kegiatan ada evaluasinya ya. Ada evaluasi bulanan juga. Kita juga mengontrol ke tempat pelaksanaan kegiatan di masyarakat. apakah pesan komunikasi tersampaikan.

Transkip Wawancara dengan Informan 3

Wawancara dengan informan 3 yaitu Bapak Maman yang merupakan Staff Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana dilakukan pada tanggal 15 Juni 2018 pukul 13.00 di Kantor BPBD Kabupaten Serang, yang beralamat di Jalan Ki Tapa nomor 1, Kota Serang. Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 12.30 setelah selesai acara sosialisasi Desa Tangguh Bencana di Aula Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal.

Pertanyaan :

1. **BPBD Kabupaten Serang sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana tingkat daerah melakukan kegiatan komunikasi pengurangan bencana juga tidak pak?**

   Jawab :

   Iya, kan kita sub bidang pengurangan risiko bencana. Program kerja kami pengurangan risiko bencana.

2. **Jadi terdapat bidang khusus ya pak terkait pengurangan risiko bencana banjir?**

   Jawab :

   Ada, kan ini Sub bidang pengurangan risiko bencana.

3. **Untuk anggota PRB ada berapa orang pak?**

   Jawab:.

   Ada 9 mba.

4. **Kalau boleh tahu, jenis kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana apa saja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang?**

   Jawab :

   Biasanya sosialisasi, komunikasi ke relawan, komunikasi ke pemerintah.

5. **Nah untuk program kerja sendiri pak, bisa disebutkan apa saja program kerja PRB?**

Jawab :

Ada di DPA neng.

6. **Apakah terdapat keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab:

   Ada. di Provinsi kana da FPRB ya, kita anggotanya. FPRB Kabupaten Serang belum ada ya buat sekarang, sudah ada bahasan tapi belum terealisasi. Kita sampai saat ini bergabung di FPRB Provinsi Banten,berkoordinasi dengan pengurus FPRB Provinsi Banten terus.

7. **Apakah terdapat keterlibatan elemen industri dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir**

   Jawab :

   Oh iya. Ada. pak Kepala kan menginisiasi TKTD ya. Itu pengurusnya industri, relawan. Di Forum PRB juga ada pengusaha-pengusaha dari perusahaan mba.

8. **Apakah terdapat keterlibatan elemen akademisi dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Setau saya mah ngga ada mba. Paling kaya mba gini yang wawancara.

9. **Apakah terdapat keterlibatan elemen media massa dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Ada mba. Kalo pers ada grupnya mba. BPBD Kabupaten Serang menghimpun. Banyak media di grup. Jadi kalo undangan itu ya lewat grup whatsapp, nggak cuman PRB mba. Terlebih saat bencana ya. Kita juga ngundang untuk dateng di apel kesiapsiagaan ya.

10. **Apakah terdapat keterlibatan elemen masyarakat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

Jawab :

Pasti ada neng. Relawan bencana itu dari masyarakat. Mereka bertugas di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Kalo ada bencana banjir mereka sumber informasinya. Mereka yang melakukan kontak dengan kita. Mereka yang melakukan penanganan pertama, mengarahkan ke tempat evakuasi sementara, gitu.

11. **Untuk kelompok masyarakat apakah ada kelompok masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan PRB ini pak?**

    Jawab :

    Ormas adanya saat tanggap darurat ya mba paling. Karena kalo pra bencana jarang ada ormas yang terlibat.

12. **Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam merancang dan menentukan kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Sebelumnya kan udah ada program kerja yang dijalankan, ada evaluasi dari program yang sudah berjalan. Apa kekurangannnya, apa kendalanya, gimana capaian kegiatannya. Semua dievaluasi. Baru dibuat kerangka program kerja periode mendatang, diajukan kepada bagian program dan evaluasi. Lalu bagian program dan evaluasi mengkaji, setelah selesai diajukan kepada Kalaksa (kepala pelaksana) dan Sekertaris. Kemudian diajukan kepada BAPPEDA, dikaji. Baru setelah itu diturunkanlah program yang akan BPBD Kabupaten Serang laksanakan dalam bentuk DPA

13. **Bagaimana proses pembagian kerja dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Ada penunjukan PPTK, ada juga penunjukan panitia pelaksana dari BPBD Kabupaten Serang. Pelaksana kegiatan komunikasi PRB itu pelaksana utamanya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tapi untuk anggota panitia pelaksana kegiatan nggak cuma dari bagian kami.

17. **Siapa sajakah sasaran dari kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Masyarakat mba

18. **Bagaimana ketersediaan dana dan fasilitas didalam pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko?**

    Jawab :

    Kalo sumber anggaran itu dari APBD Kabupaten Serang ya, kalo fasilitas itu dari internal kami, kaya spanduk, kendaraan, infokus. Kalo fasilitas standar kebencanaan untuk kecamatan-kecamatan itu kami dapat bantuan dari BNPB, sebagian juga kami anggarkan.

19. **Media apa saja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

    Jawab :

    Banyak, kalo buat acara besar paling brosur, spanduk. Kalo koordinasi sama lembaga lain ya paling medianya media sosial, whatsapp, atau ketemu langsung. Kita juga memaksimalkan website kita untuk menyebarluaskan informasi. Kalo yang buat berita atau kontennya itu PUSDALOPS. Selain dimuat diwebsite juga disebarluaskan kepada pers. Yang hubungan sama pers juga sama mereka. Karena Humas kan yang biasanya whatsappan sama pers.

20. **Apa saja hambatan yang biasa di alami dalam penyampaian pesan komunikasi pengurangan risiko kepada masyarakat**

    Jawab :

    Anggaran mba, karena kan daerah target sasaran kami banyak dan tersebar luas ya.

Transkip Wawancara dengan Informan 4

Wawancara dengan Ibu Setianingsih, S.Sos. yang merupakan Kepala Sub Bagian Kesiapsiagaan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 11.30 di Kantor

BPBD Kabupaten Serang, yang beralamat di Jalan Ki Tapa nomor 1, Kota Serang. Peneliti juga bertemu kembali dengan narasumber 3 pada saat observasi mengikuti program Desa Tangguh Bencana.

Pertanyaan :

1. **BPBD Kabupaten Serang sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana tingkat daerah melakukan kegiatan komunikasi pengurangan bencana juga tidak bu?**

   Jawab :

   Iya neng. Kalo saya sub bidangnya kesiapsiagaan. Tapi sama lingkupnya pra bencana juga.

2. **Jadi terdapat bidang khusus ya pak terkait pengurangan risiko bencana banjir?**

   Jawab :

   Bidangnya ya pencegahan dan kesiapsiagaan. Sub bidangnya pengurangan risiko bencana sama kesiapsiagaan.

3. **Nah untuk program kerja sendiri, bisa disebutkan apa saja program kerja PRB?**

   Jawab :

   Semuanya sudah dimuat dalam DPA neng. Sosialisasi, simulasi, himbauan gitu neng.

4. **Apakah terdapat keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir?**

   Jawab :

   Iya terdapat neng. Kami kan mengusulkan program kerja kepada Pemerintah Daerah melalui BAPPEDA. Ada juga BPBD Provinsi. Kalo BPBD Provinsi perannya mengkoordinasikan, seperti apa kegiatan PRB, batasanya gimana, untuk pelaksanaan murni kita (BPBD Kab. Serang}. Mereka ngadain rapat evaluasi dan rapat koordinasi biasanya setiap tahun. Tujuannya biar singkron, semua daerah dapet hak yang sama

5. **Apakah terdapat keterlibatan elemen industri dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Ada. Pengusaha-pengusaha industri terlibat dalam FPRB Provinsi, karena FPRB Kabupaten kan belum ada ya, jadi kita diundang sama BPBD Provinsi untuk koordinasi dalam FPRB Provinsi Banten. Rutin setahun dua kali. Industri juga terlibat ngurusin TKTD.

6. **Apakah terdapat keterlibatan elemen akademisi dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Tidak ada neng

7. **Apakah terdapat keterlibatan elemen media massa dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Terlibat. Kita punya grup whatsapp yang berisi pers dari tiap media. Jadi nanti mereka bisa menyebarluaskan pesan yang kita buat. ini strategi juga. Biar gak cuma satu desa yang terjangkau gitu. Kita juga masiv di media sosial.

8. **Apakah terdapat keterlibatan elemen masyarakat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Masyarakat jelas terlibat, agar masyarakat menjadi penyelamat diri sendiri dan orang sekitarnya. Masyarakat juga yang kenal daerah mereka sendiri kan. Ya kita melatih lah.

9. **Untuk kelompok masyarakat apakah ada kelompok masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan PRB ini?**

   Jawab :

Adanya tokoh masyarakat neng. Kalo sosialisasi sama simulasi pasti kita undang tokoh masyarakat. Yang ngesahin pembentukan pengurus KMSB sana Destana kan dari kita sama perwakilan tokoh masyarakat. Jadi tanda kalo masyarakat sana mendukung lah gitu

10. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam merancang dan menentukan kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?

Jawab :

Karena sasaran kami masyarakat, jadi kami survei dulu bagaimana kondisi lapangan. Setelah itu, disusun usulan programnya, anggaran, dan lain-lain. Baru diajukan. Jadi semua berproses.

21. Siapa sajakah sasaran dari kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?

Jawab :

Pelaksanaan kegiatan komunikasi PRB mengutamakan asas manfaat bagi masyarakat. Utamanya masyarakat Kabupaten Serang, juga masyarakat industri.

22. Bagaimana ketersediaan dana dan fasilitas didalam pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko?

Jawab :

Anggaran penyelenggaraan bersumber dari Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten Serang.

23. Apakah BPBD Kabupaten Serang melakukan proses evaluasi dalam setiap kegiatan PRB?

Jawab :

Buat ngontol pesan, dan mengetahui respon publik kita peninjauan ulang sih ya. Jadi kita ke desa-desa kita kesana buat tau gimana respon masyarakat. Kita juga liat apa pesannya udah sampai ke masyarakat.

Transkip Wawancara dengan Informan 5

Wawancara dengan Bapak Hj. Kublik yang merupakan Tokoh masyarakat di Kecamatan Cikeusal. Informan 5 merupakan informan pendukung yang terlibat dalam pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 13.00 di Aula Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal setelah acara Desa Tangguh Bencana selesai.

Pertanyaan :

1. **Apakah Bapak pernah terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang diselenggarakan oleh BPBD Kab. Serang?**

   Jawab :

   Iya, ikut dalam acara sosialisasi dan simulasi Desa tangguh bencana barusan neng.

2. **Dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko apa saja Bapak pernah terlibat? Jelaskan masing-masing!**

   Jawab :

   Kalo saya ikut acara Desa tangguh. Baru ikut acaranya ini sekali, diminta sama Camat dampingin pembentukan pengurusan Destana di Cikeusal.

3. **Sejauh apa keterlibatan Bapak dalam kegiatan tersebut?**

   Jawab :

   Saya ikut membina kalo relawan. Hanya mendampingi. Sama Kang Wawan (Kepala Sub Bagian Pengurangan Risiko Bencana) juga. Tadi juga saya bantu terselenggaranya acara. Ikut memberi motivasi.

4. **Apa tujuan Bapak terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab *:*

   Saya sebagai orang yang dituakan didaerah sini neng, karena umur karena pengalaman. Saya disini mah cuma dampingin, saya juga seneng kalo masyarakat ada kegiatan gini. Pemerintah masih peduli tandanya sama keselamatan masyarakat.

5. **Apakah ada pengontrolan atau pengawasan dari BPBD ke masyarakat pak?**

   Jawab :

   Ada. Setiap bulan Pak Wawan (Kasubag PRB BPBD Kabupaten Serang) berencana datang kesini. Mengontrol relawan. Gimana relawan menjalankan tanggung jawabnya dikontrol sama BPBD. Saya juga komunikasi terus sama Pak Wawan.

Transkip Wawancara dengan Informan 6

Wawancara dengan Bapak Nana Rusmana yang merupakan masyarakat desa Panodogan Kecamatan Cikeusal. Informan 6 merupakan informan pendukung yang terlibat dalam pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018 di Aula Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal setelah pengesahan beliau menjadi pengurus Desa Tangguh Bencana Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal.

Pertanyaan :

1. **Apakah Bapak pernah terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang diselenggarakan oleh BPBD Kab. Serang?**

   Jawab :

   Pernah, ini yang pertama kali ya. Kalo dulu di Kecamatan sebelah sempet ada kalo gak salah, karena daerah sini kan emang rawan banjir ya, jadi mungkin gantian tiap tahunnya. Kalo desa kita ini yang pertama kali.

2. **Dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko apa saja Bapak pernah terlibat? Jelaskan masing-masing!**

   Jawab :

   Kalo saya utusan desa buat ikut acara Desa tangguh neng. Desa tangguh mah dipilihnya wilayah yang banjir ya neng. Terus desa kita beberapa

rumahnya kan kena pembebasan lahan pembangunan bendungan Pamarayan, makanya desa kita dipilih neng.

3. **Sejauh apa keterlibatan Bapak dalam kegiatan tersebut?**

   Jawab :

   Oh kalo saya mah jadi peserta aja neng, tapi saya juga dilantik neng jadi pengurus Desa Tangguh Panosogan. Ngurusin sarana yang dikasih, ngerawatin, kordinasi sama BPBD ada grup whatsaapnya kan.

4. **Apa tujuan Bapak terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Supaya bisa jadi relawan bencana di daerah saya neng. Pengalaman saya dulu pas banjir, yang dateng orang BPBD tuh lama neng. Kalo kita dilatih gimana caranya kan jadi kita bisa ngebantu ya neng.

5. **Bapak ini masyarakat desa yang terkena bencana banjir ya? Di acara ini Bapak diberikan informasi apa ya pak?**

   Jawab :

   Iya kami masyarakat yang terkena banjir. Kalo banjir mah ya, daerah sini udah sering. Kita dilatih buat bisa nanganin masyarakat kalo ada banjir. Pertolongan pertama kalo terjadi banjir gitu neng. Perdesa diambil beberapa orang aja, nggak semuanya diambil, Kepala desa sama sekdes wajib. Yang udah jadi perwakilan warga itu nanti yang jadi relawan. Jadi nanti mereka yang nyampein ke warga yang lainnya lagi begitu neng.

6. **Siapa sajakah yang menjadi pembicara atau narasumber dalam acara tadi?**

   Jawab :

   Kalo yang ngomong didepan tadi mah pake baju biru (seragam BPBD Kabupaten Serang) neng ada 3, dari BPBD ya neng, pake power point. Pak Camat juga didepan, sama Pak Haji (tokoh masyarakat)

7. **Apakah ada pengontrolan atau pengawasan dari BPBD ke masyarakat pak?**

   Jawab :

   Sebulan abis acara di pendopo (sosialisasi) katanya orang BPBD dateng ke desa kita. Nanyain ke orang-orang udah ada pelatihan lagi apa belum dari orang kantor desa (relawan bencana).

Transkip Wawancara dengan Informan 7

Wawancara dengan Rizky Milyatullah yang merupakan relawan mitra BPBD Kabupaten Serang. Informan 7 merupakan informan pendukung yang terlibat dalam pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018 di Aula Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal. Beliau menjadi tamu undangan pada acara tersebut.

Pertanyaan :

1. **Apakah Abang pernah terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir yang diselenggarakan oleh BPBD Kab. Serang?**

   Jawab :

   Iya, setelah diresmikan, kami menjadi petugas relawan Destana (Desa Tangguh Bencana), kami diwajibkan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyakarat desa kita masing-masing. Nanti dikontrol sama orang BPBD.

2. **Dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko apa saja Abang pernah terlibat? Jelaskan masing-masing!**

   Jawab :

   Banyak mba, sosialisasi, simulasi, saya juga pernah diundang dalam apel kesiapsiagaan.

3. **Sejauh apa keterlibatan Abang dalam kegiatan tersebut?**

   Jawab :

Kami dilatih untuk dapat menjadi pioneer utama dalam penanganan bencana di daerah kami. Kan kami orang-orang yang ada di daerah, kami orang-orang yang paham daerah kami, ya kami dilatih untuk bisa menanggulangi bencana, seperti membuat dapur umum, membuat jalur evaluasi, mengenali debit air, ya banyak mba.

4. **Apa tujuan Abang terlibat dalam kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir?**

   Jawab :

   Saya pernah terdampak bacana banjir. Jadi keuntungannya ya saya bisa menjadi relawan didaerah saya sendiri. Bisa tau gimana caranya bertindak meyelamatkan diri sendiri, keluarga, tetangga. Sebelum menyelamatkan diri, kan kita diajarin gimana caranya biar banjir ga separah yang udah-udah, kaya lebih menggalakan lagi tidak mendirikan bangunan disepanjang bantaran sungai, buang sampai jangan disungai. Kita juga ngajarin warga tempat evakuasi kalo banjir dateng, cara make alat-alat yang dikasih BPBD.

5. **Apakah Abang ikut terlibat dalam penyusunan dan persiapan program komunikasi pengurangan risiko banjir yang diselenggarakan oleh BPBD Kab. Serang?**

   Jawab :

   Tidak mba. Soalnya saya cuman membantu pelaksanaan dilapangan saja. Yang nyusun mah orang BPBD mba, kalo kitamah nyusun yang di desa aja. Mau ada sosialisasi ke warga, pa kades yang kondisiin, kita yang bergerak.

6. **Apakah Abang mengikuti semua rangkaian kegiatan komunikasi pengurangan risiko banjir yang diselenggarakan oleh BPBD Kab. Serang dari persiapan hingga evaluasi?**

   Jawab :

   Kalo saya cuman pas pelaksanaannya saja mba. Kalo evaluasi orang BPBD itu dateng ke desa mastiin kita udah jalanin hal yang udah kita sanggupin pas dilantik apa belom. Ngontrol ke desa lagi.

7. **Apakah koordinasi yang dilakukan dengan BPBD dirasa sudah berjalan dengan efektif?**

   Jawab :

   Udah. Kita rutin koordinasi sama BPBD. Dari BPBD ada yang ngedampingin kita juga, rutin koordinasi via whatsapp. Ada juga yang ngedampingin disini, pak Hj. Kubik (tokoh masyarakat).

LAMPIRAN 2

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : **/UN.43.6.2/PG/2018** 10 Juli 2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : LUSIANA LARAS KRISTA
NIM : 6662142646

Semester : 9
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : KOMUNIKASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN S
Data diperlukan : WAWANCARA DAN OBSERVASI

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi

Dr. Rahmi Winangsih, M.Si
NIP. 196810192005012001

Surat Ijin Penelitian

Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana, 24 Juli 2018

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Lusiana Laras Kristanti
NIM : 6662142646
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
E-mail : lusianalarask@gmail.com
Alamat : Bumi Permai Sentosa B19
No. 22 Palasari, Legok, Kabupaten Tangerang

Riwayat Pendidikan

1. 2002-2008 : SDN 1 Candu Tangerang
2. 2008-2011 : SMPN 1 Legok Tangerang
3. 2011-2014 : SMK Atisa Dipamkara Tangerang
4. 2014-2018 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengalaman Organisasi

1. 2015-2016 : Anggota Departemen Kajian Strategis BEM FISIP UNTIRTA
2. 2016-2017 : Bendahara Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNTIRTA
3. 2017-2018 : Komisi 1 Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UNTIRTA

Pengalaman Bekerja

1. 2017-2018 : Guru Privat Matematika Central Bimbel Tangerang
2. 2017-2018 : *Public Relation junior* PT. PLN (Persero) (*job training*)

Serang, Oktober 2018

Lusiana Laras Kristanti